



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERGERAKAN PEMUDA DI BRUNEI DARUSSALAM
(1946—1962)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora

**PRASETYO
0606087050**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
DEPOK
JULI 2011
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS**

HALAMAN PERNYATAAN ORSINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Prasetyo
NPM : 0606087050

Tanda Tangan : 

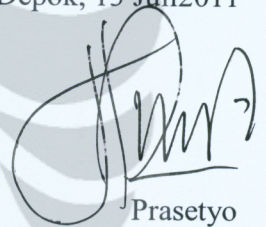
Tanggal : 13 Juli 2011

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia

Jika ternyata dikemudian hari ternyata saya terbukti melakukan tindakan plagiarisme, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya menerima sanksi yang dijatuhkan Universitas Indonesia kepada saya.

Depok, 13 Juli 2011



Prasetyo

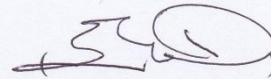
HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Prasetyo
NPM : 0606087050
Program Studi : Ilmu Sejarah
Judul : Pergerakan Pemuda Di Brunei Darussalam (1946—
1962)

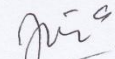
Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

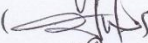
Ketua Penguji : Dr. Mohammad Iskandar




Pembimbing : Dr. Ita Syamtasiah Ahyat

()

Penguji : Linda Sunarti, M. Hum

()

Panitera : Tini Ismiyani, M. Hum

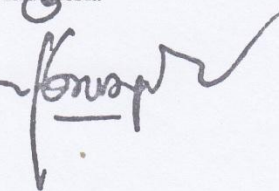
()

Ditetapkan di : Universitas Indonesia, Depok
Tanggal : 13 Juli 2011

Oleh

Dekan
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia




Dr. Bambang Wibawarta
NIP. 196 51023 199003 1 002

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Puji Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, kemudahan, dan kesehatan kepada saya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Humaniora Jurusan Ilmu Sejarah pada FIB UI. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga penulisan ini dapat dirampungkan. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Ita Syamtasiah selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan kesabarannya untuk mengoreksi dan mengarahkan saya dalam penulisan skripsi ini juga omelannya. Rasa terima kasih juga saya ucapkan kepada Mas Kasjanto M. Hum yang pada awal penulisan banyak memberi saran.

Terima kasih juga saya tujukan kepada seluruh bapak/ibu dosen Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Indonesia atas ilmu yang telah disampaikan kepada saya selama masa perkuliahan, juga dalam tahap proses pengerjaan dan pengujian skripsi ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada keluarga. Bapak dan Ibu saya, Yitno dan Katni yang terus berdoa dan penuh kasih sayang agar saya bisa cepat menyelesaikan kuliah dan mendapatkan gelar Sarjana Humaniora. Adik saya, Daniel Erwinsyah yang telah memberi saya semangat agar penulisan skripsi ini cepat terselesaikan. Untuk keluarga besar saya mas Kiki yang membantu memberi wejangan dan pinjaman laptop saat laptop saya rusak, mas Martin yang selalu menasehati juga bagi-bagi rokok saat saya membuat skripsi, mas Supri yang selalu berkata "santai aja bikin skripsinya supaya ga bingung", mbak Tinik yang selalu bilang ayo terus selesin skripsinya adik kecilku Alex yang selalu ikut kemana aja

masnya pergi, mbak Wartini dan keluarga di Sydney yang membantu membelikan saya beberapa sumber dan keluarga besar lainnya.

Special Thanks penulis ucapkan kepada seseorang yang pernah telah membantu penulis dalam mencari sumber-sumber dan suport yang sangat membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman dan sahabat yang telah memberikan banyak pengalaman berarti selama masa perkuliahan dan juga penulisan skripsi. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada sahabat saya. teman-teman Sejarah 2006: Acong, Keni, Engkong, Ilho, Yoga, Boik, Gembel, Ashagi, Gonz, Black, Adi Item, Firman (teman berbagi sumber), Andi Arif, Tommy, Hasyim, Reza, Gandhi, Gamal, Sukarno, Dedi “kecil”, Dedi, Ratna, Winda, Amal, Erik, Syeni, Gunawan, Egi, Fira (makasih banget bantuannya), Robi, Moti, Dina, Rima, Ari, Aji “tegal”, Isti (mereka lah yang mewarnai masa-masa perkuliahan saya sejak awal dengan kekonyolan, kebersamaan, canda tawa dengan penuh makna dan yang tidak mungkin bisa di beli dengan apapun). Sejarah 2005: Adi, Radit, Mizar, Mprie, Ronald, Mike, Oki, Popon, Mantri, Bim-bim, Hendaru, Dipo, Tomo, Yahya, Yossi, dan yang lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu-persatu. Kepada Sejarah 2004, Arief, Fikri, Sammy, Sulai, Adit, Wisnu, Franto, Dien, Yunia, Sania. Sejarah 2007 Wahyu, Tyson, Bugil, Miki, Limbong, Ami, Gemita, Ambon dan juga kepada Sejarah 2008 untuk “12 orang khusus”, kepada Sejarah 2009 dan Sejarah 2010 meskipun juga jarang liat. Juga untuk temen-temen FIB yang lain Wira “filsafat” thank bro pijaman laptop ma kos, Hotman, Dede, Amar, Ino, Taher, Rangga “the big man”, Abrar, Romo, Bimo, dan yang lainnya yang tak bisa disebutkan satu-persatu.

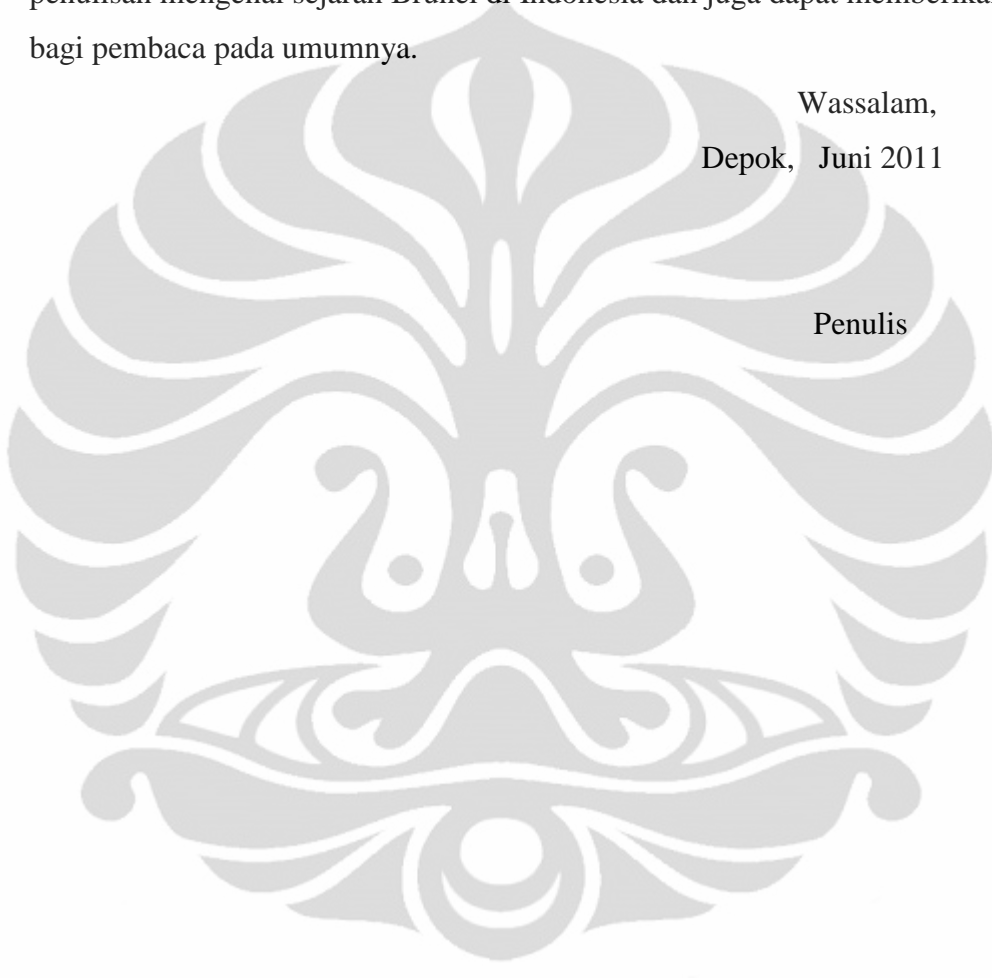
Rasa terimakasih yang amat sangat juga saya persembahkan untuk teman-teman dan junior saya di Galau Brotherhood, teman-teman di tongkrongan untuk anak-anak Orenz Mas Kiki, Bumen, Abi, Bama, Dhika di Bogor atas suportnya. Kepada Dhika “ILOVU” semoga bandnya maju, Pamay, Rio, Chanca atas kegilaannya saat saya berada di Bintaro. Kepada teman-teman semasa SMA Zulfi, Iwan, Hendra, Budi “Abang”, Budi “Ade”, Chornie, Maya dan yang lainnya, serta rasa terima kasih untuk Fachrudin teman saya di Brunei atas bantuannya untuk

mendapatkan sumber primer serta Prof. Jamil Al Sufri atas segala bantuannya .

Saya menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu saya menginginkan adanya kritik dan saran yang membangun agar dapat lebih baik dalam penulisan-penulisan selanjutnya. Semoga penulisan ini dapat menambah penulisan mengenai sejarah Brunei di Indonesia dan juga dapat memberikan wawasan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalam,
Depok, Juni 2011

Penulis



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prasetyo
NPM : 0606087050
Program Studi : Ilmu Sejarah
Departemen : Sejarah
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Pergerakan Pemuda Brunei Di Brunei Darussalam 1946—1962”

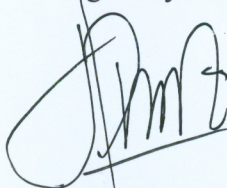
Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :Depok

Pada Tanggal : 13 Juli 2011

Yang menyatakan,



(Prasetyo)

ABSTRAK

Nama : Prasetyo
Program Studi : Ilmu Sejarah
Judul : Pergerakan Pemuda Di Brunei Darussalam (1946—1962)

Skripsi ini membahas mengenai pergerakan pemuda di Brunei Darussalam, sejak kemunculan Barisan Pemuda (BARIP) pada tahun 1946 sampai pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Rakyat Brunei (PRB) pada tahun 1962. Penjajahan yang dilakukan oleh Inggris di Brunei menyebabkan munculnya rasa nasionalisme dari para pemuda Brunei. Para pemuda Brunei mulai mendirikan organisasi pergerakan dari Barisan Pemuda (BARIP) pada tahun 1946, Brunei Film Production Company (BRUFIPCO) pada tahun 1952 dan Partai Rakyat Brunei (PRB) pada tahun 1956. Ketiga organisasi tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu memperjuangkan kemerdekaan Brunei Darussalam. Akan tetapi tujuan mereka mendapat pertentangan dari pihak Inggris. Pergerakan yang dilakukan oleh pemuda Brunei melalui cara diplomasi hingga pemberontakan. Dampak yang ditimbulkan dari pergerakan itu sangat berpengaruh bagi kondisi pemerintahan Brunei. Mulai dari penolakan sultan Brunei untuk bergabungnya Brunei ke Federasi Malaysia hingga pelarangan PRB karena dianggap partai berbahaya oleh sultan.

Kata kunci :

Brunei Darussalam; Inggris; Sultan; Pergerakan pemuda; Nasionalis, Organisasi, Pemberontakan,

ABSTRACT

Name : Prasetyo
Study Program : History
Title : Youth Movement in Brunei Darussalam (1946—1962)

This thesis discusses the youth movement in Brunei Darussalam, since the emergence of the Youth Front (BARIP) in 1946 until the insurgency conducted by the Brunei People's Party (PRB) in 1962. Colonization by the British in Brunei sense of nationalism led to appearance of the youth of Brunei. The youth movement Brunei began to established an organization of the Youth Front (BARIP) in 1946, Brunei Film Production Company (BRUFIPCO) on the epidemic of 1952 and Brunei People's Party (PRB) in 1956. All three organizations have a common goal of independence for Brunei Darussalam. But the goals they get opposition from the British. Performed by the youth movement of Brunei through diplomatic means to revolt. The impact of the movement was very influential for the condition of the government of Brunei. Starting from the rejection of the sultan of Brunei to Brunei to joining the Federation of Malaysia to ban the party PRB because it was considered dangerous by the sultan.

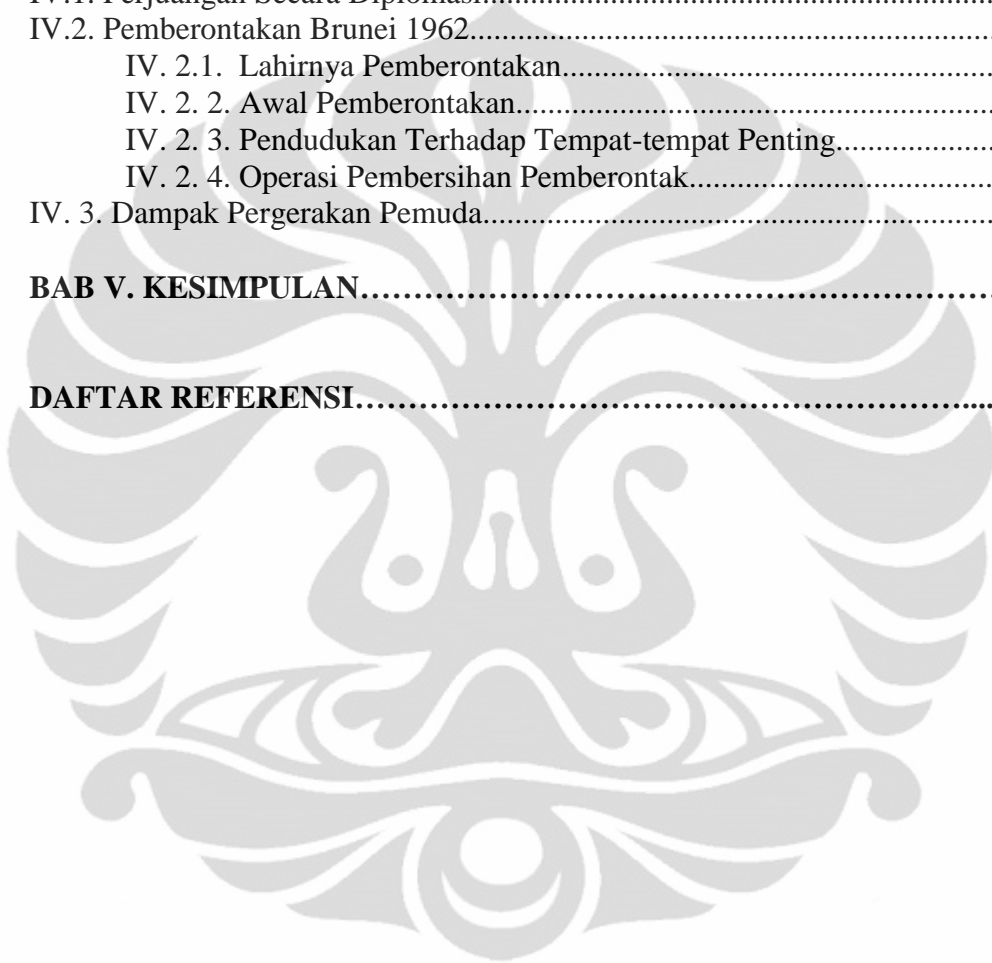
Key Words :

Brunei Darussalam; The British; Youth movements; The Sultan; Nationalism; Organization; Rebellion.

DAFTAR ISI

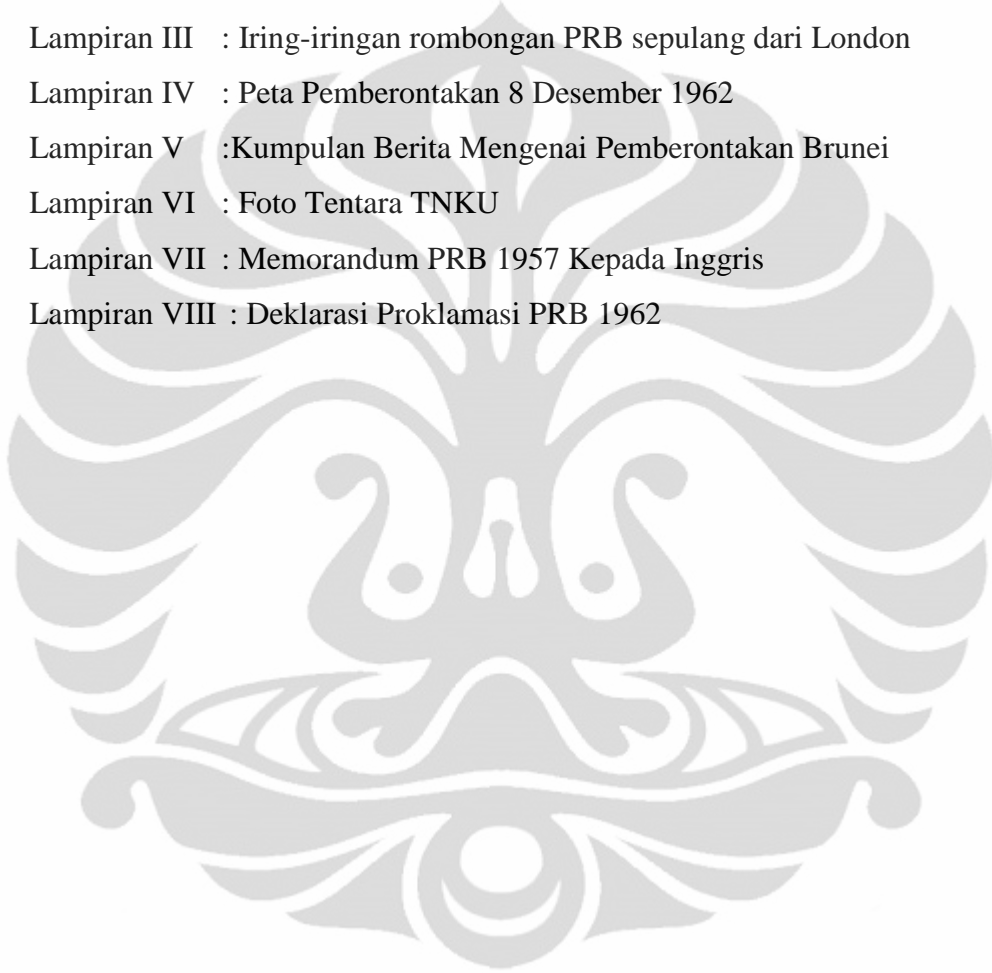
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORSINALITAS	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR ISTILAH.....	xv
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang Masalah.....	1
I.2. Rumusan Masalah.....	7
I.3. Tujuan Penulisan.....	8
I.4. Ruang Lingkup.....	9
I.5. Metode Penelitian.....	9
I.6. Tinjauan Pustaka.....	10
I.7. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II. BRUNEI DARUSSALAMSEBELUM DAN SETELAH PERANG DUNIA KEDUA.....	13
II.1. Kondisi Brunei Sebelum kedatangan Inggris.....	13
II.2. Kolonialisme Inggris di Brunei.....	16
II.2.1 Awal Masuknya Inggris ke Brunei.....	16
II.2.2 Sebab Kedatangan Inggris di Brunei.....	17
II.2.3 Kondisi Brunei Masa Pemerintahan Kolonial Inggris.....	18
II.3 Pendudukan Jepang di Brunei (1941—1945).....	20
BAB III. MUNCULNYA ORGANISASI PEMUDA DI BRUNEI DARUSALLAM.....	25
III.1 Nasionalisme Melayu Brunei.....	25
III.2 Barisan Pemuda Brunei (BARIP).....	26
III.2.1 Awal Berdirinya Barisan Pemuda Brunei (BARIP).....	26
III.2.2 Perjuangan BARIP dan Dampaknya.....	29
III.2.3 Masa-Masa Akhir BARIP.....	32
III.3 Organisasi Perfilman Brunei Film Production Company (BRUFIPCO).....	33
III.3.1. Lahirnya BRUFIPCO.....	33
III.3.2. Perjuangan BRUFIPCO Hingga Kejatuhannya.....	35

III. 4. Partai Rakyat Brunei (PRB).....	37
III. 4. 1. Lahirnya PRB.....	37
III. 4. 2. Pengesahan PRB.....	38
BAB IV. PERGERAKAN PEMUDA BRUNEI TERHADAP INGGRIS DAN DAMPAKNYA.....	42
IV.1. Perjuangan Secara Diplomas.....	42
IV.2. Pemberontakan Brunei 1962.....	43
IV. 2.1. Lahirnya Pemberontakan.....	43
IV. 2. 2. Awal Pemberontakan.....	46
IV. 2. 3. Pendudukan Terhadap Tempat-tempat Penting.....	48
IV. 2. 4. Operasi Pembersihan Pemberontak.....	51
IV. 3. Dampak Pergerakan Pemuda.....	53
BAB V. KESIMPULAN.....	56
DAFTAR REFERENSI.....	61



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Peta Brunei
- Lampiran II : Foto Sultan Brunei Bersama Pimimpinan Jepang
- Lampiran III : Iring-iringan rombongan PRB sepulang dari London
- Lampiran IV : Peta Pemberontakan 8 Desember 1962
- Lampiran V :Kumpulan Berita Mengenai Pemberontakan Brunei
- Lampiran VI : Foto Tentara TNKU
- Lampiran VII : Memorandum PRB 1957 Kepada Inggris
- Lampiran VIII : Deklarasi Proklamasi PRB 1962



DAFTAR SINGKATAN



AIF	: <i>Australian Imperial Force</i>
APB	: Angkatan Pemuda Brunei
BARIP	: Barisan Pemuda
BMA	: <i>British Military Administration</i>
BNBC	: <i>British North Borneo Company</i>
BRUFIPCO	: <i>Brunei Film Production Company</i>
KKIMPB	: Kesatuan Kaum Ibu Melayu Pelita Brunei
MPSI	: Maktab Perguruan Sultan Idris
MUTU	: Persatuan Murid Tua
PAS	: Partai Islam Setanah Melayu
PGGMB	: Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PMB	: Persatuan Melayu Brunei
PPRB	: Pertubuhan Perikatan Rakyat Bersatu
PRB	: Partai Rakyat Brunei
PRM	: Partai Rakyat Malaya
PRS	: Partai Rakyat Singapura
RRI	: Radio Republik Indonesia
TNKU	: Tentara Nasional Kalimantan Utara

DAFTAR ISTILAH

- Ale Kuning, Ale Merah** : Nama samaran tentara Sekutu yang bertugas menumpas pemberontakan di Brunei.
- Anggota Dewan Harian** : Susunan kepengurusan pusat partai yang melingkupi ketua umum, wakil ketua umum, setiausaha agung, hingga ke sub cabangnya.
- Anggota Dewan Partai** : Susunan kepengurusan ranting partai.
- Ekspansi** : Menduduki wilayah lain dalam bertujuan untuk perluasan wilayah, dan biasanya disertai dengan pengambil alihan kekayaan alam.
- Federasi Malaysia** : Adalah gabungan dari beberapa Negara seperti Malaysia, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei, yang membentuk suatu federasi pada tahun 1963. Lalu kemudian Brunei menolak bergabung pada tahun 1963.
- Great East Asia Co-Prosperty Sphere*** : Konsep kebijakan Jepang dalam mengadakan propaganda agar pihak Brunei mau kerja sama dengan Jepang dan membantu dalam perang Pasifik.
- Gurkha** : Pasukan Inggris yang berasal dari India yang bertugas menumpas pemberontakan pada tanggal 8 Desember 1962, pasukan ini terkenal sekali dengan kekejamannya dalam perang.
- Hegemoni** : Pengaruh suatu negara terhadap negara lain.
- Ideologi** : Paham yang berkembang dan menjadi dasar bangsa.
- Intelektual** : Orang-orang terpelajar; biasanya mendapatkan pendidikan yang tinggi dan sangat berpengaruh dalam perkembangan suatu negara.
- Kolonialisme** : Paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu.

Leadership	: Konsep kepemimpinan.
Majelis Mensyurat Negeri	: Lembaga legislatif di Brunei yang bertugas membuat undang-undang, mirip dengan DPR dan MPR di Indonesia.
Manifesto	: Pernyataan terbuka tentang tujuan dan pandangan seseorang atau suatu kelompok.
Memorandum	: Surat perjanjian, bentuk komunikasi yg berisi saran, arahan, atau penerangan.
Nasionalisme	: Paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri.
Pemuda	: Orang muda yang mendasari perubahan suatu bangsa.
Pemberontakan	: Kegiatan melakukan perlawanan kepada pihak pemerintahan.
Pergolakan	: Peristiwa pertentangan yang terjadi dalam suatu negara dan berpengaruh terhadap kondisi pemerintahan negara tersebut.
Po-li	: Nama lain Brunei yang berasal dari Cina yang bermakna sebuah daerah yang makmur dan kaya.
Propaganda	: Kegiatan yang bertujuan agar mau mengikuti keinginan kita.
Residen	: Perwakilan yang di letakkan ditiap negara jajahan.
Sekularisme	: Paham atau pandangan yg berpendirian bahwa moralitas tidak perlu didasarkan pd ajaran agama.
Setiausaha Tanah Jajahan	: Sekertaris tanah jajahan yang mengkoordinasi wilayah-wilayah yang menjadi jajahan Inggris, terutama untuk wilayah kawasan Asia Tenggara seperti Brunei, Malaysia, Myanmar.

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang

Pada abad 18, kawasan Asia Tenggara mengalami masa kolonialisme. Bahkan menjelang awal abad 19 kekuasaan kolonialisme Barat telah masuk ke kawasan Asia khususnya Asia Tenggara. Dalam hal ini kawasan Asia Tenggara mengalami masa kolonialisme. Contoh-contoh dari kolonialisme itu adalah, Indonesia yang dikuasai oleh Belanda, Indo-cina oleh Prancis, Filipina oleh Spanyol dan Amerika, Malaya dan Singapura dikuasai oleh Inggris.¹ Kawasan Malaya sudah dikuasai oleh Inggris menyebabkan Brunei mengalami kondisi yang berbahaya. Pengaruh Inggris di Brunei dimulai saat kedatangan James Brooke ke Kuching, Serawak, pada tahun 1839. Bahkan James Brooke melakukan perjanjian dengan Sultan Hashim Jailul Alam Aqamadin². Kekuasaan Brunei yang sebenarnya meliputi Serawak hingga Sabah. Akan tetapi, akibat dari perjanjian yang dilakukan oleh Sultan Hashim dengan James Brooke menyebabkan sebagian wilayah Serawak diambil alih kekuasaannya pada tahun 1841.³ Dalam tempo lima puluh tahun, James Brooke dan prajuritnya telah berhasil menguasai sedikit demi sedikit daerah-daerah Brunei yang ada di Serawak⁴. Brooke berhasil merebut wilayah Serawak dengan bantuansuku dayak Iban yang olehnya dimanfaatkan sebagai tentara perang. Dalam penguasaan Serawak pada awal mulanya Brooke tidak mendapatkan bantuan sama sekali dari Kerajaan Inggris. Di wilayah Serawak Brooke dikenal dengan sebutan Raja Putih.⁵

¹Robert Payne, 1960. *The White Rajahs Of Sarawak*, London: Weidenfield and Nicolson. Hal. 98

²Haji Awang Mohd. Jamil Al Sufri. *Liku-Liku Perjuangan Pencapaian Kemerdekaan Brunei* Darussalam, Pusat Sejarah Brunei, 1992. Hal. XLV

³*Ibid.*

⁴Payne, *Op. cit.* hal. 104

⁵Julukan yang diberikan oleh orang-orang dayak di Serawak kepada James Brooke karena dia berkulit putih. *Ibid.* hal. 115

Kemudian pada tahun 1890, Brooke telah berhasil merampas Limbang dan menjadikan Brunei dua bagian. Akibat tekanan terhadap kawasan timur laut Brunei, juga mengakibatkan beberapa kawasan wilayah Brunei disewakan kepada *British North Borneo Company* (BNBC), kawasan yang disewakan pada BNBC adalah Sabah.⁶

Pada tahun 1888, demi mempertahankan kedaulatan Brunei, Sultan Hashim Jalilu Alam telah menandatangani perjanjian kekuasaan dengan Inggris. Perjanjian itu berisi tentang keinginan Sultan Hashim agar Brunei berada di bawah perlindungan Inggris. Setelah perjanjian tahun 1888, Sultan melakukan kembali perjanjian pada tahun 1905 dan 1906, yang berisi bahwa Sultan akan menerima pegawai Inggris yang akan dilantik menjadi Residen. Residen bertugas untuk menjadi wakil atau duta kerajaan Inggris.⁷ Perjanjian itu ditandatangani pada 3 Desember 1905 dan 2 Januari 1906. Perjanjian di tahun 1905 dan 1906 itu menjadikan Brunei berada di bawah sistem residen yang sudah terlaksana di wilayah Malaya.⁸ Walaupun pada dasarnya dari perjanjian itu, tugas Residen hanya menjadi penasihat Sultan, tapi dalam pelaksanaannya pemerintahan di lakukan oleh Inggris.

Pada masa Brunei di bawah kendali kerajaan Inggris pada tahun 1888, memunculkan banyak perubahan di Brunei. Walaupun perubahan yang dilakukan Inggris tidak langsung tapi bertahap. Perubahan yang paling terasa adalah berkurangnya kekuasaan sultan akibat dari perjanjian bahwa Brunei menjadi wilayah Residen. Selain itu muncul kebijakan tentang sekularisme. Sekularisme mulai muncul saat Brunei berada pada sistem resident tahun 1905 dan 1906, pengaruh sekularisme dibawa oleh para pejabat Inggris melalui sistem pemerintahan ala Barat yang diajarkan kepada pejabat-pejabat Kerajaan dan para murid-murid sekolah. Dalam pengaruh sekularisme menyatakan bahwa ajaran

⁶C. MaryTurnbull., *A History of Malaysia, Singapore, and Brunei*. Sydney: Allen and Unwin, 1989. Hal. 166

⁷*Ibid.* hal. 167

⁸Perjanjian yang terjadi antara Inggris dan Brunei yang dilakukan oleh Sultan Brunei dengan James Brooke. Haji Awang Mohd. Jamil Al Sufri. *Liku-Liku Perjuangan Pencapaian Kemerdekaan Brunei Darussalam*, Pusat Sejarah Brunei, 1992. hal 7

agama harus dipisahkan dari pemerintahan, yang pada dasarnya pemerintahan Brunei itu berdasar pada ajaran agama dan hukum agama.⁹

Bahkan setelah perang pasifik berakhir, pada awal tahun 1946, Brunei berada di bawah kekuasaan *British military Administration* (BMA). BMA mendapatkan semua kekuasaan setelah James Brooke dan BNBC memberikan kekuasaan mereka sepenuhnya kepada kerajaan Inggris lalu pihak Kerajaan menyerahkan kekuasaan kepada BMA.¹⁰ Kebijakan yang diterapkan BMA sangatlah merugikan bagi pemerintah dan rakyat Brunei. Itu dikarenakan pejabat-pejabat yang mengisi pemerintahan kebanyakan adalah orang Inggris dan orang India yang dibawa dari wilayah Myanmar, sedangkan untuk orang Brunei sendiri sangat sedikit dan itu pula hanyalah sebagai stafnya saja.¹¹ Selain itu, bahasa yang wajib digunakan dalam pemerintahan adalah bahasa Inggris, hal tersebut sangat merugikan orang Brunei karena banyak yang tidak bisa berbahasa Inggris. BMA menjalankan sikap yang sangat diskriminatif terhadap orang Brunei. Banyak dari rakyat Brunei yang sangat sulit dalam menggunakan fasilitas umum dan banyak hak-hak orang Brunei yang dilanggar. Hal tersebut adalah pengibaran bendera Brunei di bawah bendera Inggris dan dalam penerimaan pendidikan orang Brunei merupakan kelas paling bawah.¹² Selain itu juga banyak dari orang Brunei yang belajar di luar negeri di asingkan karena dituduh bisa melakukan pemberontakan.

Awal munculnya kebencian itu saat pemerintah Inggris menerapkan konsep sekularisme yang pada dasarnya sangat bertentangan dengan dasar pemerintahan Brunei. Pemerintahan Brunei itu tidak dapat lepas dari aspek kehidupan dan selalu menggunakan konsep ajaran agama, terutama agama Islam yang merupakan agama yang mayoritas di Brunei. Tindakan Inggris yang menerapkan sekularisme menimbulkan rasa nasionalisme dari rakyat Brunei terutama para pemudanya.¹³

⁹ Alun Chalfont, 1989. *By God's Will A Portrait of The Sultan of Brunei*. London: Weidenfield and Nicolson hal. 41.

¹⁰ Haji Awang Mohd. Jamil Al Sufri. Tarsilah Brunei, Pusat Sejarah Brunei, 1990, hal. 6

¹¹ *Ibid.* hal. 8

¹² Chalfont. *Op. cit.* hal. 44

¹³ Kebencian yang terjadi akibat dampak dari kebijakan yang diterapkan oleh BMA. *Op.cit.* hal 45

Pihak BNBC berupaya memerintah Borneo Utara sehingga 1942, selama 60 tahun apabila Perang Dunia Kedua teretus. Tentara Jepang mendarat di Labuan pada 1 Januari dan menduduki Borneo Utara sehingga ia dibebaskan oleh armada dari *'9th Division Australian Imperial Forces (A.I.F)*¹⁴ pada tahun 1945. Setelah Perang Dunia Kedua, Borneo Utara telah diperintah oleh *British Military Administration (BMA)*.

Pada 15 Juli 1946, Brunei diserahkan kepada pemerintah Inggris karena BNBC tidak mampu membiayai pembangunan Borneo Utara selepas Perang Dunia Kedua. Kehancuran yang dialami oleh bandar Sandakan telah menyebabkan Jesselton dipilih sebagai Pemimpin negeri selepas era Perang Dunia Kedua. Sistem pemerintahan penjajahan selepas perang sama dengan sistem pemerintahan pada era BNBC. Penataan dan pembangunan kembali kawasan Borneo Utara menjadi fokus utama para penguasa.¹⁵

Pada tanggal 24 maret 1946, terjadi pertikaian antara cina dengan Melayu Brunei di Bandar Brunei.¹⁶ Akibat dari persetujuan itu bendera Cina yang dipasang di *Pejabat Persatuan Pemuda Cina Sebarang Laut*¹⁷ tidak dipasang lagi. Selain itu muncullah gerakan-gerakan pemuda yang menentang Inggris. Gerakan itu adalah *Barisan Pemuda (BARIP)* yang dibentuk oleh Pengiran Mohd. Yusuf, yang baru kebal dari menyelesaikan studi ilmu pemerintahan di Jepang pada tahun 1946 di universitas Hiroshima.¹⁸ Gerakan itu dibentuk atas dasar nasib rakyat Brunei yang ditekan dan dikesampingkan. Gerakan itu dibentuk bersama para pemuda yang berasal dari guru-guru lulusan *Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI)*¹⁹, lulusan *Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei (PGGMB)*, serta pejabat-pejabat kerajaan. Gerakan BARIP dibentuk pada tanggal 12 april 1946 di

¹⁴Adalah angkatan udara Australia yang turut serta dalam perang dunia Kedua. *Ibid* hal 23

¹⁵Turnbull. *Op. cit.* hal. 230.

¹⁶Bandar Brunei merupakan nama awal Bandar Sri Begawan yang berubah setelah kemerdekaan Brunei. Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri, *Brunei Darussalam: The Road To Independence*. Bandar Sri Begawan: Pusat Sejarah Brunei, 1998. Hal. 15

¹⁷Badan yang menjadi tempat yang mengurus persekutuan orang Cina di Brunei. *Ibid* hal 45

¹⁸Haji Zaini bin Haji Ahmad. *Pertumbuhan Nasionalisme Di Brunei (1939-1962)*. Brunei: Asia Printers, 2004. hal 23

¹⁹Nama dari perguruan tinggi negeri di Malaysia yang banyak meluluskan kaum nasionalis

rumah Awang Ya'akub bin Awang Othman²⁰. Gerakan ini dibentuk dengan tujuan untuk menyatukan semangat pemuda untuk memperjuangkan hak bangsa Melayu Brunei di negerinya sendiri dan menjadi barisan terdepan dalam menegakkan dan mempertahankan kekuasaan raja dan rakyat Brunei.²¹

Selain BARIP pada pertengahan tahun yang sama, dibentuk juga *Persatuan Melayu Brunei* (PMB) yang di pimpin oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Omar Ali Saifuddien²² dan Pengiran Abu Bakar bin Pengiran Omar. PMB dibentuk dengan tujuan Untuk mempersatukan rakyat Melayu dan memperjuangkan hak rakyat Melayu Brunei. BARIP dan PMB sebenarnya memiliki tujuan yang sama yakni menumbuhkan nasionalisme Brunei.²³ Dan setelah BARIP dan PMB tidak aktif lagi, maka pada tahun 1948 muncul gerakan baru yaitu *Angkatan Pemuda Brunei* (APB) yang dipimpin oleh Awang Abd. Hamid bin Awang Othman dan gerakan *Persatuan Murid Tua* (MUTU) yang diketuai oleh Yang Mulia Pengiran Anak Saifuddin bin Pengiran Bendahara Pengiran Anak Mohd. Yassin. Dasar dan tujuan gerakan baru ini adalah lanjutan dari perjuangan gerakan sebelumnya.²⁴ Tapi perjuangan mereka lebih banyak dalam pendidikan dan persatuan rakyat Brunei. Pada pertengahan 1948, BMA menyerahkan kembali pemerintahan Brunei kepada kesultanan Brunei.

Pasca BMA memberikan kembali pemerintahan kepada kesultanan Brunei, Inggris masih tetap bercokol di Brunei. Inggris masih menempatkan perwakilannya di Brunei. Itu disebabkan karena pemerintah Inggris belum memberi kebijakan kepada Brunei untuk merdeka. Inggris masih mengendalikan kebijakan pemerintahan sedangkan kesultanan Brunei hanya memegang kebijakan dalam hal adat, kebudayaan, dan agama saja²⁵. Setelah wafatnya Sultan Omar Ali

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.* hal 24

²²Pada tahun 1950, beliau naik tahta menjadi sultan Brunei. Peter A Poole. *Politic and Society in South East Asia*. Singapore: Mcfarland, 2009. Hal. 115

²³Zaini (2004). *Op. cit.* hal. 25

²⁴Yaitu gerakan BARIP dan PMB, Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri. *Brunei Darussalam: The Road To Independence*. Bandar Sri Begawan: Pusat Sejarah Brunei, 1998. Hal. 20

²⁵*Ibid.* hal. 27

Saefudin, pemerintahan Brunei dipegang oleh Sultan Halsanal Bolkiah yang naik tahta pada usia yang sangat muda yaitu 16 tahun²⁶.

Pada 22 Januari 1956 *Partai Rakyat Brunei* (PRB) dibentuk sebagai cabang dari *Partai Rakyat Malaya* (PRM)²⁷, tujuan dalam pembentukan PRB adalah menentang segala bentuk penjajahan dibidang politik, ekonomi, dan sosial²⁸. Lalu, memperjuangkan kemerdekaan bagi seluruh kepulauan melayu yang berdaulat secara pemerintahan. Mempertahankan kekuasaan Sultan Brunei dengan semua keturunannya untuk menduduki tahta kerajaan. Mewujudkan negara Melayu yang merdeka dan berdaulat ke dalam dan ke luar, demokratik, menjamin keselamatan serta kemakmuran rakyat. Kemunculan PRB sebagai organisasi politik dimulai pada akhir Januari 1956. PRB diketuai oleh A.M. Azhari. Pada dasarnya PRB tidak diakui oleh Sultan Haji Omar Ali Saifuddin yang menyatakan bahwa tujuan dari pembentukan PRB telah menyalahi Undang – Undang kerajaan Brunei hal itu disebabkan karena dalam tujuan PRB terdapat keinginan untuk memperluas pengaruh Brunei ke Sabah dan Serawak²⁹.

Susunan kepengurusan PRB hampir sama dengan susunan PRM. Kekuatan tertinggi terletak pada kongres yang dilaksanakan setahun sekali. Apabila kongres tidak bersidang maka pimpinan dipegang oleh dewan pimpinan partai selain itu juga terdapat dewan harian pusat dan dewan harian cabang³⁰. Pengaruh PRB dalam pergerakannya sangat tidak disukai oleh Sultan karena PRB menerapkan konsep Nasionalis pada masyarakat.

Pada bulan Mei 1957, pimpinan PRB berkeinginan untuk meminta nasihat tentang undang-undang dari seorang pakar sosialis Inggris W.A.L. Raeburn yang

²⁶ Alun Chalfont, 1989. *By God's Will A Portrait of The Sultan of Brunei*. London: Weidenfield and Nicolson hal. 51

²⁷ Partai Rakyat Malaya (PRM) merupakan partai oposisi di Malaysia yang berasaskan Sosio-Nasional Demokratik serta menjadi penentang United Malays National Organisation (UMNO). *Op. cit.* hal. 35

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Haji Zaini bin Haji Ahmad. *Pertumbuhan Nasionalisme Di Brunei (1939-1962)*. Brunei: Asia Printers, 2004.. hal .38

³⁰ *Ibid.*

memberikan satu memorandum politik.³¹ Dalam memorandum itu digambarkan tuntutan-tuntutan politik PRB seperti model pemerintahan sendiri, komposisi majelis mensyuarat negeri, pembentukan sistem kabinet dalam pemerintahan, dan tata cara pemilihan umum. Memorandum tersebut diserahkan kepada pemerintah Inggris di London pada Juni 1957.³² Pada dasarnya pembentukan memorandum tersebut adalah menuntut terlaksananya pemilihan umum yang demokratis.

Setelah kembali dari Inggris, PRB membentuk sebuah petisi untuk sultan. Petisi tersebut berisi tentang tuntutan PRB untuk mengubah tentang bab-bab dalam perlembagaan negeri. Karena menurut PRB ada beberapa bab dan pasal dalam Undang-undang yang dirasakan perlu untuk dirombak. Seperti mengenai hak Sultan yang melantik semua lulusan *Majelis Mensyuarat Kerajaan Kabinet*³³ dan pemecatannya. Setelah itu PRB juga menuntut agar Sultan mengadakan pemilihan umum agar terjadinya sistem demokratis di Brunei. PRB juga menginginkan agar Brunei lepas dari kolonialisme Inggris.³⁴ Dalam tuntutan PRB menginginkan bahwa Brunei menjadi negara yang merdeka, berdaulat dan tidak berada di bawah Inggris.³⁵

Dalam penulisan karya ini, tema yang diangkat oleh penulis adalah yang belum pernah ditulis di Indonesia. Karya yang mirip juga telah ditulis oleh sejarawan dari Brunei. Tetapi fokusnya berbeda dengan penulis. Tema yang diangkat oleh penulis lebih menitik beratkan pada permasalahan pada pergerakan pemuda. Sedangkan pada penulisan lain lebih pada kondisi Brunei pada masa menjelang kemerdekaan.

I.2. Rumusan Masalah

Brunei yang dulunya merupakan kesultanan Islam Melayu yang cukup

³¹Haji Zaini bin Haji Ahmad. *Brunei ke Arah Kemerdekaan*. Selangor: Haji Zaini bin Haji Ahmad Press, 1984. Hal. 53

³²*Ibid.* hal. 54

³³Lembaga pemerintah yang tugasnya seperti *Majelis Permusyawaratan Rakyat* (MPR) di Indonesia. Naimah Talib. "A Resilient Monarchy: The Sultanate of Brunei and Regime Legitimacy in an Era Democratic Nation State". *New Zealand Journal of Asian Studies* 4, 2 (December, 2002). Hal. 139-140

³⁴Zaini (1984). *Op. cit.* hal. 60

³⁵*Ibid.*

besar dan memiliki wilayah yang luas yang sekarang ini mengalami perubahan luas wilayah hingga menjadi kecil. Hal tersebut disebabkan oleh pengaruh kolonialisme Inggris di Brunei. Penerapan kebijakan yang dilakukan oleh pihak Inggris menimbulkan pergolakan dari pemuda Brunei yang ingin lepas dari kolonialisme Inggris. Rasa nasionalis mulai tumbuh dalam diri para pemuda Brunei. Dalam rumusan permasalahan ini terdapat masalah pokok dan juga gambaran dari masalah pokok tersebut. Masalah pokoknya adalah

Bagaimana pergerakan pemuda di Brunei tahun 1946-1962?

Serta sub masalahnya terbagi atas:

- Bagaimana kondisi Brunei pada sebelum dan sesudah Perang Dunia II, kondisi saat awal kedatangan Inggris yang diwakili oleh James Brooke, saat pendudukan Jepang, hingga akhir perang dunia II?
- Mengapa muncul gerakan-gerakan dari para pemuda Brunei?
- Apa saja bentuk perlawanan gerakan dari para pemuda Brunei?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah agar kita dapat mengetahui gambaran tentang pergerakan pemuda di Brunei pada tahun 1946-1962. Penerapan kebijakan yang dirasakan oleh Inggris sangat merugikan bagi Brunei sehingga menimbulkan gerakan perlawanan oleh pemuda. Keinginan untuk merdeka menjadi dasar perjuangannya. Selain itu munculnya semangat nasionalisme di kawasan Asia Tenggara menjadi tonggak bagi kemunculan rasa nasionalis di Brunei. Awal pergerakan pemuda dengan melalui organisasi pergerakan. Di mana, dalam organisasi tersebut pemuda Brunei melakukan perjuangan secara diplomasi maupun secara kontak fisik langsung serta dampak yang ditimbulkan dari perjuangan tersebut.

I.4 Ruang Lingkup

Agar penelitian ini terfokus perlu adanya batasan dalam ruang lingkup yaitu, lingkup spasial dan lingkup temporal. Lingkup spasial adalah membahas suatu daerah atau wilayah dimana peristiwa itu terjadi. Menjadi lingkup spasial dalam penelitian ini adalah wilayah negara Brunei. Hal ini didasari dari bahwa penulisan ini terfokus pada peristiwa yang terjadi di Brunei Darussalam.

Lingkup temporal adalah waktu berlangsungnya peristiwa itu terjadi. Lingkup temporal pada penulisan ini adalah pada tahun 1946-1963. Tahun tersebut dijadikan sebagai batas waktu penelitian karena pada tahun tersebut munculnya organisasi pergerakan hingga masa pemberontakan. Pada tahun 1946 mulai lahirnya organisasi pemuda BARIP dan dalam periode waktu hingga 1963 merupakan gambaran dari pergerakan yang dilakukan oleh PRB. Dari mulai pergerakan melalui diplomasi hingga melakukan pemberontakan terhadap Inggris dan kesultanan Brunei.

I.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode sejarah, metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan sejarah masa lampau. Adapun proses metode sejarah meliputi empat tahap, yaitu: Heuristik (pengumpulan data), kritik sumber, interpretasi, historiografi.

Penulis pertama kali mencari data melalui heuristik yaitu mengumpulkan data yang berupa buku, jurnal, dan artikel. Data-data tersebut dijadikan sebagai sumber penulisan data yang di dapatkan berasal dari berbagai perpustakaan seperti perpustakaan FIB UI, Perpustakaan Pusat UI, perpustakaan Nasional, perpustakaan LIPI, Freedom Institute, sekretariat ASEAN, dan beberapa buku yang di dapat dengan membeli di pameran buku. Sedangkan jurnal dan artikel banyak di unduh dari internet seperti JSTOR, JMBRAS, google, dan pusat sejarah brunei. Buku-buku yang didapat dari Pusat Sejarah Brunei adalah buku tentang *Pertumbuhan Nasionalisme Di Brunei (1939-1962)*.

Tahap selanjutnya adalah melakukan kritik sumber terhadap sumber-sumber yang sudah peneliti dapatkan. Sumber-sumber tersebut harus melalui tahap kritik ekstern dan kritik intern. Dalam melakukan kritik ekstern sumber-sumber yang didapatkan semuanya benar-benar sumber yang diperlukan penulis dalam melakukan penelitian walaupun ada sumber yang membahas masalah secara umum ataupun khusus, dalam melakukan kritik ekstern penulis sudah melakukan penyeleksian terhadap data-data yang didapatkan dari sumber-sumber tersebut. Dalam kritik intern penulis mulai membandingkan isi buku, mulai dari kapan tahun terbitnya, serta isi materi yang sesuai dengan karya yang akan ditulis. Penulis menitik beratkan bagian dalam data yang membahas tentang pergerakan pemuda serta tentang Brunei sendiri.

Setelah dikritisi penulis menginterpretasikan data tersebut dalam bentuk skripsi yang membahas tentang pergerakan pemuda, mulai dari organisasi pergerakan hingga bentuk perlawanan mereka serta dampak yang ditimbulkan. Penulis menuliskannya dalam bentuk penulisan sejarah (historiografi) tentang pergerakan pemuda Brunei pada tahun 1946-1963.

1.6. Tinjauan Pustaka

Dalam pencarian data, penulis menggunakan beberapa buku sebagai sumbernya. Penulis menggunakan buku karya Pehin Orang Kaya Amar Diraja Dato Seri Utama (Dr.) Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri, berjudul *Liku-Liku Perjuangan Pencapaian Kemerdekan Negara Brunei Darussalam*, yang menjelaskan tentang konsep perjuangan Brunei dalam menghadapi Inggris untuk mencapai kemerdekaannya. Seperti yang dikutip oleh penulis bahwa: “Perlakuan yang diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah Inggris lalu menimbulkan rasa nasionalisme rakyat Brunei untuk melawan. Dan memunculkan gerakan-gerakan persatuan yang dipimpin oleh para pemuda Brunei dalam menentang kolonialisme Inggris”.

Buku karya Alun Chalfont, yang berjudul *By God's Will A Potrait of The Sultan Of Brunei*. Buku tersebut berisi banyak tentang kondisi Brunei pada masa

pemerintahan Sultan Hasanah Bolkuah yang menjadi Sultan pada usia 16 tahun. Juga tentang kondisi Brunei pada masa kolonialisme Inggris di Brunei.

Buku karya Haji Awang Mohmd. Jamil Al-Sufri ini yang berjudul *Rampai Sejarah: Meniti Sejarah Silam* lebih menggambarkan garis besar sejarah Brunei. Buku ini menggambarkan awal kemunculan kesultanan Brunei dan bentuk pemerintahan kesultanan Brunei. Awal kapan kemunculan Kesultanan Brunei setelah kejatuhan Malaka dan juga masa kejayaannya. Buku ini juga menjelaskan tentang sultan yang memimpin Brunei serta peran serta mereka pada pemerintahan Brunei itu sendiri. Buku ini juga membahas kondisi hubungan perdagangan Brunei dengan negara lain. Penulis menggunakan buku ini untuk bahan bab ke dua. Karena pada bab kedua pembahasan dalam skripsi lebih banyak tentang kondisi awal kesultanan Brunei sebelum kedatangan Inggris. Kondisi awal pemerintahan Brunei hingga masa kejayaan. Konsep dari mandala juga banyak dibahas dalam buku ini akan tetapi penulis hanya menggunakan beberapa bab yang dirasa penting.

Selain buku penulis juga menggunakan jurnal sebagai sumber datanya. Jurnal terbitan *Modern Asian Studies* yang berjudul "British Administration in Brunei 1906-1959" karya A. M. V. Horton. Jurnal ini berisi tentang gambaran dari BMA. Dari apa itu BMA hingga kebijakan yang diterapkannya. Serta dampak yang ditimbulkan, yang banyak menimbulkan pertentangan yang cukup besar bagi kehidupan di Brunei. BMA merupakan suatu badan yang dibentuk Inggris untuk menjadi perwakilan Inggris di wilayah jajahannya. BMA tidak hanya ada di Brunei juga ada di Malaysia, Myanmar, India dan wilayah jajahan Inggris lainnya. BMA diberikan kebijakan khusus oleh kerajaan Inggris sehingga mereka berhak untuk membentuk perundangan tersendiri.

Dalam jurnal ini juga digambarkan tokoh-tokoh yang berada di dalam BMA. Serta kebijakan yang diterapkan oleh masing-masing tokoh. Para pemimpin BMA memiliki kebijakan yang berbeda akan tetapi semua kebijakannya sangat merugikan bagi kedaulatan rakyat dan pemerintahan Brunei sendiri.

Juga mencari data melalui internet. Penulis kemudian mengkritisi sumber-sumber tersebut dengan cara membandingkannya. Hal ini agar penulis dapat mengetahui kebenaran dari sumber tersebut.

I.7. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penjabaran masalah, penulisan skripsi dibagi dalam 5 bab. Gambaran perincian babnya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi gambaran umum mengenai masalah yang dibahas. Bab pendahuluan mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, metode penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

Bab kedua pembahasan mengenai kondisi Brunei pada masa sebelum dan sesudah Perang Dunia II. Dalam bab ini terbagi atas tiga sub bab. Pertama membahas tentang kondisi Brunei sebelum kedatangan Inggris. Kedua membahas tentang Kolonialisme Inggris di Brunei. Ketiga membahas mengenai pendudukan Jepang di Brunei.

Bab ketiga membahas tentang munculnya gerakan pemuda. Bab ini terbagi dalam empat sub bab. Pertama membahas nasionalisme pemuda Brunei. Kedua tentang organisasi BARIP yang meliputi awal pembentukan dan pergerakan mereka. Ketiga membahas tentang BRUFIPCO yang merupakan organisasi perfilman di Brunei. Keempat membahas munculnya Partai Rakyat Brunei.

Bab keempat membahas tentang pergerakan Partai Rakyat Brunei. Mulai dari pergerakan secara diplomasi kepada Inggris dan Sultan Brunei hingga melalui pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Rakyat Brunei. Juga dibahas mengenai dampak dari pergerakan itu terhadap negara Brunei, dari timbulnya sikap nasionalisme hingga ketakutan Inggris terhadap pergerakan dari PRB

Bab kelima berisi kesimpulan dari makalah ini.

BAB II

BRUNEI DARUSSALAM SEBELUM DAN SETELAH PERANG DUNIA

KE II

II.1 Kondisi Brunei Sebelum kedatangan Inggris

Brunei sebenarnya telah menjadi sebagai kerajaan sejak tahun 517 dan bersaing dengan Palembang Tua dan Taruma Negara. Dalam catatan bangsa Cina pada zaman Dinasti Sui (581-619), Brunei dalam catatan itu dikenal dengan nama *Po-Li*³⁶. Karena Pada masa itu, Brunei dengan Cina telah melakukan perniagaan yang besar. Barang-barang yang menjadi komoditi perniagaan tersebut adalah tembikar, kerang-kerangan, perak, emas, kain sutera, kain kasa, dan kias. Barang-barang itu ditukar kepada pedagang asing dengan barang tempatan seperti kapur barus, tanduk rusa, gelang yang dibuat dari gading gajah, kulit penyu dan kura-kura, sarang burung walet, wangi-wangian dan rempah-rempah. Hal tersebut bahkan tercatat dalam catatan perjalanan Marcopolo yang menyatakan bahwa hubungan perniagaan antara Cina dan Puni (Brunei) berjalan dengan baik.³⁷

Setelah Islam resmi menjadi dasar kerajaan, perkembangannya bertambah pesat, terutama setelah kedatangan Sharif Ali³⁸ yang merupakan pedagang muda dari Arab dan menikah dengan Putri Ratna Kesuma, yang merupakan puteri Sultan Ahmad. Maka setelah Sultan Ahmad wafat dan melalui keputusan dewan pembesar Brunei mengangkat Sharif Ali menjadi Sultan (1425-1432).³⁹ Sultan Sharif Ali, merupakan orang yang sangat rajin beribadah dan memiliki banyak keistimewaan yang sangat berkah, oleh karena itu dikenal sebagai “*Sultan Berkah*”.⁴⁰ Sultan juga yang awal mula mendirikan masjid, mengatur dan menguatkan pertahanan Negara dengan mengerahkan rakyat untuk ikut berperan. Sultan mengamalkan corak pemerintahan berasaskan Islam, yang menjadikan

¹Po-li yang berarti daerah yang makmur menurut bangsa Cina. Haji Awang Mohd. Jamil Al Sufri. *Tarsilah Brunei*, Jilid I, Pusat Sejarah Brunei, 1990. Hal . 6

³⁷*Ibid.* hal.7

³⁸ Sultan Sharif Ali merupakan sultan Brunei yang berasal dari Arab. *Ibid* hal.27

³⁹*Ibid.*

⁴⁰Julukan yang diberikan oleh rakyat Brunei pada masa itu karena saat pemerintahan Sharif Ali, rakyat Brunei merasa kehidupan mereka menjadi baik dan penuh berkah. *Ibid.* hal. 28

Brunei terkenal dan disegani. Walaupun Brunei-Cina pada waktu itu renggang, tapi perdagangan antar keduanya masih berjalan baik. Bahkan pada masa Sultan Sharif Ali, pelabuhan Brunei hanya dipenuhi oleh pedagang asing yang menyebabkan rakyat hidup aman dan sejahtera hingga makmur itu yang menyebabkan Brunei disebut “*Negara Darussalam*”.⁴¹

Setelah Sharif Ali wafat pada 1432, tahta digantikan oleh anaknya Sultan Sulaiman (1432-1485). Untuk meneruskan pemerintahan ayahnya, Sultan Sulaiman mengadakan kerja sama dengan orang Cina yang menjadi Pengiran Maharaja Lela yaitu Ong Sum Ping.⁴² Saat Sultan Sulaiman wafat tahun 1485 dan digantikan oleh Sultan Bolkiah (1485-1524) Brunei mulai berkembang menjadi suatu kerajaan yang maju. Akan tetapi hal itu tidak menjadikan Sultan berpuas diri dengan pencapaiannya. Maka Sultan Bolkiah memerintahkan *Wazir-wazir, Cheteria-Cheteria, dan Manteri-Manteri*⁴³ untuk memikirkan rancangan baru dalam penambahan kemajuan tersebut. Sultan sering ke luar negeri untuk mencari pengetahuan baru dan pengakuan untuk dasar pemerintahannya supaya dapat meningkatkan taraf hidup rakyat dan perkembangan kemajuan Negara. Oleh karena itu Sultan Bolkiah mendapat julukan “*Nakhoda Ragam*”. Dalam perluasan pemerintahan dan kekuasaannya Sultan Bolkiah banyak menundukan kerajaan-kerajaan lain dan menjadikannya wilayah kekuasaan Brunei. Salah satunya Sulu yang pada masa itu merupakan kerajaan Islam yang besar juga. Di sana Sultan Bolkiah meningkatkan perdagangan Brunei serta perkembangan syiar Islam.⁴⁴ Kebesaran dan kegagalan Brunei dalam zaman Sultan Bolkiah dianggap

“*Zaman Keemasan Empayar Brunei*”⁴⁵. Ini diakui oleh Antonio Pigafetta⁴⁶ yang ikut rombongan kapal *Ferdinand Magellan*⁴⁷ yang singgah di Brunei tahun 1521.

⁴¹Haji Awang Mohd. Jamil Al Sufri. *Liku-Liku Perjuangan Pencapaian Kemerdekaan Brunei Darussalam*, Pusat Sejarah Brunei, 1992. hal XLV

⁴²Pimpinan sarikat dagang Cina yang mendapatkan gelar dari sultan karena mau bekerjasama dalam perdagangan dengan Brunei. *Ibid.*

⁴³Dewan-dewan pejabat yang membantu sultan dalam pemerintahan, konsep seperti ini terdapat di seluruh kerajaan Islam melayu semanjung, seperti Malaka, Sulu, Kelantan, dan kerajaan lainnya.

⁴⁴*Ibid.* hal XLVI

⁴⁵Jaman dimana kerajaan Brunei mencapai puncak kejayaannya

Saat Sultan Bolkiah wafat tahun 1524, tahta Sultan Brunei digantikan oleh anaknya Sultan Abdul Kahar (1524-1530) yang terkenal dengan “*Marhum Keremat*”.⁴⁸ Kerajaan-kerajaan yang menjadi taklukan yang diwarisi ayahnya, bukan saja meliputi keseluruhan pulau Brunei (Borneo) bahkan hingga ke pulau-pulau Palawan, Sulu, Balayan, Mindora, Balabak, dan kepulauan-kepulauan di Filipina.⁴⁹ Perkembangan syiar Islam pada zaman Sultan Abdul Kahar, yang menjadikan Brunei terkenal sebagai pusat perkembangan Islam. Hal ini menimbulkan ramainya ulama-ulama Islam datang ke Brunei. Perkembangan pengajaran Islam di wilayah utara Pulau Brunei (Borneo) bukan hanya melalui sistem perkawinan tapi juga perdagangan⁵⁰.

Pada zaman Sultan Muhammad Hasan (1582-1598), Brunei mulai berkembang maju kembali. Bahkan setelah Spanyol yang mencoba menguasai Brunei. Banyaknya wilayah kekuasaan Brunei yang lepas akibat dari ekspansi Spanyol berhasil direbut kembali. Bahkan wilayahnya mulai bertambah yaitu meliputi Salundang, Cayagan yang harus memberi upeti kepada Brunei, juga wilayah pulau Calamianes juga menjadi daerah taklukan Brunei.⁵¹

Pada tahun 1658 Sultan Brunei menghadiahkan kawasan timur laut Kalimantan kepada Sultan Sulu di Filipina Selatan sebagai penghargaan terhadap Sultan Sulu dalam menyelesaikan perang saudara di antara Sultan Abdul Mubin dengan Pengeran Mohidin.⁵² Persengketaan dalam kerajaan Brunei merupakan satu faktor yang menyebabkan kejatuhan kerajaan tersebut, yang bersumber dari pergolakan dalam disebabkan perebutan kuasa antara ahli waris kerajaan, juga

⁴⁶Merupakan seorang penulis buku yang ikut dalam ekspedisi bangsa Spanyol ke kawasan Asia Tenggara. *Ibid* hal. XXIX

⁴⁷Kapal Spanyol yang mengadakan perjalanan ke kawasan Asia Tenggara dalam pencaharian rempah-rempah. *Ibid*.

⁴⁸Julukan Sultan Abdul Kahar yang memiliki makna pemilik mukzizat. Al Sufri (1990). *Op. cit.* hal. 40

⁴⁹*Ibid*.

⁵⁰*Ibid*. hal. 50

⁵¹Konsep penyebaran Islam di wilayah Asia Tenggara. Haji Hazair bin Haji Abdullah. "Politik, Pentadbiran dan Wawasan: Pelaksanaan dan Hala Tuju". Paper Seminar Sejarah Brunei Hari Kebangsaan, 2004. Hal. 9

⁵²Hal ini masih menjadi pertentangan, karena kalau dari sumber Brunei dijelaskan kalau Brunei menghadiahkan wilayah timur laut Kalimantan, sedangkan disumber Filipina Sulu berdiri sendiri dan tidak menjadi wilayah kekuasaan Brunei. *Ibid*. Hal. 15

disebabkan timbulnya pengaruh kuasa penjajah Eropa, yang merusak corak tradisi perdagangan, serta memusnahkan asas ekonomi Brunei.

II.2. Kolonialisme Inggris di Brunei

II.2.1 Awal Masuknya Inggris ke Brunei

Pada abad 18, kawasan Asia Tenggara mengalami masa kolonialisme. Apalagi menjelang awal abad 19 kekuasaan kolonialisme Barat telah masuk ke kawasan Asia khususnya Asia Tenggara. Dalam hal ini kawasan Asia Tenggara mengalami masa kolonialisme.⁵³ Contoh-contoh dari kolonialisme itu adalah, Indonesia yang dikuasai oleh Belanda, Indo-cina oleh Prancis, Filipina oleh Spanyol dan Amerika, Malaya dan Singapura dikuasai oleh Inggris.⁵⁴ Kawasan Malaya sudah dikuasai oleh Inggris menyebabkan Brunei mengalami kondisi yang berbahaya. Pengaruh Inggris di Brunei di mulai saat kedatangan James Brooke ke Kuching, Serawak, pada tahun 1839. Bahkan James Brooke melakukan perjanjian dengan Sultan Hashim Jailul Alam Aqamadin. Kekuasaan Brunei yang sebenarnya meliputi Serawak hingga Sabah. Akan tetapi, akibat dari perjanjian yang dilakukan oleh Sultan Hashim dengan James Brooke menyebabkan sebagian wilayah serawak diambil alih kekuasaannya pada tahun 1841. dan dalam tempo lima puluh tahun, James Brooke telah berhasil menguasai sedikit demi sedikit daerah-daerah Brunei yang ada di Serawak.⁵⁵ Kemudian pada tahun 1890, Brooke telah berhasil merampas Limbang dan menjadikan Brunei dua bagian. Tekanan yang terjadi terhadap kawasan timur laut Brunei telah mengakibatkan beberapa kawasan wilayah Brunei disewakan kepada *British North Borneo Company (BNBC)*, kawasan yang disewakan pada BNBC adalah Sabah.⁵⁶

Pada tahun 1888, demi mempertahankan kedaulatan Brunei, Sultan Hashim Jalilu Alam telah menandatangani perjanjian kekuasaan dengan Inggris. Perjanjian itu berisi tentang keinginan Sultan Hashim agar Brunei berada di

⁵³Jamil Al Sufri 1990. *Op.cit.* hal. 37

⁵⁴ Haji Awang Mohd. Jamil Al Sufri. *Liku-Liku Perjuangan Pencapaian Kemerdekaan Brunei Darussalam*, Pusat Sejarah Brunei, 1992. hal XLVI

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶*Ibid.* hal. XLVIII

bawah perlindungan Inggris untuk melindungi Brunei dari serangan pemberontak maupun ekspansi James Brooke. Setelah perjanjian tahun 1888, Sultan melakukan kembali perjanjian pada tahun 1905 dan 1906, yang berisi bahwa Sultan akan menerima pegawai Inggris yang akan dilantik menjadi Residen.⁵⁷ Residen bertugas untuk menjadi wakil atau duta kerajaan Inggris perjanjian itu ditandatangani pada 3 Desember 1905 dan 2 Januari 1906.⁵⁸ Perjanjian di tahun 1905 dan 1906 itu menjadikan Brunei berada di bawah sistem residen yang sudah terlaksana di wilayah Malaya. Walaupun pada dasarnya dari perjanjian itu, tugas Resident hanya menjadi penasihat Sultan, tapi dalam pelaksanaannya pemerintahan di lakukan oleh Inggris.⁵⁹

II.2.2 Sebab Kedatangan Inggris di Brunei

Kedatangan Inggris di Brunei disebabkan karena pengaruh kolonialisme yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Pada dasarnya pemerintahan kolonial Inggris tidak berminat untuk menguasai Brunei karena menurut mereka wilayah jajahan mereka sudah sangat banyak. Mereka menganggap bahwa wilayah Brunei itu hanyalah wilayah kecil yang tidak memiliki keuntungan bagi mereka. Jadi awal kedatangan Inggris di Brunei dilakukan oleh pihak swasta Inggris⁶⁰. Minat Inggris terhadap barat laut Borneo. Pada 1844, James Brooke berunding dengan Sultan Brunei tentang penyerahan pulau Labuan untuk digunakan oleh Inggris sebagai tempat menambang batu bara di samping menjadikannya pangkalan untuk memberantas kegiatan pemberontakan serta meningkatkan perdagangan.⁶¹

Pada 18 Desember 1846, satu perjanjian telah ditandatangani yang menyebabkan pulau Labuan dan pulau-pulau kecil yang berdekatan diserahkan oleh Sultan Brunei kepada pihak Inggris. Brooke telah menjadi Gubernur Labuan yang pertama dan Konsul Besar di Sabah. William Napier dilantik menjadi Wakil

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ A. V. M. Horton, "Colonial Office Correspondence Relating To Brunei 'Destroyed Under Statue' 1906-1934". *IJAPS* Vol. 1 (2005). hal. 6-9.

⁵⁹ *Ibid.* Hal. 15

⁶⁰ Nicholas Tarling. "Britain, the Brookes and Brunei". *Pacific Affairs*, Vol. 45, No. 3 (Autumn, 1972), hal. 460

⁶¹ Robert Payne. *The White Rajahs of Sarawak*, London: Weidenfield and Nicolson, 1960. Hal. 30

Gubernur, Hugh Low sebagai Bendahara Kolonial dan Spencer St. John sebagai Penasihat kepada Brooke.⁶² Akan tetapi Labuan tidak mampu berkembang seperti Singapura atau Pulau Pinang, seperti yang diharapkan oleh pengagasnya.

II.2.3 Kondisi Brunei Masa Pemerintahan Kolonial Inggris

Pada tahun 1890, Labuan telah diletakkan di bawah pemerintahan Inggris. Pada 1907, Labuan ditempatkan di bawah kerajaan Negeri-negeri Selat. Setelah Perang Dunia Kedua, Labuan menjadi bagian dari Brunei. Kemudian pada 16 April 1984, Labuan telah menjadi bagian dari Wilayah Persekutuan Malaysia.⁶³

Pada 1865, seorang konsul Amerika di Brunei, Claude Lee Moses telah menyewa Borneo Utara dari Sultan Brunei untuk waktu 10 tahun.⁶⁴ Kemudian menjualnya kepada Sarikat Perdagangan Amerika (*American Trading Company*) yang dimiliki oleh J.W.Torrey, T.B. Harris dan beberapa orang pedagang Cina.⁶⁵ Torrey memilih Kimanis, satu kawasan di barat daya Borneo Utara sebagai pangkalannya dan mulai melakukan pelatihan kemampuan yang lokasinya dinamakan “*Ellena*”.⁶⁶ Usaha mencari bantuan keuangan untuk membiayai pembangunan penempatan tersebut gagal lalu ditinggalkan. Pada akhir masa sewa wilayah tersebut, Torrey berhasil menjual haknya kepada konsul Austria di Hong Kong yaitu Baron Von Overbeck.⁶⁷ Overbeck untuk 10 tahun dari Tumenggong Brunei. Selain itu, Overbeck berhasil mendapatkan bantuan kewenangan dari Dent bersaudara (*Dent brothers - Alfred and Edward*)⁶⁸ bagi menampung perbelanjaan rancangan yang dirancang untuk Brunei. Mereka bersama Count Montgelas, dari Kedutaan Austro-Hungariandi London dan A.B. Mitford, seorang ahli politik kemudian telah memberi hak-hak mereka kepada Alfred Dent.⁶⁹

⁶²*Ibid.* hal. 35

⁶³Menjadi wilayah persekutuan akibat dari perjanjian antara sultan Brunei dengan pihak James Brooke. *Ibid.* hal. 45

⁶⁴Nicholas Tarling. *Op.cit.* hal. 460

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶Nama samaran lokasi pelatihan. *Ibid.* hal. 461

⁶⁷Turnbull, C. Mary. *A History of Malaysia, Singapore, and Brunei.* Sydney: Allen and Unwin, 1989. Hal . 165.

⁶⁸*Ibid.* hal. 166.

⁶⁹Payne . *Op.cit.* hal. 59

Pada 1888, Brunei telah menjadi negeri jajahan Inggris di mana kerajaan Inggris akan melindungi Brunei di bawah pengaruh Inggris. Inggris telah memberi banyak pembangunan di kawasan ini. Brunei diperintah melalui satu sistem secara *hairaki* (tidak langsung). Pada awal kekuasaannya berjalan dengan aman, namun begitu terdapat beberapa pemberontakan kecil. Pemberontakan yang serius adalah Perang Mat Salleh dari tahun 1894-1900 diikuti oleh pemberontakan Rundum yang dilakukan oleh suku Murut dalam tahun 1915.⁷⁰

Pada masa Brunei di bawah kendali kerajaan Inggris pada tahun 1888, memunculkan banyak perubahan di Brunei. Walaupun perubahan yang dilakukan Inggris tidak langsung tapi bertahap. Perubahan yang paling terasa adalah berkurangnya kekuasaan sultan akibat dari perjanjian bahwa Brunei menjadi wilayah Resident. Selain itu muncul kebijakan tentang sekularisme. Sekularisme mulai muncul saat Brunei berada pada sistem resident tahun 1905 dan 1906, pengaruh sekularisme dibawa oleh para pejabat Inggris melalui sistem pemerintahan ala Barat yang diajarkan kepada pejabat-pejabat Kerajaan dan para murid-murid sekolah. Dalam pengaruh sekularisme menyatakan bahwa ajaran agama harus dipisahkan dari pemerintahan, yang pada dasarnya pemerintahan Brunei itu berdasar pada ajaran agama dan hukum agama.⁷¹

II.3 Pendudukan Jepang di Brunei (1941—1945)

Pada masa perang dunia ke dua, Jepang mengadakan ekspansi ke wilayah selatan. Wilayah yang mulai di ekspansi oleh Jepang adalah wilayah Asia Tenggara. Hampir seluruh wilayah Asia Tenggara di kuasai Jepang. Jepang melakukan ekspansi ke Asia Tenggara dalam rangka perluasan kekuasaan wilayah serta menunjukkan kekuatan Jepang kepada bangsa Eropa. Wilayah Asia Tenggara yang dikuasai Jepang meliputi, Semenanjung Malaya, Indonesia dan Borneo Utara. Wilayah Brunei merupakan wilayah yang terdapat di Borneo Utara. Jepang pertama kali datang ke Brunei pada tahun 1941. Jepang masuk ke Brunei di

⁷⁰*Ibid.* hal. 65

⁷¹Haji Awang Mohd. Jamil Al Sufri. Tarsilah Brunei, Jilid I, Pusat Sejarah Brunei, 1990. hal 35.

wilayah Kuala Belait pada tanggal 16 Desember 1941.⁷²Jepang masuk ke Brunei dengan kekuatan sekitar 10,000 tentara.⁷³Jepang mulai menguasai Brunei secara menyeluruh setelah berhasil menduduki Bandar Sri Begawan yang merupakan pusat pemerintahan Brunei pada 22 Desember 1941.⁷⁴Kedatangan Jepang ke Brunei disambut oleh rakyat karena beranggapan bahwa Jepang membebaskan rakyat dari jajahan kolonial Inggris⁷⁵, hal ini juga terjadi di wilayah Semenanjung Melayu dan Indonesia.

Jepang menguasai Brunei selama tiga setengah tahun. Dalam masa penjajahan Jepang di Brunei, rakyat merasakan penderitaan yang berat akibat dari kurangnya bahan makanan yang layak dimakan serta pakaian yang menyebabkan banyak rakyat yang menderita berbagai penyakit mulai dari kekurangan gizi hingga penyakit kulit yang parah. Hal ini berbanding terbalik dengan yang dirasakan oleh pihak Jepang. Jepang setelah berhasil menguasai Borneo Utara yang melingkupi Sarawak, Brunei, Sabah mulai mengadakan langkah-langkah untuk menjaga kekuasaan mereka. Dimulai dari pendirian industri minyak di Kilang Minyak Seria yang berlokasi di Brunei, memiliki tujuan untuk sumber dana perang, pertahanan serta pembentukan konsep kerjasama *Great East Asia Co-Prosperity Sphere* yang berada di bawah *hegemoni* kepemimpinan Jepang.⁷⁶Dari kilang minyak ini, Jepang mendapatkan minyak mentah sebanyak 1,594,000 ton selama masa penjajahannya di Brunei.⁷⁷Dari hasil ini, Jepang dapat menutupi biaya pengeluaran untuk perang yang mereka lakukan.⁷⁸

Meskipun rakyat menderita pada masa penjajahan Jepang, ada juga sisi positifnya. Akibat dari penjajahan Jepang menimbulkan rasa nasionalisme orang Melayu di Brunei. Pada saat dijajah selama tiga setengah tahun telah meningkatkan kesadaran dan perasaan anti kolonial yang akhirnya membawa

⁷² C. Mary Turnbull, *A History of Malaysia, Singapore, and Brunei*. Sydney: Allen and Unwin, 1989. Hal. 220.

⁷³ Haji Zaini bin Haji Ahmad, *Pertumbuhan Nasionalisme Di Brunei (1939-1962)*. Brunei: Asia Printers, 2004. Hal. 2

⁷⁴ *Ibid.* hal. 3

⁷⁵ *Ibid.* hal. 4

⁷⁶ Pembentukan konsep agar muncul kepercayaan pada pihak Jepang. *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.* hal 5

⁷⁸ Haji Awang Mohd. Jamil Al Sufri, *The Survival of Brunei: A Historical Perspective*. Bandar Sri Begawan: Pusat Sejarah Brunei, 2002. Hal. 3

pada keinginan rakyat untuk merasakan kemerdekaan dari penjajah.⁷⁹ Inilah yang menjadi salah satu era yang sangat penting dalam perkembangan politik orang Melayu. Sebelumnya kesadaran rakyat Brunei pada umumnya tidak terlalu peduli pada nasibnya dan hanya sebgaaian kaum elit saja yang peduli. Akibat dari penjajahan Jepang rakyat merasa mereka harus dapat menentukan nasibnya sendiri.⁸⁰

Di bawah semboyan “*Great East Asia Co-Prosperity Sphere*”, proses penyebaran budaya Jepang mulai dilancarkan. Seperti memberi beasiswa kepada pemuda Brunei untuk memperoleh pendidikan di luar negeri.

Jepang menandatangani perjanjian dengan Sultan Ahmad Tajuddin mengenai pemerintahan Brunei. Inche Ibrahim (Datu Perdana Menteri Dato Laila Utama Haji Awang Ibrahim) yang merupakan Sekretaris Residen Inggris pada saat sebelum perang, lalu ditunjuk sebagai *Chief Officer Administration* atau Sekretaris Negara bertindak di bawah Gubernur oleh pihak Jepang.⁸¹

Selama pemerintahan Jepang, Jepang mengorganisasi pemerintahan Brunei. Brunei menjadi salah satu dari lima distrik Jepang di North Borneo atau Kalimantan Utara. Distrik Brunei termasuk Baram, Labuan, Lawas dan Limbang yang semuanya bekas wilayah Brunei.⁸² Ini adalah rencana pembentukan kesatuan wilayah yang banyak terbagi agar dapat membentuk negara Brunei.

Jepang terus menguasai wilayah pesisir pantai dan pemukiman disekitar sungai. Komando prajurit Angkatan Darat ke-37 juga mengirim patroli hingga wilayah pedalaman, hal ini untuk mengetahui kondisi rakyat Brunei saat Jepang menduduki wilayahnya.⁸³

Sejumlah pemuda Brunei dilatih di Jepang termasuk Pengiran Yusuf. Dalam hal militer maupun pendidikan, hal ini dilakukan Jepang dalam rangka

⁷⁹*Ibid.* hal. 5

⁸⁰*Ibid.* hal. 7

⁸¹A. V. M. Horton “*British Administration in Brunei 1906-1959*”. *Modern Asian Studies*, Vol. 20, No. 2 (1986). Hal. 365

⁸²*Ibid.*

⁸³*Ibid.* hal. 367

menarik simpati rakyat agar dapat membantu Jepang dalam perang pasifik. Konsep menarik simpati rakyat yang dilakukan Jepang di Brunei sama seperti propaganda yang dilakukan di wilayah Asia Tenggara. Bahkan Pengiran Yusuf mendapatkan undangan untuk belajar di Hiroshima.⁸⁴ Di sana Pangiran Yusuf belajar tentang konsep pemerintahan Jepang seperti politik, ekonomi, budaya masyarakat Jepang. Pangiran juga mendapatkan pelatihan militer dari Jepang. Pengiran Yusuf belajar di Hiroshima sampai terjadinya pemboman oleh pihak Amerika pada 6 Agustus 1945. Pengiran selamat dari pemboman yang hampir meluluhlantahkan kota Hiroshima, akhirnya pengiran kembali ke Brunei dan dalam partisipasinya menjadi Sekretaris Menteri Negara dan Kepala Brunei.⁸⁵ Selain ke Jepang ada tokoh muda yang mendapatkan pendidikan di luar negeri. Tokoh tersebut dikirim oleh Jepang ke Indonesia, tokoh tersebut adalah A. M. Azahari. Azahari belajar di Institut Pertanian Bogor. Di Indonesia, Azahari banyak belajar tentang politik Indonesia.⁸⁶

Jepang mencoba untuk membangkitkan sentimen anti-Eropa di kalangan mahasiswa dan masyarakat di Brunei. Bahasa Jepang diajarkan di sekolah-sekolah dan pejabat pemerintah diminta untuk belajar bahasa Jepang di kelas malam. Serta pelarangan penggunaan bahasa Inggris dan penggunaan bahasa Melayu diperbolehkan oleh Jepang.⁸⁷

Tidak banyak pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Jepang selama Perang Dunia II kecuali pembangunan bandara udara pertama di Brunei. Ini dibangun pada masa pendudukan Jepang.⁸⁸ Setelah Perang Dunia II kondisi bandara udara tersebut rusak, akan tetapi setelah kedatangan Inggris ke Brunei bandara diperbaiki sehingga layak untuk dipergunakan.⁸⁹

Horton menjelaskan tentang penjajahan Jepang, walaupun Jepang "tidak terlalu banyak dibenci" oleh orang-orang Brunei. Mereka itu juga dianggap "sangat

⁸⁴ Haji Zaini. *Op.cit.* hal. 5

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.* hal. 6

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Jessy, Joginder Singh. *History of South-East Asia (1824-1965)*. Kedah: Penerbitan Darulaman, 1985. Hal. 315

⁸⁹ *Ibid.* hal. 317

berbahaya jika salah satu tidak mengikuti keinginan mereka". Jepang dipandang sebagai orang yang berwatak "keras" dan "mengusir pekerja keras", "baik akan tetapi disiplin" dan 'tidak menganiaya perempuan '. Selama tahap awal pendudukan itu, Jepang tidak mengeksekusi siapa pun tapi mereka sangat ditakuti.⁹⁰

Pada tahun 1943, Sekutu mulai menyerang banyak kapal militer Jepang di Brunei sehingga perdagangan yang melalui laut berhenti. Saat Sekutu maju, Jepang kabur ke wilayah Teluk Brunei dan Labuan yang merupakan pangkalan angkatan laut. Pada tanggal 10 Juni 1945, Australia mendarat di Muara bawah dan melaksanakan Operasi Oboe untuk merebut kembali Brunei. Mereka didukung oleh angkatan udara Amerika dan unit angkatan lautnya. Brunei berhasil direbut dalam tiga hari, penyerangan yang dilakukan sekutu menyebabkan banyak infrastruktur di Brunei rusak dan hancur, dari mulai gedung-gedung, pelabuhan, bandara, pertambangan, hingga masjid juga rusak.⁹¹

Pada 15 Juli 1946, Brunei berada di bawah jajahan Inggris karena BNBC tidak mampu memperbaiki kerusakan Borneo Utara selepas Perang Dunia Kedua. Kerusakan yang terjadi di bandara Sandakan telah menyebabkan Jesselton dipilih sebagai Pemimpin negeri selepas era Perang Dunia Kedua.⁹² Sistem pemerintahan penjajahan selepas perang adalah sama dengan sistem pemerintahan pada era BNBC. Pembinaan semula dan pembangunan negeri Borneo Utara menjadi fokus utama para penguasa.

Bahkan setelah perang pasifik berakhir, pada awal tahun 1946, Brunei berada di bawah kekuasaan *British military Administration* (BMA). BMA mendapatkan semua kekuasaan setelah James Brooke dan BNBC memberikan kekuasaan mereka sepenuhnya kepada kerajaan Inggris lalu pihak Kerajaan menyerahkan kekuasaan kepada BMA.⁹³ Kebijakan yang diterapkan BMA sangatlah merugikan bagi pemerintah dan rakyat Brunei. Itu dikarenakan pejabat-

⁹⁰Horton. *Loc. cit.* Hal. 370

⁹¹*Ibid.* hal. 371

⁹² Ranjit. D. SSingh. "British Proposals for A Dominion of Southeast Asia 1943-1957". JMBRAS, Vol. 71 Part 1, no. 274 (Juni 1998). Hal.31

⁹³Haji Awang Mohd. Jamil Al Sufri. Tarsilah Brunei, Pusat Sejarah Brunei, 1990, hal. 6

pejabat yang mengisi pemerintahan kebanyakan adalah orang Inggris dan orang India yang dibawa dari wilayah Myanmar, sedangkan untuk orang Brunei sendiri sangat sedikit dan itu pula hanyalah sebagai stafnya saja.⁹⁴ Selain itu, bahasa yang wajib digunakan dalam pemerintahan adalah bahasa Inggris, hal tersebut sangat merugikan orang Brunei karena banyak yang tidak bisa berbahasa Inggris. BMA menjalankan sikap yang sangat diskriminatif terhadap orang Brunei. Banyak dari rakyat Brunei yang sangat sulit dalam menggunakan fasilitas umum dan banyak hak-hak orang Brunei yang dilanggar. Hal tersebut adalah pengibaran bendera Brunei di bawah bendera Inggris dan dalam penerimaan pendidikan orang Brunei merupakan kelas paling bawah.⁹⁵ Selain itu juga banyak dari orang Brunei yang belajar di luar negeri di asingkan karena dituduh bisa melakukan pemberontakan.

Awal munculnya kebencian itu saat pemerintah Inggris menerapkan konsep sekularisme yang pada dasarnya sangat bertentangan dengan dasar pemerintahan Brunei. Pemerintahan Brunei itu tidak dapat lepas dari aspek kehidupan dan selalu menggunakan konsep ajaran agama, terutama agama Islam yang merupakan agama yang mayoritas di Brunei. Tindakan Inggris yang menerapkan sekularisme menimbulkan rasa nasionalisme dari rakyat Brunei terutama para pemudanya.⁹⁶

⁹⁴*Ibid.* hal. 8

⁹⁵*Ibid.* hal. 9

⁹⁶Kebencian yang terjadi akibat dampak dari kebijakan yang diterapkan oleh BMA. Singh. *Loc.cit.* hal 39

BAB III

MUNCULNYA ORGANISASI PEMUDA DI BRUNEI DARUSSALAM

III.1 Nasionalisme Melayu Brunei

Dampak dari kebangkitan semangat nasionalisme di Brunei muncul akibat terpengaruh dengan sentimen nasionalisme yang melanda wilayah Asia Tenggara sehabis akhir Perang Dunia Kedua. Bagaimanapun, jika tercetus keadaan yang seperti ini di Brunei secara mendadak, hanya telah menimbulkan kegelisahan di pihak pegawai-pegawai Inggris karena kebangkitan semangat politik yang akan menjadi radikal.⁹⁷ Ini adalah karena sentimen nasionalis yang sedang membakar jiwa orang-orang Melayu, ketika itu banyak dipengaruhi oleh nasionalis Melayu yang berhaluan sosialis. Mungkin agak keterlaluan untuk mengatakan bahwa kebangkitan semangat nasionalisme di Brunei adalah pengaruh Soviet atau China untuk menyebarkan ideologi komunis.⁹⁸

Akan tetapi, perlu diingat bahwa Indochina, Indonesia dan orang-orang Cina di Singapura dan Malaya adalah kawasan-kawasan dan etnik yang dikenal sebagai kekuatan komunis di Asia Tenggara⁹⁹. Apalagi, karena ideologi dan prinsip yang digunakan oleh sosialisme dan komunisme, seperti perjuangan dan revolusi, sangat menarik bagi kalangan kelas bawahan yang haus akan kebebasan serta mendasari berdirinya Nasionalisme di Brunei¹⁰⁰. Keinginan untuk merasa bebas itulah, yang menjadikan mereka mulai sadar untuk membentuk suatu gerakan maupun organisasi yang dapat mengaspirasikan keinginan mereka.

Dasar nasionalisme itu yang menjadikan orang-orang muda intelektual di Brunei untuk membentuk organisasi perjuangan, yang bertujuan agar kolonialisme

⁹⁷Haji Zaini bin Haji Ahmad. *Pertumbuhan Nasionalisme Di Brunei (1939-1962)*. Brunei: Asia Printers, 2004. Hal. 6

⁹⁸Fujiro Hara. "The North Kalimantan Communist Party and The People's Republic of China". *The Developing Economies*, XLIII-4 (December 2005). Hal 460

⁹⁹*Ibid.* hal. 461

¹⁰⁰*Ibid.* hal. 462

yang terjadi di Brunei segera pergi, serta akan membentuk suatu pandangan baru pada masyarakat agar juga dapat turut serta untuk memperjuangkan kemerdekaan Brunei Darussalam.¹⁰¹ Kaum muda intelektual mulai membangun kekuatan penting dalam perjalanan pergerakan pemuda yang terjadi di Brunei melalui organisasi mereka.¹⁰²

III.2 Barisan Pemuda Brunei (BARIP)

III.2.1 Awal Berdirinya Barisan Pemuda Brunei (BARIP)

Rasa nasionalis mulai tumbuh pada rakyat Brunei pada tahun 1946, terutama pada kaum intelektualnya. Muncul keinginan dari para nasionalis dan kaum intelektual untuk mendirikan organisasi masa yang bertujuan sebagai wadah untuk menyalurkan paham nasionalisme yang pada masa itu sedang berkembang pesat. Orang-orang yang mendirikan organisasi pemuda merupakan para pemuda yang belajar di *Maktab Perguruan Sultan Idris* (MPSI).¹⁰³ MPSI merupakan perguruan tinggi yang melahirkan para pemimpin dan tokoh intelektual di wilayah Melayu. MPSI juga berperan sebagai tempat pelatihan guru-guru yang saling bertukar corak kebudayaan dan politik di wilayah Melayu. MPSI telah memulai menjadi “*a training ground for political mobilization.*”¹⁰⁴ Para pelajarnya selalu mengambil tentang masalah sosio-politik bangsa Melayu. Di sekolah inilah calon-calon guru dari seluruh Tanah Melayu dan Kalimantan Utara (termasuk Brunei) mulai mengenal isu-isu sosial dan politik yang sedang dihadapi oleh bangsa Melayu¹⁰⁵. Saat guru-guru itu kembali ke daerah atau negaranya masing-masing, bersama-sama mereka membawa perasaan percaya kepada diri sendiri dan ingin mengerti ide-ide baru mengenai masalah sosial dan politik. Mengenai permasalahan ini W.R. Roff menulis,

¹⁰¹Haji Awang Mohd. Jamil Al Sufri. *The Survival of Brunei: A Historical Perspective*. Bandar Sri Begawan: Pusat Sejarah Brunei, 2002. Hal. 8

¹⁰²*Ibid.* hal. 10

¹⁰³Perguruan Tinggi yang lulusannya banyak berpengaruh dalam perkembangan nasionalisme negaranya

¹⁰⁴Merupakan semboyan untuk para pelajar di MPSI yang bertujuan menjadi yang terdepan dalam mobilisasi politik. Zaini (2004). *Op. Cit.* hal. 5

¹⁰⁵*Ibid.*

“Successive generations of MPSI students were acutely aware and accelerating social and political change and its attendant problem for the Malays”.¹⁰⁶

Dalam terjemahan bebasnya menyatakan bahwa:

“Keberhasilan dari generasi pelajar MPSI muncul dari kesadaran mereka, pergerakan sosial dan perubahan politik, yang menyertai perubahan politik untuk Melayu.”

Brunei mulai mengirim para guru untuk belajar ke MPSI pada tahun 1930. Pada tiap tahun dua sampai tiga orang masuk ke MPSI hingga tahun 1958. Guru pertama yang belajar di MPSI adalah Awang Marshal bin Awang Maun dan Dato Paduka Awang Basir bin Awang Mohd. Taha. Guru-guru lain yang lulus dari MPSI adalah Awang Muhammad bin Haji Mangol, P.M. Yusuf, Pengiran Ali bin Pengiran Haji Mohd. Daud, Awang Othman bin Bidin, Awang Ali bin Awang Tamin, Awang Mohd. Jamil bin Awang Umar, dan Awang Mohd. Salleh bin Haji Awang Masri yang lebih terkenal dengan nama H.M. Salleh yang merupakan salah satu pendiri BARIP. Mereka semua inilah yang ikut dalam pergerakan politik yang terjadi di Brunei pada awal 1950-an¹⁰⁷.

Pada akhir 1930-an, *Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei* (PGGMB) mulai dibentuk. Tujuan utama dari pembentukan PGGMB adalah untuk membela dan memperbaiki nasib para kaum guru di Brunei. PGGMB juga menjadi arena pelatihan guru-guru di Brunei dalam hal *leadership*.¹⁰⁸ PGGMB melakukan beberapa proyek sosio-kultural yang menitik beratkan pada kepemimpinan di bidang pendidikan yang akhirnya melahirkan bibit-bibit pemimpin Melayu yang banyak berjasa terhadap pemerintahan Brunei. Hampir semua budayawan dan sejarawan di Brunei merupakan alumnus dari PGGMB yang menginginkan perbaikan dalam bidang pendidikan di Brunei. Mereka memperjuangkan khasanah kebudayaan, sejarah serta kesusastraan Melayu Brunei¹⁰⁹.

¹⁰⁶ *Ibid.* hal. 6

¹⁰⁷ Ranjit Sing D. S. . *Brunei 1839-1983: The Problem of Political Survival*. Singapore: Oxford Univ. Press, 1984. Hal. 23

¹⁰⁸ Leadership adalah makna dari kepemimpinan, dalam hal ini para guru juga harus memiliki jiwa kepemimpinan agar mereka dapat mengajarkan nasionalisme pada muridnya nanti.

¹⁰⁹ Haji Awang Mohd. Jamil Al Sufri. *Liku-Liku Perjuangan Pencapaian Kemerdekaan Brunei* Darussalam, Pusat Sejarah Brunei, 1992. Hal. 6

Para guru lulusan MPSI dan para ahli PGGMB juga merupakan perintis dari pendirian *Barisan Pemuda* (BARIP) yang merupakan sebuah organisasi kaum nasionalis yang pertama muncul di Brunei untuk mengembangkan para kaum intelektual demi tujuan kemerdekaan Brunei. Walaupun pada dasarnya BARIP bukanlah sebuah partai politik, namun Sultan Ahmad Tajaluddin Akhazul Khairi Waddin mengakui bahwa BARIP itu “*was agitating for youth of the country to be given post in the Government service*”.¹¹⁰ BARIP berdiri pada akhir tahun 1946, BARIP bertindak selaku forum kaum nasionalis untuk menyuarakan ide tentang kemerdekaan Brunei. Dalam waktu singkat BARIP sudah membentuk barisan rakyat di tiap-tiap daerah di wilayah Brunei. Bahkan BARIP memiliki cabang-cabang di Labuan, Jesselton, dan Papar yang berada di wilayah Sabah¹¹¹. Pada masa jayanya BARIP pernah mengklaim bahwa memiliki anggota dan partisipasi hampir 15,000 orang¹¹². Walaupun angka ini masih sulit untuk di percayai, tetapi dalam tahun 1947 saja BARIP cabang Jesselton mempunyai pengikut sampai 1,043 anggota¹¹³. Dewan Pimpinan Tertinggi BARIP sendiri terdiri dari 36 orang¹¹⁴. Di antara pemimpin BARIP yang penting ialah H.M. Salleh, P.M. Yusuf, Awang Mohd. Jamil bin Awang Umar, Awang Abdullah bin Awang Jaafar, Awang Zainal Abidin bin Putih, Pengiran Hidup bin Pengiran Hashim, Jassin Affandi dan Awang Hidup bin Haji Awang Besar yang terkenal dengan nama H.B. Hidup. Pemimpin BARIP yang pertama adalah Awang Abdullah bin Awang Jaafar yang memegang jabatan hanya selama lima bulan dan digantikan oleh H.M. Salleh.

Lahirnya BARIP yang disahkan oleh kerajaan Brunei telah menjadi suatu tolak ukur keberhasilan tokoh-tokoh nasionalisme. Seperti yang ditulis oleh Mattasim bin Haji Jibah, dalam tesisnya yang menyebutkan:

“Dikalangan beberapa pemuda Melayu yang cerdas, mereka memiliki hasrat yang besar untuk membentuk partai (politik) untuk memerdekakan Brunei seperti yang terjadi dimana arus nasionalisme yang berkobar disetiap pelosok Nusantara. Tetapi kami tidak dapat (membentuk

¹¹⁰ Arti bebasnya bahwa BARIP telah berhasil menghasut para pemuda untuk memberi ide dalam pelaksanaan pemerintahan. *Ibid.* hal. 7

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.* hal 9

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ *Ibid.* hal 11

partai) di Brunei karena kerajaan berada di bawah pemerintahan Militer Inggris. Jadi kami mencoba cara lain dengan membentuk BARIP yang bertujuan bagi kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat Melayu. Tujuan utama BARIP yang sebenarnya adalah politik (untuk memperoleh kemerdekaan Brunei)”¹¹⁵.

III.2.2 Perjuangan BARIP dan Dampaknya

BARIP yang merupakan organisasi pemuda yang berasas nasionalis mengadakan perjuangan untuk menjalankan visi dan misi mereka yang menginginkan kemerdekaan Brunei. Dapat dilihat dari perjuangan yang dilakukan oleh BARIP yang pertama adalah menjadi forum untuk pemuda-pemuda dan kaum nasionalis yang menyuarakan kegelisahan maupun tuntutan mereka mengenai isu-isu yang berkembang di Brunei pada masa itu. Kedua, untuk menyatukan rakyat demi persatuan dan kesatuan Brunei. Ketiga, bertindak sebagai kumpulan orang Melayu yang menginginkan perubahan dan kemajuan di bidang sosio-budaya. Keempat, sebagai pelindung kepentingan orang Melayu Brunei¹¹⁶. Sebagai sebuah organisasi pemuda yang lahir pada saat negara-negara Asia, khususnya Asia Tenggara berjuang keras untuk kebebasan dan kemerdekaan maka BARIP lebih sedikit terpengaruhi oleh pergolakan politik yang terjadi di Brunei seperti yang terjadi di Indonesia pada waktu itu¹¹⁷. Salah satu bukti nyata adalah penggunaan warna sangsaka merah putih sebagai benderanya¹¹⁸. Bahkan BARIP menjadikan semangat nasionalisme di Indonesia sebagai contoh untuk perjuangan rakyat di Brunei¹¹⁹.

Pengaruh nasionalisme Indonesia mulai menyerap ke masyarakat Brunei melalui siaran *Radio Republik Indonesia* (RRI) yang mulai sejak Agustus 1945¹²⁰. Saat itu Brunei belum memiliki stasiun radio sendiri sehingga bukan

¹¹⁵Sing. *Op. Cit.* hal. 33

¹¹⁶*Ibid.* hal. 35

¹¹⁷Karena pada saat itu di Indonesia sedang terjadi masa revolusi nasional, masa di mana terjadi perjuangan untuk memperahankan kemerdekaan. Bagi anggota BARIP, hal ini menjadi momentum di mana mereka juga harus memperjuangkan kemerdekaan Brunei. Haji Zaini bin Haji Ahmad. *Brunei ke Arah Kemerdekaan*. Selangor: Haji Zaini bin Haji Ahmad Press, 1984. Hal. 15

¹¹⁸Dalam bendera BARIP terdapat unsur warna merah-putih yang menggambarkan semangat perjuangan mereka bahwa anggota BARIP itu berani dan memiliki niat suci. Peter Poole. A. *Politic and Society in South East Asia*. Singapore: Mcfarland, 2009. Hal .21

¹¹⁹*Ibid.* hal. 25

¹²⁰Haji Zaini bin Haji Ahmad. *Pertumbuhan Nasionalisme Di Brunei (1939-1962)*. Brunei: Asia Printers, 2004. Hal. 8

menjadi perkara yang sulit banyak masyarakat yang mendengarkan siaran *Radio Singapura* maupun RRI¹²¹. Berita-berita revolusi yang disiarkan oleh RRI dan di dengarkan oleh rakyat Brunei membuka mata mereka untuk membebaskan diri dari penjajahan. Dapat dikatakan bahwa nasionalisme yang di dapat oleh guru-guru yang belajar di MPSI dan media masa seperti ini membawa rakyat Brunei ke dalam arus perjuangan rakyat untuk menentang penjajahan. Selain dari pengaruh radio, pengaruh media massa juga berperan pada sikap dan pendirian rakyat Brunei tentang kesadaran berpolitik. Bahan-bahan bacaan yang datang dari Singapura, Semenanjung Melayu maupun Indonesia diperoleh di perpustakaan Jabatan Penerangan Negeri. Majalah-majalah seperti *Kechana*, *Hiburan*, *Waktu*, dan *Hikmat* yang banyak memuat berita dan rencana revolusi di Indonesia di jual di beberapa pedagang buku di Brunei¹²². Dampak dari pengaruh media ini banyak membantu menumbuhkan rasa nasionalisme di Brunei.

Keinginan dan cita-cita untuk mengembangkan surat kabar dan kesusasteraan bukanlah halasing bagi kalangan nasionalis Brunei. Melanjutkan perkembangan media surat kabar banyak rancangan dan rencana politik ditulis sebagai penyebaran cita-cita dan ideologi kaum nasionalis pada saat itu. Pemimpin BARIP seperti P.M. Yusuf dan H.M. Salleh pernah menggunakan surat kabar untuk menyampaikan ide mereka. Surat kabar *Melayu Raya* dan majalah mingguan *Kechana* dan *Hiburan* juga pernah menjadi perantara penulis-penulis untuk menyampaikan pendapat dan buah pikir mereka dalam bentuk rencana, cerpen, maupun sajak¹²³. P.M. Yusuf misalnya pernah menulis sajak berjudul "*Merdeka*"¹²⁴. Sajak itu menggambarkan cerminan kehebatan perasaan kaum elit di Brunei terhadap isu kemerdekaan. Penulis-penulis seperti Mata Perabu, Adi Kelana, Bhema, dan Adang Maitu adalah diantara penulis yang pernah menulis rencana dan kritikan di dalam majalah *Hiburan*, *Kechana*, dan *Melayu Raya*. Mereka ini adalah kalangan guru. Hasil tulisan mereka sangat tajam dan dicurigai oleh pihak Inggris. Tulisan-tulisan mereka yang sangat bersemangat dan dicurigai

¹²¹ *Ibid.*

¹²² *Ibid.* hal. 9

¹²³ Muhammad Abdul Latif, *Sejarah Kesusasteraan Melayu Brunei*. Brunei: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1980. Hal. 28

¹²⁴ *Ibid.*

antara lain *Sekarang* karya Awang Ibrahim bin Mohd. Said atau di kenal Adi Kelana dan *Gembira* karya Norilham.¹²⁵

Dalam pergerakan perjuangan rakyat menuju arah kemerdekaan Brunei, kaum wanita juga tidak ketinggalan perannya. Jika kaum laki-laki bergabung dan mendirikan *Barisan Pemuda Brunei* (BARIP), maka kaum wanita membentuk *Kesatuan Kaum Ibu Melayu Pelita Brunei* (KKIMPB) yang dipimpin oleh seorang wanita keturunan Indonesia yakni Dayang Rodatan nasrah Udana Leila. KKIMPB berjuang bersama BARIP untuk bergerak memperbaiki nasib bangsa dan tanah air mereka yang sedang dijajah.

KKIMPB lebih banyak bergerak di bidang sosial, terutama di bidang kebudayaan dan pendidikan. Pengiriman guru perempuan Melayu pertama di Brunei ke *Maktab Perguruan Melayu Durian Daun*¹²⁶ di Melaka pada tahun 1948 merupakan hasil dari perjuangan KKIMPB. Sangat menarik mengenai riwayat persatuan ini adalah keterlibatan istri-istri orang kenamaan yang berpengaruh di pemerintahan dalam struktur pimpinannya, seperti istri Pengiran Pemancha Pengiran Haji Muhammad Yassin dan istri Pengiran Kerma Indera Pengiran Muhammad¹²⁷. Istri-istri orang kenamaan lainnya antara lain Pengiran Intan, Dayang Miri dan Dayang Masnah binti Abdullah¹²⁸. Dayang Masnah binti Abdullah adalah Setiausaha Kesatuan Kaum Ibu Melayu Pelita Brunei. Dia dibantu oleh Dayang Aiah binti Awang Abdul Rahman, seorang wanita keturunan bangsawan di Brunei.¹²⁹

¹²⁵*Ibid.* hal. 29

¹²⁶Maktab Perguruan Melayu Durian Daun merupakan sekolah guru khusus perempuan yang berada di Melaka yang seluruh mahasiswa maupun pengajarnya adalah perempuan. Zaini (2004). *Op. cit.* hal. 9

¹²⁷Pengiran Pemancha merupakan kerabat Sultan yang memiliki jabatan penting dipemerintahan. Biasanya jabatan ini di berikan sultan kepada saudara sepupu sultan dan bertugas dalam pengendalian kondisi masarakat di Brunei. *Ibid.*

¹²⁸Dayang Masnah binti Abdullah merupakan istri dari Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Syahbandar Haji Awang Mohd. Salleh bin Awang Haji Masri (atau yang dikenal sebagai H.M. Salleh pemimpin Barisan Pemuda Brunei). *Ibid*

¹²⁹Dayang Asiah binti Awang Abdul Rahman adalah kakak Jassin Affandi yang merupakan Setiausaha Agung Partai Rakyat Brunei. *Ibid.*

III.2.3 Masa-Masa Akhir BARIP

Masa BARIP mulai berakhir menjelang awal tahun 1950-an. Ini menimbulkan keadaan yang gersang dalam perpolitikan di Brunei¹³⁰, karena tidak ada lagi pergerakan rakyat yang menyambung jejak yang telah dilakukan oleh BARIP pada saat itu. Pemimpin-pemimpin BARIP seperti H.M. Salleh, P.M. Yusuf, Yassin Affandi dan Awang Mohd. Jamil bin Awang Umar, telah menjauhi kancah perpolitikan dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka serta keluarganya. Atau dapat dikatakan pada waktu itu kaum intelektual tidak mampu berjuang akibat kemiskinan. Mereka tidak dapat mewarisi kekuatan politik yang dapat melahirkan kepercayaan kepada diri sendiri untuk memimpin rakyat.¹³¹

Meskipun mengalami masa yang sulit dalam pepolitikan masih ada beberapa organisasi pemuda yang berjuang untuk kemerdekaan Brunei dan bisa dikatakan dalam peribahasa “tak ada rotan akar pun jadi”¹³². Pertama adalah *Angkatan Pemuda Brunei* (APB) yang dipimpin oleh Haji Awang Hamid bin Awang Othman, juga dibantu oleh Awang Othman bin Awang Sungguh, Abdullah bin Awang Ali Hashim dan Pengiran Haji Damit bin Pengiran Sungguh. Mereka semua berjuang untuk menumbuhkan rasa nasionalisme rakyat di Brunei. Hal yang sama juga dilakukan oleh *Persatuan Murid-Murid Tua* (MUTU) yang dipimpin oleh Pengiran Anak Safiudin bin Pengiran Bendahara Pengiran Anak Haji Mohd. Yassin. MUTU juga ikut berperan dalam menumbuhkan rasa nasionalisme di Brunei.¹³³

Berlatarbelakang tujuan yang sama dalam sosio-kulturalnya, APB dan MUTU sering melatih jiwa kepemimpinan para pemuda-pemuda Brunei. Secara tidak langsung, pemimpin-pemimpin seperti Pengiran Haji Damit dan Haji Awang Hamid merupakan hasil dari kepelatihan APB dan MUTU, dan biasanya

¹³⁰Yang dimaksud dengan gersang ialah dimana tidak adanya perlawanan terhadap pemerintah dan penjajah serta mulai kurangnya rasa nasionalisme akibat kemiskinan.

¹³¹Haji Awang Mohd. Jamil Al Sufri. 8 *Disember: Dalangnya Siapa?*. Bandar Sri Begawan: Pusat Sejarah Brunei, 2003. Hal. xxxiv

¹³² Penulis menggunakan peribahasa ini untuk menggambarkan kondisi bahwa tak ada BARIP organisasi yang kecil pun dapat melanjutkan perjuangan untuk kemerdekaan

¹³³*Ibid.*

pemimpin APB dan MUTU merupakan alumnus MPSI atau *Maktab Perguruan Batu Lintang* di daerah Kuching, Serawak.¹³⁴

Pergerakan ini merasakan bahwa rasa nasionalisme harus disebar dan perjuangan untuk kemerdekaan harus sesegera mungkin dilaksanakan. Kemerdekaan yang banyak terjadi di wilayah Asia Tenggara menjadikan para pemuda berusaha keras agar Brunei juga dapat merdeka.

III.3 Organisasi Perfilman *Brunei Film Production Company* (BRUFIPCO)

III.3.1. Lahirnya BRUFIPCO

Kemunculan organisasi masa mulai marak kembali pada tahun 1952-an, hal ini dilandasi dengan kemunculan *Brunei Film Production Company* (BRUFIPCO). BRUFIPCO dalam pergerakannya berbeda seperti yang dilakukan oleh BARIP yang berjuang dalam bidang sosio-kultural. BRUFIPCO lebih bergerak dalam bidang perfilman dalam perpolitikan Brunei. BRUFIPCO muncul dari ide yang dimunculkan oleh A.M. Azahari¹³⁵ yang berkeinginan untuk memprovokasi para pemuda untuk mau menentang pihak kolonial di Brunei. Azahari sendiri merupakan kaum muda nasionalis Brunei yang dikirim ke Indonesia untuk menuntut ilmu di Perguruan Tinggi bentukan Jepang pada tahun 1942. Semasa di Indonesia Azahari ikut serta dalam *Partai Pemuda Nasional Indonesia* (PPNI) yang aktif berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945-1946.¹³⁶ Selain itu Azahari juga memiliki hubungan dengan tokoh-tokoh komunis di Indonesia yang bergabung dalam *Partai Komunis Indonesia* (PKI) seperti D.N. Aidit, Tan Malaka dan Dr. Soebandrio yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri.¹³⁷ Ketiga tokoh tersebut sangat menyukai Azahari atas semangatnya untuk belajar politik. Pada tahun 1951

¹³⁴Haji Awang Mohd. Jamil Al Sufri. *Brunei Darussalam: The Road To Independence*. Bandar Sri Begawan: Pusat Sejarah Brunei, 1998. Hal. 10

¹³⁵ Bernama asli Sheikh Azahari bin Sheikh Mahmud yang merupakan anak dari Sheikh Mahmud bin Sheikh Abdul Hamid yang masih kerabat dari Sultan Brunei. Penulis menyingkatkan namanya menjadi Azahari agar memudahkan dalam penulisan.

¹³⁶*Ibid.* hal. 19

¹³⁷ Tidak banyak yang diketahui sejarah dari hubungan Azahari dengan ketiga tokoh ini, akan tetapi Azahari banyak belajar masalah nasionalisme dan sosialisme dari ketiga tokoh ini.

Azahari pulang ke Brunei setelah mengetahui kondisi Brunei yang mengalami masa-masa kemiskinan.

Setelah pulang dari Indonesia Azahari mengadakan acara pertemuan dengan para pengunjung yang datang ke rumah ayahnya di Kampung Padang.¹³⁸ Dalam pertemuan itu Azahari berpidato tentang keikutsertaannya dalam perjuangan melawan Belanda di Indonesia. Dia banyak menggambarkan kegigihan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaannya dan dia menginginkan hal itu terjadi juga di Brunei. Banyak dari masyarakat yang datang dalam pertemuan itu merupakan tokoh-tokoh intelektual Brunei yang mendirikan organisasi masa seperti BARIP, PGGMB, APB, MUTU. Tujuan Azahari mengadakan pertemuan itu adalah untuk meyakinkan kepada masyarakat dan tokoh-tokoh intelektual tentang keburukan dan kekejaman sistem pemerintahan penjajah. Azahari juga mengembangkan bahwa masyarakat Brunei harus memiliki rasa anti-penjajahan. Hal ini juga didasari terjadinya kesenjangan ekonomi antara orang Melayu dengan yang bukan Melayu serta ketidakadilan penjajah yang telah merampok kekayaan alam Brunei berupa minyak dan rakyat tidak mendapatkan apa-apa.

Setelah berhasil mendapat simpati masyarakat pada 28 Oktober 1952, Azahari mengadakan suatu rapat di Sekolah Chung Hwa di Bandar Brunei. Tujuan dari rapat itu adalah untuk menumbuhkan sebuah lembaga bisnis perfilman, Azahari sendiri yang menjadi penggagasnya. Setelah disepakati oleh semua peserta rapat akhirnya di putuskan untuk mendirikan *Brunei Film Production Company* (BRUFIPCO). Hal ini didasari dari sedang maraknya perfilman Brunei dan masyarakat sangat membutuhkan itu yang sedang mengalami kondisi yang memprihatinkan.¹³⁹ Melalui cara ini Azahari dapat menyebarkan isu-isu politik dengan cara cepat kepada masyarakat yang menggambarkan kekejaman para penjajah.

¹³⁸ *Ibid.* hal. 23

¹³⁹ *Ibid.* hal. 25

II.3.2. Pergerakan BRUFIPCO Hingga Kejatuhannya

Ketika BRUFIPCO berdiri, tidak ada yang menyangka bahwa lembaga itu memiliki tujuan lain selain berbisnis. Masyarakat menyangka BRUFIPCO hanya menjadi satu perusahaan yang akan menyaingi bisnis film milik Inggris dan Etnis Cina di Brunei. Pada waktu itu bisnis perfilman sedang marak di Brunei. Masyarakat sangat tertarik kepada film yang digunakan sebagai hiburan saat mereka mengalami masa sulit dalam kehidupan. BRUFIPCO juga bergerak dalam bidang politik. Azahari menggunakan BRUFIPCO sebagai alat untuk menyebarkan pahamnya kepada masyarakat. Film yang dirilis oleh BRUFIPCO merupakan film-film yang bercorak nasionalisme, mulai dari film kemerdekaan Amerika hingga film dokumenter yang memancing agar rakyat mau menentang penjajahan.¹⁴⁰

Dengan cara seperti itu BRUFIPCO mulai menyebarkan isu-isu bahwa pemerintahan Brunei tunduk kepada pihak Inggris, dan rakyat harus melawannya. Selain itu BRUFIPCO juga gencar dalam menyebarkan rasa nasionalisme ke rakyat agar dapat turut serta dalam memberikan kemerdekaan Brunei. Pihak Inggris dan kerajaan Brunei juga merasa ganjil dengan sepak terjang BRUFIPCO, hal ini dirasakan karena BRUFIPCO bergerak juga dalam bidang politik bukan dalam bidang perfilman saja. Melalui BRUFIPCO, Azahari mendapatkan dana dalam kampanye politiknya. Seperti yang dikatakan oleh Sir Anthony Abell yang merupakan Gubernur Serawak dan juga menjadi *British High Commissioner* yang menyatakan bahwa:

“Lembaga perfilman itu merupakan suatu penipuan besar dan lembaga itu digunakan untuk menutupi perjuangan Azahari, yang merupakan salah satu dimana Azahari mengumpulkan semua uang untuk dirinya sendiri atau untuk tujuan politiknya”.¹⁴¹

Berdasar dari perkataan itu ijin untuk pembelian modal bagi BRUFIPCO ditolak oleh Inggris. Karena BRUFIPCO dianggap berbahaya oleh pihak Inggris. Akan tetapi Azahari menggunakan penolakan tersebut sebagai hasutan

¹⁴⁰Haji Awang Mohd. Jamil Al Sufri. *8 Disember: Dalangnya Siapa?*. Bandar Sri Begawan: Pusat Sejarah Brunei, 2003. Hal. 6

¹⁴¹Brunei Annual Report 1953. Hal. 116

kepada rakyat bahwa Inggris tidak mengizinkan dan mencegah kemajuan orang Brunei dan modern. Propaganda itu terus disebar oleh Azahari dan teman-temannya di BRUFIPCO untuk membakar perasaan rakyat dan meracuni pikiran masyarakat Brunei untuk memiliki sikap anti kerajaan dan anti penjajah.

Akibat dari propaganda yang dilakukan oleh Azahari, BRUFIPCO dicabut ijin berdirinya oleh Inggris. Bahkan tokoh-tokoh penting BRUFIPCO ditangkap, karena mereka dianggap berbahaya. Dalam pengadilan tokoh-tokoh tersebut, mereka dihukum penjara antara satu tahun dan dua tahun. Dalam *Brunei Annual Report 1953* terdapat artikel yang mencatat kejadian ini, antara lain:

“Pada 5 Oktober, tiga orang termasuk seseorang yang telah dijatuhi hukuman pada berat telah ditangkap karena melakukan serangkaian propaganda untuk mengubah secara paksa undang-undang Negara dan mereka telah dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun dan satu tahun.”¹⁴²

Bahkan Haji Zaini Haji Ahmad sejarawan Brunei, memuji gerakan yang dilakukan tanpa perhitungan itu dalam bukunya yaitu:

“Dalam satu percobaan merampas kekuasaan di Brunei pada bulan Oktober 1953 yang berakhir dengan kegagalan Haji Muhammad Manggol dan dua orang temannya, Haji Garip Haji Manggol dan Jas Karim dihukum penjara selama dua tahun. Ketiganya merupakan beberapa orang pemuda Kedayan yang sering hadir dalam pertemuan anggota BRUFIPCO yang dibuat oleh Azahari. Pemikiran ketiga pemuda itu telah didoktrin oleh Azahari sehingga mereka sanggup untuk mencoba menekan pemerintah Inggris. Berdasarkan dakwaan, Haji Muhammad Manggol dituduh menghasut rakyat Brunei untuk merebut kekuasaan dengan cara kekerasan. Dari keterangan polisi Brunei, anggota BRUFIPCO tersebut ingin menyerang kantor polisi di Bandar Brunei dan merampas senjatanya. Kemudian mereka akan menangkap orang-orang Inggris dan para pejabat Brunei lalu membawa mereka ke istana dan memaksa Sultan untuk menandatangani proklamasi kemerdekaan Brunei.”¹⁴³

Petikan tersebut adalah salah satu bukti Azahari menggunakan BRUFIPCO sebagai rencana untuk memberontak dan pertemuan itu semata-mata digunakan untuk menanamkan bibit-bibit perlawanan dan paham radikal yang membakar, meracuni dan membangkitkan perasaan marah dan anti kerajaan kedalam pemikiran dan jiwa mereka. Mereka telah terhasut propaganda Azahari sehingga dapat dijadikan alat pemberontakan untuk merampas kekuasaan dengan kekerasan tanpa memikirkan akibat yang timbulkan.

¹⁴² *ibid.* Hal. 118

¹⁴³ Zaini. *Op.cit.* hal 44-45

III. 4. Partai Rakyat Brunei (PRB)

III. 4. 1. Lahirnya PRB

Setelah kegagalan Azahari dalam pergerakan BRUFIPCO, menimbulkan kemarahan dari para anggotanya dan kemarahan tersebut dijadikan asas untuk mendirikan partai politik yang dinamakan Partai Rakyat Brunei (PRB), tetapi sambutan terhadap ide itu sangat dingin.¹⁴⁴ Kemunculannya pada masa seperti ini kemungkinan ada hubungannya dengan rencana Inggris untuk menyatukan wilayah-wilayah Borneo, yang sedang dibincangkan secara tertutup oleh pegawai-pegawai Inggris di wilayah-wilayah luar Brunei dan London. Rancangan ini juga untuk memperkenalkan lembaga gabungan itu. Nampaknya bukan kebetulan, jika dari awal PRB sudah mempunyai tujuan untuk penyatuan ketiga wilayah Kalimantan Utara, kalau tidak didorong secara langsung atau tidak langsung oleh pihak Inggris. Sir Anthony Abell telah memberi tahu PRB bahwa partai itu dibolehkan membuka cabang di Sarawak dan supaya berunding dengan pihak Sabah agar diijinkan membuka cabang di wilayah Sabah. Keinginan untuk menjadikan PRB sebagai partai se-Borneo tidak terlaksana apabila Sultan Brunei tidak mengesahkan pendaftaran PRB, kecuali menghilangkan keinginannya untuk menjalankan kegiatannya di kedua wilayah Borneo itu.

PRB sendiri menyatakan, bahwa tujuan pendirian mereka adalah dalam rangka mensejahterahkan rakyat Brunei, dan perjuangan mereka untuk rakyat, seperti yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar dan Tujuan Partai pasal 4 yaitu:

- a. Menentang segala bentuk penjajahan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
- b. Memperjuangkan kemerdekaan bagi seluruh kepulauan Melayu yang berdaulat secara pemerintahan.
- c. Mempertahankan kedudukan Duli Yang Maha Mulia Maulana Sultan Brunei dengan semua keturunannya untuk menduduki tahta kerajaan dengan dasar kelembagaannya.

¹⁴⁴Jamil Al Sufri 2003. *Op.Cit.* hal. 25

- d. Mewujudkan Negara Melayu Merdeka yang berdaulat kedalam dan keluar, demokrasi dan menjamin keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat.¹⁴⁵

III. 4. 2. Pengesahan PRB

Sejak pendaftarannya pada bulan Agustus 1956, PRB telah mendesak kerajaan dan Inggris untuk melibatkan wakil-wakil partai dalam perundingan mengenai rancangan lembaga yang akan diperkenalkan itu. Pemerintah Inggris berjanji akan sesegera mungkin mempercepat proses ijin pendirian PRB, hal itu jika partai dapat segera mengirimkan Anggaran Dasar Partai yang sesuai dengan keinginan pihak Inggris. Tiga minggu kemudian PRB, memperoleh ijin untuk pendirian partai yang telah terdaftar dalam pemerintahan yang disahkan oleh pihak Inggris. PRB disahkan sebagai partai pada 15 Agustus 1956 yang berpusat di Brunei sendiri.¹⁴⁶ Setelah peresmian itu Dewan Harian PRB melakukan sidang pada 18 Agustus 1956 untuk pelantikan Ketua Umum serta pelantikan Anggota Dewan Harian (*Executive Council Members*)¹⁴⁷ yang terdiri atas:

1. Ketua Umum : A.M. Azahari
2. Wakil Ketua Umum : H.M. Shaleh
3. Setiausaha Agung : Jassin Affandi
4. Wakil Setiausaha Agung : H.B. Hidup
5. Bendahara : Awang Hapidz Laksamana
6. Pembantu Umum I : Awang Abdul Kadir bin Abdul Razak
7. Pembantu Umum II : Awang Abdullah bin Awang Jaffar
8. Ketua Dept. Politik : A.M. Azahari

¹⁴⁵*Ibid.* hal. 27

¹⁴⁶*Ibid.*

¹⁴⁷Anggota Dewan Harian merupakan susunan kepengurusan partai yang melingkupi ketua umum hingga bagian sub cabangnya, ini disahkan nanti melalui kongres pertama partai pada Maret 1957

9. Ketua Dept. Ekonomi : Awang Jais bin Haji Karim
10. Ketua Dept. Organisasi : Awang Zaini bin Awang Haji Ahmad
11. Ketua Dept. Sosial : Awang Abdullah bin Awang Jaffar
12. Ketua Dept. Penerangan : Awang Othman bin Awang Latif¹⁴⁸

Pada sidang ini juga dilakukan pelantikan 21 Anggota Dewan Partai (*Central Committe Members*)¹⁴⁹ yang terdiri dari:

1. Wakil Cabang Kampong Serdang
2. Wakil Cabang Kapong Burong Pingai
3. Wakil Cabang Seria
4. Wakil Cabang Kuala Belait
5. Wakil Cabang Temburong
6. Wakil Cabang Kampong Setia Pahlawan
7. Wakil Cabang Pekan Brunei
8. Wakil Cabang Kampong Saba
9. Wakil Cabang Berakas
10. Wakil Cabang Tutong
11. Wakil Cabang Kampong Kilanas
12. Wakil Cabang Muara

¹⁴⁸Haji Zaini bin Haji Ahmad. *Pertumbuhan Nasionalisme Di Brunei (1939-1962)*. Brunei: Asia Printers, 2004.hal. 32

¹⁴⁹Merupakan bagian ranting dari PRB. *Ibid.* Hal. 37

13. Wakil Ranting Kampong Sungai Liang
14. Wakil Ranting Kampong Bunut
15. Wakil Ranting Kampong Tamoi
16. Wakil Ranting Kampong Pandai Besi
17. Wakil Ranting Kampong Batu Ampar
18. Wakil Ranting Kampong Ujung Tanjong
19. Wakil Ranting Kampong Kasat
20. Wakil Ranting Kampong Lumapas
21. Wakil Ranting Kampong Bukit Salat

Anggota dari kedua dewan ini memegang jabatan hingga Kongres Pertama PRB yang akan diadakan pada bulan Maret 1957.¹⁵⁰

Struktur organisasi PRB hampir sama dengan struktur *Partai Rakyat Malaya* (PRM).¹⁵¹ Kekuatan tertinggi terletak pada kongres yang dilaksanakan setahun sekali. Apabila kongres tidak bersidang maka pimpinan dipegang oleh dewan pimpinan partai selain itu juga terdapat dewan harian pusat dan dewan harian cabang. Pengaruh PRB dalam pergerakannya sangat tidak disukai oleh Sultan karena PRB menerapkan konsep Nasionalis pada masyarakat selain itu PRB merupakan sebuah organisasi yang kurang dalam pendanaan karena tidak mempunyai sumber keuangan. Pengaruh PRB dalam masyarakat sangat pesat hanya dalam waktu lima bulan PRB sudah memiliki 12 cabang dan 47 ranting di Brunei Darussalam.¹⁵² Selain itu dalam area politik luar negeri PRB mengadakan

¹⁵⁰*Ibid.*

¹⁵¹Haji Awang Mohd. Jamil Al Sufri. *8 Disember: Dalangnya Siapa?*. Bandar Sri Begawan: Pusat Sejarah Brunei, 2003. Hal. 12

¹⁵²*Ibid.* hal 14

hubungan kerja sama dengan partai-partai nasionalis di Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Di Singapura PRB mengadakan kerja sama dengan *Partai Rakyat Singapura* (PRS) yang merupakan partai yang menginginkan Singapura untuk menjadi Negara Kesatuan dan di Malaysia PRB mengadakan kerja sama dengan *Partai Islam Setengah Melayu* (PAS) dan Partai Buruh.¹⁵³ Pada kerja sama ini PRB menyatukan pergerakan dalam kesatuan Nasional bangsa.

Kecenderungan PRB terhadap falsafah egalitarian yang membuat anggota partai begitu berminat dengan konsep sosialis. Kecenderungan kepada sosialisme juga ditunjukkan oleh Partai Rakyat Malaya (PRM) yang diketuai oleh Ahmad Boestamam dan *People's Party of Singapore* (PPS) yang dibentuk oleh Harun Mohd Amin yang kedua partai tersebut juga menjalin kerjasama dengan PRB dalam berbagai bidang.¹⁵⁴ Hal ini menjadikan ketidaksukaan Inggris terhadap PRB. Apalagi setelah Kongres PRB yang hasilnya PRB, seperti yang terkandung di dalam manifesto partai, menyatakan rasa benci terhadap penjajahan dan akan terus taat setia dan mendukung Kerajaan Brunei.¹⁵⁵

¹⁵³Haji Zaini bin Haji Ahmad. *Pertumbuhan Nasionalisme Di Brunei (1939-1962)*. Brunei: Asia Printers, 2004. Hal. 35

¹⁵⁴*Ibid.* hal 42

¹⁵⁵*Ibid.*

BAB IV

PERGERAKAN PEMUDABRUNEI TERHADAP INGGRIS DAN DAMPAKNYA

IV.1. Perjuangan Secara Diplomasi

Pada akhir bulan 1957, PRB mengirim rombongan yang dalam Misi Kemerdekaan yang dianggotai oleh Azahari yang merupakan pimpinan partai, Jassin Affendi yang menjabat sebagai Setiausaha Agung partai dan Zaini bin Ahmad, salah seorang ahli Dewan Pusat ke London untuk membicarakan rancangan PRB mengenai konstitusi Brunei.¹⁵⁶ Rancangan itu terkandung dalam sebuah memorandum¹⁵⁷ yang telah dirangka dan diserahkan lebih awal kepada *Setiausaha Tanah Jajahan* di London.¹⁵⁸

Isi dalam memorandum itu tersebut adalah PRB mencanangkan agar sistem residen dihapuskan dan diganti dengan sistem kementerian yang diketuai oleh seorang Menteri Besar.¹⁵⁹ Partai yang menang dalam pilihan umum akan menempati jabatan penting dalam pemerintahan Brunei dan kekuasaan tertinggi terletak pada Menteri Besar yang dilantik. Sultan yang akan menjadi Raja akan menjalankan pemerintahan atas nasihat Menteri Besar.

PRB juga mencanangkan agar hubungan dengan Inggris diteruskan sehingga Brunei menjadi wilayah persemakmuran dan mempunyai seorang penasihat British tetapi kuasa nasihat itu tidak semestinya dilaksanakan oleh kerajaan. Sistem berkerajaan sendiri ini akan berjalan sehingga Brunei mencapai kemerdekaan penuh. Di samping itu PRB juga mencanangkan supaya wilayah-wilayah Borneo disatukan di bawah Persekutuan Borneo di mana wilayah berkenaan mengekalkan sistem perlembagaan masing-masing.

¹⁵⁶Haji Zaini bin Haji Ahmad. *Pertumbuhan Nasionalisme Di Brunei (1939-1962)*. Brunei: Asia Printers, 2004. Hal . 84

¹⁵⁷Ada dalam lampiran VII dalam skripsi ini

¹⁵⁸Merupakan lembaga yang menaungi wilayah jajahan Inggris di Asia Tenggara. *Ibid.* hal. 85

¹⁵⁹*Ibid.* hal. 87

Walaupun misi PRB itu telah diterima oleh Alan Lennox-Boyd, ketua dari *Setiausaha Tanahjajahan*, tujuan untuk membicarakan isi kandungan memorandum itu tidak kesampaian apabila beliau enggan membicarakannya. Sebaliknya Lennox-Boyd menasihatkan Azahari dan rekan-rekannya supaya memberi dukungan kepada rencana rancangan perlembagaan Sultan yang beliau lihat lebih sesuai bagi tahap kemajuan Brunei pada saat itu. Inggris berpendapat bahwa rencana PRB untuk membuat perlembagaan yang lebih maju dari rancangan perlembagaan Singapura pada saat itu, hanya cocok bagi Brunei setelah memiliki pengalaman selama 10-15 tahun di bawah sebuah perlembagaan besar.¹⁶⁰

Kegagalan misi ke London itu telah memberi kesan kepada perkembangan PRB. Beberapa orang pemimpin partai itu melepas jabatannya termasuk Zaini dan Salleh bin Masri. Dukungan terhadap partai itu menurun, beruntun rancangan Federasi Malaysia pada 1961 memberi isu kepada PRB untuk mendapat dukungan kembali dari rakyat.¹⁶¹ Tetapi penolakan Inggris untuk berunding dengan PRB itu telah memberi kesempatan kepada pemimpin-pemimpin radikal PRB untuk memilih jalan keras seperti yang terjadi pada peristiwa berdarah pada 1962.

IV.2. Pemberontakan Brunei 1962

IV. 2.1. Lahirnya Pemberontakan

Pemberontakan Brunei terjadi pada tanggal 8 Desember 1962. Para pemberontak mulai melakukan serangan di kawasan kilang minyak Seria yang menargetkan lokasi penting seperti *Royal Shell Britanyang* merupakan kilang minyak milik Inggris, kantor polisi serta fasilitas pemerintah di sekitar kawasan ini.¹⁶² Pemberontakan dilakukandalam rangka melawan Sultan, pemerintah Inggris dan subjek yang dianggap sebagai salah satu tahap pertama dari konfrontasi

¹⁶⁰A. J. Stockwell. "Britain and Brunei, 1945-1963: Imperial and Retreat and Royal Ascendancy". *Modern Asian Studies* 38,4 (2004). Hal. 789

¹⁶¹*Ibid.* hal. 790

¹⁶²Matthew Jones. *Conflict and Confrontation in South East Asia, 1961-1965*. Singapore: Cambridge Univ. Press, 2002. Hal. 75

Indonesia-Malaysia .

Bagian utara pulau Kalimantan terdiri dari tiga wilayah Inggris: koloni dari Sarawak, Sabah dan protektorat Kesultanan Brunei. Brunei menjadi protektorat Inggris pada 1888, memiliki luas sekitar 2.226 mil persegi (5.800 km²) dan berpenduduk 85.000 orang, lebih dari setengah Melayu, seperempat Cina dan sisanya Dayak, yang merupakan penduduk asli wilayah Kalimantan. Minyak ditemukan pada tahun 1929 dekat Seria dan *Shell Petroleum* Perusahaan pertambangan yang diberikan izin oleh Kesultanan dengan penghasilan tambang minyak yang besar, yang disebut Brunei Town¹⁶³ pada masa itu, berada di sungai sekitar 10 mil (20 km) dari pantai.¹⁶⁴

Pada tahun 1959, Sultan Omar Ali Saifuddin II, mendirikan legislatif dengan setengah anggotanya dicalonkan dan setengah terpilih. Pemilu diadakan pada bulan September 1962 dan semua kursi yang ada dimenangkan oleh Partai Rakyat Brunei. Antara tahun 1959-1962, Inggris, Malaya, Singapura, Sabah, Serawak terlibat dalam rancangan untuk pembentukan Federasi Malaysia.¹⁶⁵ Namun, Filipina dan khususnya Indonesia menentang rencana untuk penyatuan wilayah Kalimantan Utara dengan Federasi Malaysia. Dukungan juga diberikan dengan bukti sentimen anti-Federasi di Sarawak dan Brunei sendiri. Partai Rakyat Brunei menolak bergabung dengan Malaysia, karena PRB memiliki rencana untuk penyatuan tiga wilayah terpadu Kalimantan Utara (total sekitar 1,5 juta orang, setengah Dayak) dengan kekuasaan di bawah sultan Brunei, dan hal itu cukup kuat untuk menahan dominasi oleh Malaya atau Singapura, pedagang Melayu atau pedagang Cina.¹⁶⁶

Penyatuan wilayah Kalimantan Utara dipandang sebagai alternatif-dekolonisasi dikirim oleh oposisi lokal terhadap rencana Federasi Malaysia. Oposisi lokal di seluruh wilayah Kalimantan terutama didasarkan pada

¹⁶³Sebutan untuk wilayah yang menjadi pusat pertambangan Brunei

¹⁶⁴ Harun Abdul Majid. *Rebellion in Brunei: The 1962 Revolt, Imperialism, Confrontation and Oil*. Brunei: I. B. Tauris. 2007. Hal. 45

¹⁶⁵*Ibid.* hal. 48

¹⁶⁶Stockwell. *Loc. cit.* hal. 790

perbedaan ekonomi, politik, sejarah dan budaya antara negara Kalimantan dan semenanjung Malaya, dan keengganan untuk menjadi sasaran dominasi politik wilayah Semenanjung.

Namun, sebelum keberhasilan pemilihan Partai Rakyat Brunei, sayap militer telah muncul, Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU), yang melihat dirinya sebagai pihak pembebasan anti-kolonialis. TNKU muncul juga karena rasa simpati dengan Indonesia yang dianggap sebagai memiliki demokrasi lebih baik dari Malaya dan Singapura. TNKU dipimpin oleh pemuda berusia 34 tahun yaitu A. M. Azahari yang pernah tinggal di Indonesia dan memiliki hubungan dengan agen-agen intelijen Indonesia. Dia telah merekrut beberapa perwira yang telah dilatih dalam peperangan kemerdekaan di Indonesia. Pada 1962-an, mereka bisa mengumpulkan sekitar 4.000 pria, beberapa senjata modern dan sekitar 1.000 senapan.¹⁶⁷

Petunjuk masalah pembuatan rancangan datang awal November 1962 ketika Residen untuk Divisi 5 Sarawak, Richard Morris (Australia), yang berkedudukan di Limbang (terletak di antara dua bagian Brunei) menerima informasi. Polisi khusus dari Kuching datang ke Limbang untuk mengadakan penyelidikan atas informasi tersebut, tetapi hasilnya polisi hanya menemukan beberapa seragam tentara dengan lencana TNKU.¹⁶⁸ Kemudian pada bulan November, Morris mendengar bahwa ada informasi tentang rencana pemberontakan terhadap Brunei. Claude Fenner, Inspektur Jenderal Polisi Malaya terbang ke Sarawak untuk menyelidiki namun tidak menemukan bukti. Oleh karena itu, Kepala Staf di Markas Timur Jauh Inggris di Singapura tidak meninjau dan memperbarui rencana pengawasan. Akan tetapi pihak Inggris mengirim komandan operasional angkatan darat, Mayor Jenderal Walter Walker¹⁶⁹ untuk mengawasi wilayah Limbang dalam rangka mengantisipasi segala kemungkinan terjadinya pemberontakan di sana.

¹⁶⁷ Akan tetapi masih terdapat kerancuan dalam jumlah pasukan pemberontak, karena di beberapa sumber ada yang menyatakan jumlah pemberontak mencapai 10.000 orang. *Op. cit.* hal. 50

¹⁶⁸ *Ibid.* hal. 52

¹⁶⁹ Merupakan perwira angkatan darat Inggris yang sarat prestasi. Jones. *Op.cit.* hal. 80

Pada tanggal 6 Desember, Morris mendengar pemberontakan akan dimulai pada tanggal 8 Desember. Pada tanggal 7 Desember, informasi yang sama mencapai Yohanes Fisher, kepala dari Divisi 4 Sarawak, yang berbasis di Miri sekitar 20 mil (30 km) sebelah barat Brunei.¹⁷⁰ Sebagaimana hasil pengawasan polisi pun diperingatkan penuh di wilayah Brunei, Borneo Utara dan Sarawak, dan Bidang Kepolisian bantuan diterbangkan dari Kuching ke Miri.

Dalam upaya untuk menggagalkan upaya untuk membentuk Malaysia, Indonesia menjadi aktif terlibat dalam operasi pembebasan dan kemudian menyatakan perang terhadap Malaysia. Selama periode ini, pihak Indonesia datang ke Kalimantan Utara dan melakukan kontak dengan oposisi lokal yang menentang gagasan federasi.¹⁷¹

IV. 2. 2. Awal Pemberontakan

Pemberontakan pecah pukul 02:00 pada tanggal 8 Desember. Sinyal dari Brunei ke Markas Timur Jauh melaporkan serangan pemberontak di kantor polisi, Istana Sultan, rumah Perdana Menteri dan pembangkit listrik, dan yang lainnya memaksa pemberontak mendekati ibukota. Markas Timur Jauh memerintahkan *Ale Kuning*¹⁷², yang menempatkan kekuatan dua perusahaan infanteri Gurkha pada 48 jam memberi pemberitahuan untuk pindah.

Sebagian besar serangan di kota Brunei, walaupun pasokan listrik mati. Pada tahap ini tidak diketahui bahwa pemberontak telah menyerang kantor polisi di seluruh Brunei, di Divisi 5 Sarawak dan di tepi barat Borneo Utara. Miri masih di tangan pemerintah tetapi Limbang telah diambil oleh para pemberontak. Situasi paling serius dalam Seria mana para pemberontak telah merebut kantor polisi dan menguasai ladang minyak.

Sembilan jam setelah *Ale Kuning*, *Ale Merah*¹⁷³ diperintahkan dan dua perusahaan dari Batalyon Brigade Infanteri ke-99, untuk pindah ke lapangan udara

¹⁷⁰*Ibid.* hal. 82

¹⁷¹*Ibid.*

¹⁷²Nama samaran batalyon pasukan Inggris yang dikirim ke Brunei. *Ibid.* hal. 793

¹⁷³Sama dengan ale kuning, ale merah merupakan nama samaran pasukan Inggris. *Ibid.*

di Changi dan Seletar di Singapura untuk terbang ke pulau Labuan di tepi pantai Brunei. Kedatangan pasukan Gurkha berjalan lambat karena RAF tidak siap dan mengikuti prosedur damai secara normal. Pasukan yang dikirim berada dalam wilayah Bristol Britannia dan tiga wilayah pasukan Gurkha dan yang terakhir dalam penerbangan dari Labuan ke lapangan udara Brunei ketika mengetahui bahwa ini tidak berada di tangan pemberontak.¹⁷⁴

Pasukan Gurkha mendarat pukul 22:00 dan pasukan Gurkha maju ke dalam wilayah Brunei. Kelompok kecil Gurkha yang dipimpin oleh Kapten Digby Willoughby berhasil menyelamatkan Sultan dan membawanya ke kantor polisi. Komando pasukan Gurkha datang ke Seria untuk bertemu oposisi yang melawan pemberontak dan kembali ke Brunei untuk melawan ancaman pemberontak di wilayah pusat dan lapangan terbang.¹⁷⁵

Pada tanggal 9 Desember, John Fisher meminta suku Dayak untuk membantu dengan mengirimkan sebuah perahu dengan senjata tradisional. Perang langsung terjadi di Sungai Baram. Tom Harrison, Kurator dari Museum Sarawak di Kuching dan pemimpin perlawanan terhadap Jepang di Perang Dunia Kedua juga tiba di Brunei.¹⁷⁶ Dia memanggil Kelabits dari dataran tinggi sekitar Bario, yang merupakan pusat perlawanan perangnya. Ratusan orang Dayak menanggapi, dan dibentuk menjadi pasukan dipimpin oleh warga sipil Inggris semua diperintahkan oleh Harrison.

Sementara bantuan mengalir ke Labuan. Pasukan Gurkha menguatkan pasukan dengan kekuatan batalyon. Pada tanggal 10 Desember, pasukan tambahan dari Inggris mulai berdatangan di Brunei. Brigadir Patterson, Komandan Brigade Infanteri 99 Gurkha tiba untuk mengambil alih komando dari Brigadir *Pat Glennie*. Keduanya melapor kepada Letnan Jenderal Sir Nigel Poett, yang merupakan Komandan Pasukan Timur Jauh di Singapura. Seria dan Limbang tetap

¹⁷⁴D. S. Ranjit Sing, *Brunei 1839-1983: The Problem of Political Survival*. Singapore: Oxford Univ. Press, 1984. Hal. 89

¹⁷⁵*Ibid.*

¹⁷⁶Hara, Fujiro. "The North Kalimantan Communist Party and The People's Republic of China". *The Developing Economies*, XLIII-4 (December 2005): hal. 497.

berada di kekuasaan pemberontak.¹⁷⁷ Bala bantuan lebih lanjut tiba pada hari-hari berikutnya.

IV. 2. 3. Pendudukan Terhadap Tempat-Tempat Penting

Rute Jalan ke Seria dinilai terlalu rentan untuk peryerangan dan tidak banyak cara untuk bergerak melalui laut. Pengintaian oleh pasukan udara *Corps Beaver* menyatakan ada bendera pemberontak di kompleks Shell dan 6 mil (10 km) dari pantai tampak pangkalan pemberontak¹⁷⁸. Ada sebuah lokasi pendaratan pesawat yang potensial untuk mendaratkan pesawat ringan di Seria dan timur kota, tempat pendaratan itu adalah bandara Anduki. Pada tanggal 10 Desember, pasukan tambahan Inggris mendarat di wilayah barat Seria dan di Anduki. Sebuah markas polisi 2 mil (3 km) dari arah barat itu berhasil dikuasai dan begitu juga pusat telekomunikasi. Bandara Anduki dengan cepat direbut kembali. Namun, di wilayah Seria masih banyak polisi Brunei dan orang Inggris yang masih ditawan.

Bandara Anduki adalah sebuah lapangan terbang rumput dengan jalan beton yang digunakan hampir secara khusus oleh pesawat *Brunei Shell Petroleum* dan helikopter pelayan instalasi produksi minyak Brunei. Sultan Brunei dan anggota keluarga kerajaan terkadang juga menggunakan helikopter mereka ketika mereka ingin mengunjungi Seria, terutama pada acara kenegaraan. Bandara ini dianggap sebagai tempat strategis karena letaknya dekat dengan kota minyak Seria. Jalan utama ke Anduki juga berdekatan dengan Bandar Seri Begawan dan merupakan salah satu wilayah yang dikuasai oleh pasukan Gurkha dan tentara Brunei. Serta tempat mereka mengerahkan pasukan pada latihan perang kontemporer.

Beberapa gedung-gedung pemerintah di ibukota yang dianggap sebagai target utama oleh pemberontak diduduki dan pejabat yang bekerja pada saat itu disandera. Mereka termasuk menteri Brunei yang berada di gedung pada saat para

¹⁷⁷*Ibid.*

¹⁷⁸Sing. *Op.cit.* hal. 95

pemberontak memasuki kompleks dan menahan mereka sebagai sandera. Ada beberapa fakta menarik dan nampak jelas selama pemberontakan itu, bahwa banyak orang di Brunei melaporkan melihat kelompok laki-laki membeli seragam tentara dan peralatan pada toko-toko lokal. Para pemberontak pada kenyataannya mempersiapkan diri untuk pemberontakan.¹⁷⁹ Sementara di distrik Tutong, para pendukung pemberontakan mengkonfirmasi bahwa mereka telah terlibat perang dengan Inggris dalam sebuah baku tembak dan beberapa perlawanan. Mereka melaporkan bahwa satu orang membunuh seorang penembak jitu menggunakan senapan pasukan patrol Gurkha di wilayah sekitar kota Bandar Seri Begawan.¹⁸⁰

Pada tanggal 8 Desember, dari jam dua hingga lima pagi, tembakan bisa terdengar di dekat kantor polisi di seluruh Brunei. Menurut berita yang diterima dari Temburong, di Distrik Pejabat Pengiran Haji Besar bin Pengiran Haji Kula dan beberapa orang lainnya dari aparat keamanan Brunei dan sejumlah warga sipil dibunuh karena menolak untuk bergabung dalam pemberontakan.¹⁸¹

Pada pukul lima pagi, TNKU sudah berhasil mengendalikan pusat kota. Berita lainnya keluar bahwa sejumlah pegawai negeri sipil di pusat kota berhasil melarikan diri menghindari penangkapan. Sekitar satu jam kemudian di pusat kota, Wakil Ketua Menteri diberikan pengarahan oleh Sultan. Setelah pertemuan, Sultan menyampaikan pidato melalui radio untuk mengutuk pemberontakan TNKU, yang merupakan sayap bersenjata dari Partai Rakyat Brunei, karena dianggap melakukan pengkhianatan.¹⁸²

Di wilayah Limbang, pemberontak menyerang kantor polisi setempat, menewaskan lima polisi lokal. Para pemberontak kemudian memperoleh tawanan pejabat Inggris RH Morris, istrinya, empat orang Eropa lainnya, seorang pekerja

¹⁷⁹Harun Abdul Majid. *Rebellion in Brunei: The 1962 Revolt, Imperialism, Confrontation and Oil*. Brunei: I. B. Tauris. 2007. Hal. 55

¹⁸⁰*Ibid.* hal 60

¹⁸¹Haji Awang Mohd. Jamil Al Sufri. *8 Disember: Dalangnya Siapa?*. Bandar Sri Begawan: Pusat Sejarah Brunei, 2003. Hal. 75

¹⁸²*Ibid.* hal. 78

dari Amerika dan menyandera Polisi yang tersisa¹⁸³. Pada malam pertama dari penawanan mereka, mereka dimasukkan ke dalam sel polisi, malam kedua mereka dipindahkan ke rumah sakit setempat di mana mereka mendengar para pemberontak merencanakan pemberontakan mereka pada hari berikutnya.

Delapan puluh sembilan Marinir dari Komando 42 dibawah pimpinan Kapten Jeremy Moore tiba di Brunei pada tanggal 11 Desember. Setelah mendapatkan dua kapal pendarat, Marinir kemudian dibawa ke Limbang oleh kapal Marinir Inggris yang dipimpin oleh Kapten Black (yang kemudian memerintahkan HMS Invincible selama Perang Falklands) dan mengumumkan kedatangan mereka pada waktu pagi, tanggal 13 Desember¹⁸⁴. Akan tetapi kedatangan mereka telah diantisipasi oleh pemberontak yang telah bersiap untuk melakukan penyerangan mendadak ketika pasukan marinir Inggris menyapai Limbang.

Para tentara Inggris memulai pencarian mereka terhadap para sandera yang ditawan oleh pemberontak, saat terdengar baku tembak, para sandera menyanyikan lagu berbahasa Inggris, yang memungkinkan pihak penyelamat untuk dengan cepat menemukan mereka.¹⁸⁵ Pasukan pertama pembebasan menyisiri wilayah yang dianggap sebagai lokasi tempat para sandera berada. Sedangkan pasukan pembebasan kedua bertempur dengan pemberontak yang berada di kawasan rumah sakit dan membebaskan para sandera. Sekitar 200 pemberontak, yang melakukan perlawanan yang pada dasarnya mereka hanya sedikit yang mengerti kemampuan militer dengan menggunakan berbagai jenis senjata (seperti senjata mesin, senapan laras panjang, pistol dan belati), akan tetapi mereka berhasil dipukul mundur oleh pasukan pembebasan.¹⁸⁶

Dampak dari baku tembak itu sekitar lima tentara marinir tewas dan delapan terluka dalam serangan itu. Dalam sumber Inggris menyatakan tidak terdapat korban dari pihak pemberontak dalam insiden ini, akan tetapi Clodfelter

¹⁸³ *Ibid.* hal. 83

¹⁸⁴ *Ibid.*

¹⁸⁵ Abdul Majid. *Op. Cit.* hal. 75

¹⁸⁶ *Ibid.*

memperkirakan kerugian dari pemberontakan Brunei yakni 40 pemberontak tewas dan hanya enam marinir yang tewas dalam peristiwa itu.

Ada penghormatan khusus terhadap korban yang gugur di Limbang. Pemimpin pemberontak Limbang tertangkap dan diadili dan menerima hukuman penjara sebelas tahun¹⁸⁷.

IV. 2. 4. Operasi Penumpasan Pemberontak

Pada 17 Desember 1962, Komando Gurkha telah berhasil menguasai Brunei dan *First Green Jacket* telah mendarat dari kapal penjelajah *HMS Tiger* di Miri. 40 Komando kapal pengangkut komando *HMS Albion* dialihkan dari Miri ke Kuching. Mayor Jenderal Walter Walker mengambil wilayah sebagai Pengawas dan Direktur Operasi (DOBOPS) pada tanggal 19 Desember dengan perintah dari kerajaan Inggris, angkatan laut, udara, darat ditugaskan ke Kalimantan dan melaporkan langsung kepada Panglima Tertinggi Pasukan Timur Jauh, Admiral Sir David Luce.¹⁸⁸ Tiga minggu setelah pemberontakan terjadi, Brigade Infanteri Gurkha ke 99 memiliki 5 batalyon infanteri dan Markas Komando Brigade ke-3 di Kuching. Gaya ini didukung oleh Resimen Melayu Brunei, Polisi Serawak, dan polisi dari tiga wilayah termasuk paramiliter *Polisi Field Force*, serta kekuatan Harrison dari sekarang 4000 Dayak¹⁸⁹. Kapal patroli AL kurang cocok digunakan (*Royal Navy*), sehingga digunakanlah pemberantas ranjau. RAF memiliki jangkauan pesawat angkut menengah dan pendek. Pada bulan Januari atas perintah raja setengah daripasukan Gurkha dikurangi menjadi sepertujuh pasukan hal ini dianggap karena wilayah Brunei dianggap telah aman. Juga penggantian pasukan yang berasal dari kerajaan Inggris dengan pasukan kepolisian lokal.¹⁹⁰

Pemberontak juga banyak yang menyerah, itu di karenakan pada saat itu wilayah Brunei di guyur hujan yang lebat. Sehingga menyebabkan tempat persembunyian para pemberontak kebanjiran dan banyak dari pemberontak keluar

¹⁸⁷ *Ibid.* hal. 88

¹⁸⁸ Haji Awang Mohd. Jamil Al Sufri. *Liku-Liku Perjuangan Pencapaian Kemerdekaan Negara Brunei Darussalam*. Bandar Sri Begawan: Pusat Sejarah Brunei, 1992. Hal. 86

¹⁸⁹ *Ibid.* hal. 90

¹⁹⁰ *Ibid.*

dari persembunyian yang memudahkan bagi pasukan Gurkha untuk menangkap mereka.¹⁹¹

Setelah penangkapan para pemberontak, pasukan Gurkha melakukan operasi pembebasan tawanan pemberontak, lokasi-lokasi tempat penawanan di sisir untuk mencari tawanan. Pasukan Gurkha dibantu polisi lokal berhasil membebaskan tawanan yang banyak dari mereka adalah pejabat pemerintahan yang terdiri dari orang-orang Inggris dan pejabat kesultanan Brunei.

Pada 17 Desember, pemberontakan telah dilaksanakan dan gagal. Sekitar 40 pemberontak tewas dan 3.400 ditangkap. Sisanya telah melarikan diri dan dianggap mencoba untuk mencapai Indonesia. Dari para pemimpin, Azahari dan Yassin berada di Filipina dengan status buronan.¹⁹²

Operasi pembersihan, dilakukan oleh pasukan komando artileri dengan senjata mereka, hingga bulan Mei 1963. Pada tanggal 18 Mei, sebuah patroli pasukan Gurkha dipandu oleh seorang informan ke kamp pemberontak. Mereka menyerang pihak pemberontak. Sepuluh pemberontak tewas dan sisanya ditangkap. Mereka adalah sisa-sisa pemberontak TNKU yang kabur ke wilayah pinggiran pantai Brunei dan salah satu yang terluka, tertembak di pinggul, adalah Jassin Effendi yang merupakan tokoh penting PRB.¹⁹³

Pada saat di Filipina, Azahari mencoba mencari perlindungan dari pihak Filipina. Akan tetapi tekanan yang diberikan pihak Inggris membuat Filipina menolak memberikan perlindungan kepada Azahari sehingga Azahari harus keluar dari Filipina. Kemudian Azahari mencari perlindungan ke Indonesia dan mendapatkan perlindungan dari Soekarno karena Azahari dianggap menjadi orang yang sangat menentang dibentuknya Federasi Malaysia.¹⁹⁴ Azahari mendapatkan perlindungan di Indonesia hingga dia meninggal dan dimakamkan di Indonesia.

¹⁹¹ *Ibid.* hal. 92

¹⁹² Hara, Fujiro. "The North Kalimantan Communist Party and The People's Republic of China". *The Developing Economies*, XLIII-4 (December 2005): hal. 500

¹⁹³ Abdul Majid. Op. Cit. hal. 87

¹⁹⁴ *Ibid.* hal. 90

IV. 3. Dampak Pergerakan Pemuda

Pemberontakan yang terjadi pada tahun 1962 merupakan salah satu keputusan yang mampu menjadikan kerajaan Brunei untuk bergabung dengan Federasi Malaysia. Pada dasarnya pemberontakan dilakukan dalam rangka penolakan oposisi yang mayoritas pemuda akan gagasan tentang Federasi Malaysia. Banyak anggapan bahwa gagasan itu merupakan rencana Inggris untuk lebih bisa mengontrol Brunei yang pada saat itu mulai tumbuh rasa nasionalismenya. Selain itu ketidaksukaan kaum nasionalis Brunei berada di bawah naungan negara semenanjung. Pandangan Sultan berubah dan menginginkan agar Brunei menjadi kesatuan negara sendiri.¹⁹⁵ Hal ini karena keinginan Malaysia yang dianggap berlebihan oleh Sultan. Walaupun pada awalnya Sultan mendukung pembentukan Federasi Malaysia, akan tetapi pada awal tahun 1963, Sultan menarik dukungannya dan menolak untuk bergabung dengan Federasi. Kebijakan yang di terapkan oleh Tunku Abdul Rahman dianggap merugikan pihak kerajaan Brunei, karena pihak Brunei diharuskan membayar pajak cukai kepada pihak Malaysia untuk hasil minyak yang ada di Brunei.¹⁹⁶ Selain itu Sultan Brunei mendapat kedudukan yang sangat rendah dibandingkan dengan sultan-sultan di wilayah semenanjung, yang apabila Sultan sudah tidak mendapat jabatan dari Federasi maka kedudukan Sultan menjadi lebih rendah dibandingkan Sultan yang lain, hal ini karena Sultan Brunei merasa bahwa kerajaan Brunei juga sebagai salah satu kerajaan tertua di Asia Tenggara. Serta keinginan rakyat yang juga tidak ingin Brunei bergabung ke Federasi Malaysia dan menjadi kerajaan yang merdeka dan berdaulat sendiri.

Pemberontakan juga mengakibatkan Sultan Brunei membentuk pemerintahan darurat. Itu dikarenakan banyak tempat sentral yang dikuasai oleh pemberontak. Sultan menereapkan kebijakan agar rakyat tidak keluar dari rumah demi keamanan mereka sendiri. Sultan membentuk *Majelis Mensyurat Negeri* yang baru yang bertugas menjalankan pemerintahan sementara menggantikan

¹⁹⁵D. S. Ranjit Sing, *Brunei 1839-1983: The Problem of Political Survival*. Singapore: Oxford Univ. Press, 1984. Hal. 96

¹⁹⁶Alun Chalfont. *By God's Will A Portrait of The Sultan Brunei*. London: Weindenfield and Nicolson, 1989. Hal. 67.

Majelis Mensyurat Negeri yang dibentuk pada tahun 1959.¹⁹⁷ Sultan juga membentuk *Petubuhan Perikatan Rakyat Bersatu* (PPRB) yang diketuai oleh Haji Awang Ghazali, yang bertujuan untuk bekerjasama dengan kerajaan dalam rangka pemulihan keamanan dalam negeri.¹⁹⁸ PPRB juga mengutuk tindakan pemberontakan yang dilakukan oleh PRB. Anggota PPRB menyatakan bahwa mereka sanggup mengorbankan dirinya untuk kesejahteraan Brunei.

Sultan juga mengirimkan surat kepada pihak Sulu dan Malaysia untuk membantu pemulihan kondisi Brunei. Tunku Abdul Rahman menyatakan akan membantu pemulihan Brunei dengan mengirimkan sekitar 150 anggota polisi untuk membantu pihak Brunei menjaga keamanan dan keselamatan rakyat Brunei. Sultan mengadakan pertemuan dengan Pemerintahan Tanah Melayu yang ingin membantu pemulihan Brunei pasca pemberontakan.¹⁹⁹ Sultan berpidato di depan pimpinan Pemerintahan Tanah Melayu bahwa apa yang dilakukan oleh Azahari adalah tindakan salah karena mengganggu integritas bangsa, dan Sultan meminta agar tidak ada yang memberi bantuan kepada Azahari.²⁰⁰ Hal ini didasari pasca pemberontakan Azahari berusaha mencari bantuan kepada negara-negara tetangga Brunei. Azahari mencari perlindungan ke wilayah Filipina hingga Indonesia. Akan tetapi akibat dari permintaan Sultan yang menyatakan tidak ada yang boleh memberi bantuan kepada Azahari maka Filipina menolak keinginan Azahari dan mendeportasikannya ke Brunei, hanya Indonesia yang mau membantu Azahari karena dia dianggap berani melawan kebijakan Malaysia yang pada saat itu Indonesia sedang konflik dengan Malaysia.

Selain itu akibat pemberontakan tersebut Partai Rakyat Brunei (PRB) dibekukan karena dianggap sebagai partai yang berbahaya bagi pihak kerajaan karena penentangan mereka terhadap konstitusi kerajaan.²⁰¹ Serta terdapatnya

¹⁹⁷*Ibid.* hal. 70

¹⁹⁸Haji Awang Mohd. Jamil Al Sufri. *8 Disember: Dalangnya Siapa?*. Bandar Sri Begawan: Pusat Sejarah Brunei, 2003. Hal. 82

¹⁹⁹*Ibid.* hal. 83

²⁰⁰*Ibid.* hal. 85

²⁰¹Chalfont. *Op. cit.* hal.70

anggapan bahwa PRB merupakan salah satu sayap komunis.²⁰² Selain itu, para pemimpin partai banyak yang diasingkan ke Indonesia, hal ini untuk mengantisipasi akan munculnya gerakan yang akan menentang kerajaan seperti yang dilakukan oleh PRB.²⁰³



²⁰²Ibid. hal. 71

²⁰³Ibid. hal 72

BAB V

KESIMPULAN

Brunei adalah negara kesultanan yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara dan berbatasan dengan wilayah Serawak di barat dan Sabah di utara. Brunei merupakan sebuah kesultanan Islam yang berdiri sejak Abad 14. Pada abad 16, wilayah kekuasaannya telah mencakup Serawak, Sabah, Kepulauan Sulu dan Mindanao. Akan tetapi, kekuasaan Brunei mulai mengalami kemunduran ketika bangsa Eropa mulai menancapkan kekuasaannya di Asia Tenggara.

Pada tahun 1888, Brunei telah mengadakan perjanjian dengan Inggris yang mengakibatkan Brunei menjadi negara protektorat Inggris. Perjanjian tersebut bertujuan untuk menjaga kedaulatan Brunei, karena Brunei sudah kehilangan beberapa wilayahnya, seperti Kepulauan Sulu, Serawak, dan Sabah. Pada tahun 1905, Inggris telah meletakkan Brunei di bawah sistem Residen. Tugas Residen hanya sebagai penasihat Sultan, namun pada kenyataannya pemerintahan dikendalikan oleh Inggris.

Masa High Kolonialisme di Asia Tenggara juga menjadi dasar munculnya rasa nasionalisme. Keinginan untuk merdeka dan berdaulat menjadi tolak ukurnya. Kemunculan gerakan-gerakan yang berbasas nasionalis mulai menjamur di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Mulai kemunculan organisasi yang berbasas nasionalis di Indonesia juga menjadi tolak ukur akan kemunculan organisasi nasionalis yang ada di Brunei. Tokoh muda yang menimba ilmu di luar Brunei membawa pemikiran bahwa penjajahan Inggris atas Brunei harus segera dihilangkan karena mereka menginginkan Brunei Darussalam yang merdeka dan berdaulat.

Masa pendudukan Jepang di Brunei juga menjadi tonggak kemunculan rasa nasionalis pemudanya. Pada masa pendudukan Jepang banyak dari tokoh muda Brunei yang mendapatkan beasiswa pendidikan di luar Brunei. Di sana

mereka banyak mempelajari dasar-dasar nasionalisme untuk bangsa. Salah satu tokoh muda yang belajar di luar Brunei adalah A. M. Azahari yang menjadi pendiri dari BRUFIPCO dan PRB. Azahari belajar di Indonesia tepatnya dia kuliah di *Institute Pertanian Bogor* (IPB) pada tahun 1942. Saat di Indonesia Azahari banyak terlibat dalam kepolitikan, dia bergabung dengan *Partai Pemuda Nasionalis Indonesia* (PPNI) yang aktif berjuang dalam kemerdekaan Indonesia. Azahari juga tokoh muda Brunei yang juga dekat dengan *Partai Komunis Indonesia* (PKI) pimpinan D. N. Aidit. Serta dekat dengan tokoh lain seperti Tan Malaka dan Dr. Soebrandario yang merupakan Menlu Indonesia pada masa itu.

Berakhirnya Perang Dunia II menyebabkan terjadinya perubahan politik di wilayah Asia Tenggara. Setelah Jepang menyerah terhadap sekutu, maka wilayah Asia Tenggara diambil alih oleh pasukan sekutu. Pada tanggal 10 Juni 1945 pasukan sekutu mendarat di Brunei. Di Asia Tenggara, Inggris membentuk sebuah pemerintahan Militer yang disebut *British Military Administration* (BMA). Tugas BMA adalah rehabilitasi wilayah pasca perang, dan mempersiapkan segala urusan administrasi sebelum diambil alih oleh pemerintahan sipil. Pada tahun 1946, BMA menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil.

Inggris merupakan salah satu negara yang mendatangi Atlantic Charter, yang mengaruskan Inggris untuk melaksanakan dekolonisasi atas wilayah jajahannya. Dampak dari kebijakan dekolonisasi Inggris adalah menjadikan semua wilayah jajahan Inggris akan diberikan pemerintahan sendiri. Inggris mempunyai rencana untuk menyatukan semua jajahannya dalam suatu Dominion.

Pada tahun 1949, Inggris membentuk sebuah badan untuk mengkoordinasikan sistem administrasi di Asia Tenggara, yaitu Komisi Jendral Asia Tenggara. Di bawah Komisi Jendral terdapat Komisaris Tinggi untuk wilayah Semenanjung Malaya, dan Brunei. Sedangkan Singapura, Serawak, dan North Borneo (Sabah) dipegang oleh seorang Gubernur.

Dampak lain dari berakhirnya Perang Dunia II adalah munculnya semangat Nasionalisme dan kesadaran politik yang melanda Asia Tenggara. Munculnya organisasi pergerakan di Brunei seperti Gerakan itu adalah BARIP

(*Barisan Pemuda*) yang dibentuk oleh Pengiran Mohd. Yusuf, yang baru kembali dari menyelesaikan studi ilmu pemerintahan di Jepang pada tahun 1946 di universitas Hiroshima. Gerakan itu dibentuk atas dasar nasib rakyat Brunei yang ditekan dan dikesampingkan. Gerakan itu dibentuk bersama para pemuda yang berasal dari guru-guru lulusan MPSI (*Maktab Perguruan Sultan Idris*), ahli-ahli *Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei* (PGGMB), serta pejabat-pejabat kerajaan. Gerakan BARIP dibentuk pada tanggal 12 april 1946 di rumah Awang Ya'akub bin Awang Othman . Gerakan ini dibentuk dengan tujuan untuk menyatukan jiwa pemuda untuk memperjuangkan hak bangsa Melayu Brunei di negerinya sendiri dan menjadi barisan terdepan dalam menegakkan dan mempertahankan kedaulatan raja dan rakyat Brunei.

Selain BARIP muncul juga BRUFIPCO yang merupakan organisasi perfilman yang melakukan propaganda untuk kemerdekaan Brunei. Masyarakat menyangka BRUFIPCO hanya menjadi satu perusahaan yang akan menyaingi bisnis film milik Inggris dan Etnis Cina di Brunei. Karena pada waktu itu bisnis perfilman sedang marak di Brunei. Masyarakat sangat tertarik kepada film yang digunakan sebagai hiburan saat mereka mengalami masa sulit dalam kehidupan. BRUFIPCO juga bergerak dalam bidang politik. Azahari menggunakan BRUFIPCO sebagai alat untuk menyebarkan pahamnya kepada masyarakat. Film yang dirilis oleh BRUFIPCO merupakan film-film yang bercorak nasionalisme, mulai dari film kemerdekaan Amerika hingga film dokumenter yang memancing agar rakyat mau menentang penjajahan. BRUFIPCO didirikan oleh Azahari yang merupakan tokoh sentral dalam pergerakan di Brunei.

Setelah kegagalan Azahari dalam pergerakan BRUFIPCO, menimbulkan kemarahan dari para anggotanya dan kemarahan tersebut dijadikan asas untuk mendirikan partai politik yang dinamakan Partai Rakyat Brunei (PRB), tetapi sambutan terhadap ide itu sangat dingin. PRB sendiri menyatakan, bahwa tujuan pendirian mereka adalah dalam rangka mensejahterahkan rakyat Brunei, dan perjuangan mereka untuk rakyat. Kecenderungan PRB terhadap falsafah egalitarian yang membuatkan ada di antara ahli-ahli partai begitu berminat dengan konsep sosialis. Kecenderungan kepada sosialisme juga ditunjukkan oleh *Partai*

Rakyat Malaya (PRM) yang diketuai oleh Ahmad Boestamam dan *People's Party of Singapore* (PPS) yang dibentuk oleh Harun Mohd Amin yang kedua partai tersebut juga menjalin kerjasama dengan PRB dalam berbagai bidang. Masalah ini menambahkan rasa bimbang akan ketidaksukaan Inggris terhadap PRB.

Dalam pergerakannya PRB melakukan cara diplomasi dengan mengirim utusannya untuk bertemu dengan pihak Inggris di London. Pihak PRB membawa memorandum yang berisi PRB mencanangkan agar sistem residen dihapuskan dan diganti dengan sistem kementerian yang diketuai oleh seorang Menteri Besar. Partai yang menang dalam pilihan umum akan menempati jabatan penting dalam pemerintahan Brunei dan kekuasaan tertinggi terletak pada Menteri Besar yang dilantik. Sultan yang akan menjadi Raja akan menjalankan pemerintahan atas nasihat Menteri Besar. PRB juga mencanangkan agar hubungan dengan Inggris diteruskan sehingga Brunei menjadi wilayah persemakmuran dan mempunyai seorang penasihat Inggris tetapi kuasa nasihat itu tidak semestinya dilaksanakan oleh kerajaan. Sistem berkerajaan sendiri ini akan berjalan sehingga Brunei mencapai kemerdekaan penuh. Di samping itu PRB juga mencadangkan supaya wilayah-wilayah Borneo disatukan di bawah Persekutuan Borneo di mana wilayah berkenaan mengekalkan sistem perlembagaan masing-masing.

Akan tetapi rancangan itu di tolak oleh pihak Inggris karena memorandum itu merugikan untuk Inggris. Misi dalam memorandum yang ditawarkan ke Inggris dianggap gagal oleh para tokoh PRB dan Inggris juga memiliki rencana untuk menggabungkan Brunei dengan Semenanjung Malaysia dan menjadikannya Federasi Malaysia. Sultan juga sempat menyetujui konsep penggabungan Brunei ke Federasi Malaysia. Hal ini yang akan menimbulkan pemberontakan PRB pada tahun 1962.

Pemberontakan akhirnya terjadi pada tanggal 8 Desember 1962, pemberontakan dilakukan oleh TNKU (*Tentara Nasional Kalimantan Utara*) yang merupakan sayap militer PRB. Pemberontakan dilakukan kepada pusat pemerintahan, kilang minyak serta kekutan Inggris di Brunei. Kilang minyak Seria menjadi tempat target utama pemberontak.

Pemberontakan berhasil dilumpuhkan oleh pasukan Gurkha. Pasukan Gurkha merupakan pasukan elit Inggris yang dibawa langsung dari Inggris. Pasukan Gurkha menumpas pemberontak dengan senjata lengkap.

Pemberontakan juga menjadi pengaruh penting tidak bergabungnya Brunei ke Federasi Malaysia. Pemberontakan juga menyebabkan PRB dibekukan karena dianggap sebagai partai berbahaya.



DAFTAR REFERENSI

Sumber Buku

- Abdul Latif, Muhammad. *Sejarah Kesusasteraan Melayu Brunei*. Brunei: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1980.
- Chalfont, Alun. *By God's Will A Portrait of The Sultan Brunei*. London: Weindenfield and Nicolson, 1989.
- Haji Awang Mohd. Jamil Al Sufri. *8 Disember: Dalangnya Siapa?*. Bandar Sri Begawan: Pusat Sejarah Brunei, 2003.
- _____. *Brunei Darussalam: The Road To Independence*. Bandar Sri Begawan: Pusat Sejarah Brunei, 1998.
- _____. *Liku-Liku Perjuangan Pencapaian Kemerdekaan Negara Brunei Darussalam*. Bandar Sri Begawan: Pusat Sejarah Brunei, 1992.
- _____. *Tarsilah Brunei: Sejarah Awal dan Perkembangan Islam*. Bandar Sri Begawan: Pusat Sejarah Brunei, 1990.
- _____. *The Survival of Brunei: A Historical Perspective*. Bandar Sri Begawan: Pusat Sejarah Brunei, 2002.
- Haji Zaini bin Haji Ahmad. *Brunei ke Arah Kemerdekaan*. Selangor: Haji Zaini bin Haji Ahmad Press, 1984.
- _____. *Pertumbuhan Nasionalisme Di Brunei (1939-1962)*. Brunei: Asia Printers, 2004.
- Hill, Clauspeter & Joge Menzel (ed.). *Constitutionalism in South-East Asia*. Singapore: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2008.
- Hussainmiya, B. A. *The Brunei Constitution of 1959: An Inside History*. Brunei: Brunei Press, 2000.
- Jessy, Joginder Singh. *History of South-East Asia (1824-1965)*. Kedah: Penerbitan Darulaman, 1985.
- Jones, Matthew. *Conflict and Confrontation in South East Asia, 1961-1965*. Singapore: Cambridge Univ. Press, 2002.
- Kahin, George McTurnan (ed), *Governments and Politics of South East Asia*, London: Cornell Univ. Press, 1969.

- Majid, Harun Abdul. *Rebellion in Brunei: The 1962 Revolt, Imperialism, Confrontation and Oil*. Brunei: I. B. Tauris. 2007.
- Palit, D. K. *The Campaign in Malaya*. India: Palit and Dutt Publisher, 1971.
- Payne, Robert. *The White Rajahs of Sarawak*, London: Weidenfield and Nicolson, 1960.
- Poole, Peter A. *Politic and Society in South East Asia*. Singapore: Mcfarland, 2009.
- Sing, D. S. Ranjit. *Brunei 1839-1983: The Problem of Political Survival*. Singapore: Oxford Univ. Press, 1984.
- Turnbull, C. Mary. *A History of Malaysia, Singapore, and Brunei*. Sydney: Allen and Unwin, 1989.

Sumber Internet Artikel dan Jurnal

Jurnal

- Hara, Fujiro. "The North Kalimantan Communist Party and The People's Republic of China". *The Developing Economies*, XLIII-4 (December 2005): 489-513.
- Horton, A. V. M. "British Administration in Brunei 1906-1959". *Modern Asian Studies*, Vol. 20, No. 2 (1986), pp. 353-374. <http://www.jstor.org/stable/312580>, 28/12/2009 01:08.
- _____. "Colonial Office Correspondence Relating To Brunei 'Destroyed Under Statue' 1906-1934". *IJAPS* Vol. 1 (2005): 6-45.
- Hugh-Hallet, H.R., "A Skecth of the History of Brunei", *JMBRAS*, Vol. XVIII, Pt.2.(Juli 1996): 10-25.
- Morris, H. S. "North Borneo, Brunei, Sarawak (British Borneo)". *Man*, Vol. 58 (Jun., 1958), p. 99. <http://www.jstor.org/stable/2795447>, 28/12/2009 01:22
- Singh, Ranjit. D. S. "British Proposals for A Dominion of Southeast Asia 1943-1957". *JMBRAS*, Vol. 71 Part 1, no. 274 (Juni 1998): 27-40.
- Starner, Frances L. "Malaysia and the North Borneo Territories". *Asian Survey* 3, no.11 (November 1963): 519-534.
- Stockwell, A. J. "Britain and Brunei, 1945-1963: Imperial and Retreat and Royal Ascendancy". *Modern Asian Studies* 38,4 (2004): 785-819.

Talib, Naimah. "A Resilient Monarchy: The Sultanate of Brunei and Regime Legitimacy in an Era Democratic Nation State". *New Zealand Journal of Asian Studies* 4, 2 (December, 2002): 134-147.

Tarling, Nicholas. "Britain, the Brookes and Brunei". *Pacific Affairs*, Vol. 45, No. 3 (Autumn, 1972), pp. 460-461. <http://www.jstor.org/stable/2756556>. 28/12/2009 01:23.

Warren, James Francis. "Report on Brunei in 1904". *The Journal of Asian Studies*, Vol. 48, No. 1 (Feb., 1989), p. 225. <http://www.jstor.org/stable/2057752>, 28/12/2009 01:12

Kertas Kerja

Az-Zahra, Asiyah. "Pembentukan Dasar British terhadap Brunei selepas Perang Dunia Kedua: Pengaruh dari Perang Dingin atau Faktor Minyak?". Paper Seminar Sejarah Brunei saat hari Kebangsaan, 2006.

Haji Hazair bin Haji Abdullah. "Politik, Pentadbirandan Wawasan: Pelaksanaan Hala Tuju". Paper Seminar Sejarah Brunei Hari Kebangsaan, 2004.

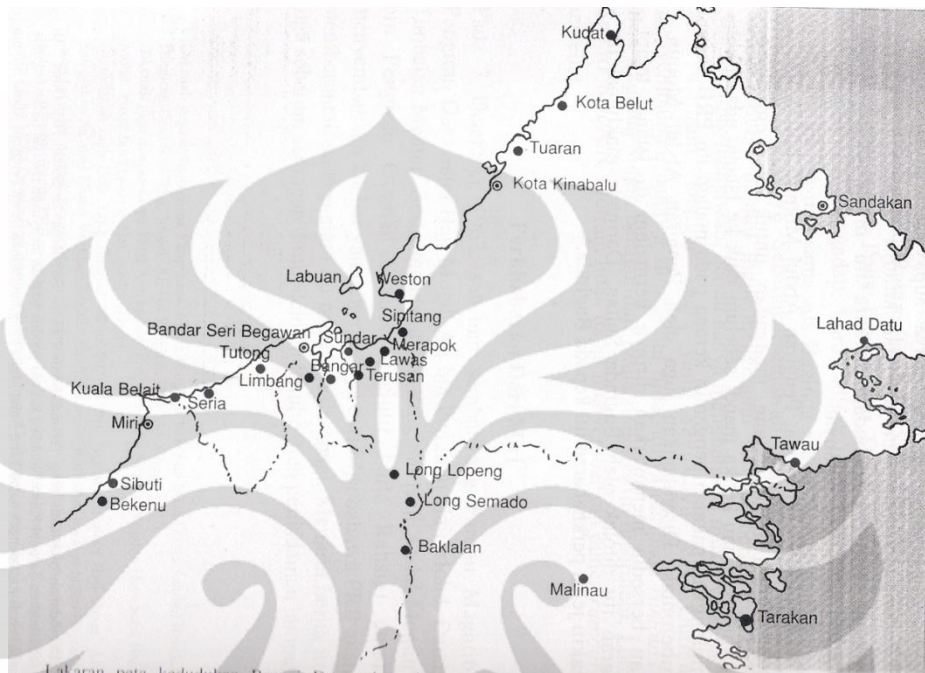
Muhammad Hadi bin Md Melayong. "Hubungan Brunei-Great Britain.". Paper Seminar Kilas Sejarah Brunei, 1998

Internet

"Exclusive Interview with A. M. Azahari By DR. H. Pramudya A. Tauf. (part 1-part 8)". yang di unduh di <http://www.youtube.com/A.M.Azahari>. Tanggal. 27 Mei 2011 pukul. 22.30 wib

Lampiran I

Peta Brunei



Haji Zaini bin Haji Ahmad. *Brunei ke Arah Kemerdekaan*. Selangor: Haji Zainibin Haji Ahmad Press, 1984.

Lampiran II

Foto Sultan Brunei Bersama Pimimpinan Jepang



Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Ahmad Tajuddin Akhazul Khairi Waddien bersama-sama dengan adinda Baginda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Omar 'Ali Saifuddien dan Pembesar-Pembesar Negara bergambar ramai dengan Pegawai-Pegawai Tinggi Tentera Jepun di Brunei pada tahun 1944.

Haji Awang Mohd. Jamil Al Sufri. *8 Disember: Dalangnya Siapa?*. Bandar Sri Begawan: Pusat Sejarah Brunei, 2003.

Lampiran III

Iring-iringan rombongan PRB sepulang dari London

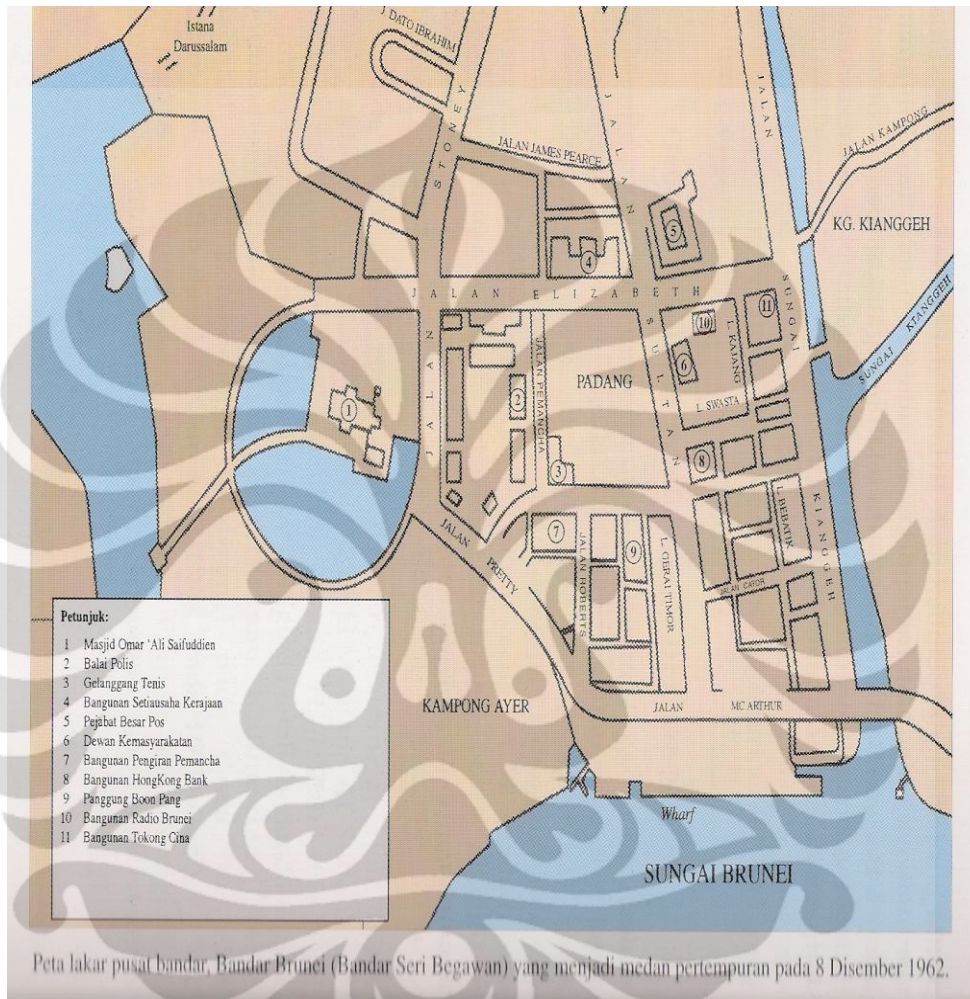


Ahli-Ahli dan Penyokong Partai Rakyat Brunei berbaris mengalu-alukan ketibaan rombongan yang membawa Walter Raeburn O.C., Penasihat Undang-Undang Perlembagaan Partai Rakyat Brunei pada 15 Jun 1957. (Dipetik daripada buku *Brunei Ke Arah Kemerdekaan* oleh Haji Zaini bin Haji Ahmad)

Haji Zaini bin Haji Ahmad. *Brunei ke Arah Kemerdekaan*. Selangor: Haji Zainibin Haji Ahmad Press, 1984.

Lampiran IV

Peta Pemberontakan 8 Desember 1962



Haji Awang Mohd. Jamil Al Sufri. *8 Disember: Dalangnya Siapa?*. Bandar Sri Begawan: Pusat Sejarah Brunei, 2003.

Lampiran V

Kumpulan Berita Mengenai Pemberontakan Brunei

TAHUN KE-23 No. 163
MINGGU 7 DESEMBER 1962

WARTA BHAKTI

PENDUKUNG MANIFESTO POLYU 61

Pemberontakan meletus di Kalimantan Utara

*** Tentara Nasional Kalimantan Utara rebut lebih 20 kota, termasuk kota minjak Seria**

*** Tudjuannya melawan Inggris - Malaysia & bendera pemerintahan baru dinaikkan**

Sebuah pemberontakan berkecamuk yang diumumkan oleh sebuah organisasi kemerdekaan yang bernama "Tentara Nasional Kalimantan Utara" baru Sabtu pagi meletus di Brunei, daerah "pemukiran" inggris di Kalimantan Utara. Pemberontakan ini, sudah berkecamuk di daerah-pemukiran bersebelahan itu minggu-minggu sebelumnya. dan dengan pemberontakan Malaya Raya (Pergerakan Melaju Raya) yang memusatkan rayuannya akan dipertunjukkan pada 31 Agustus 1962.

Sebuah pemberontakan berkecamuk yang diumumkan oleh sebuah organisasi kemerdekaan yang bernama "Tentara Nasional Kalimantan Utara" baru Sabtu pagi meletus di Brunei, daerah "pemukiran" inggris di Kalimantan Utara. Pemberontakan ini, sudah berkecamuk di daerah-pemukiran bersebelahan itu minggu-minggu sebelumnya. dan dengan pemberontakan Malaya Raya (Pergerakan Melaju Raya) yang memusatkan rayuannya akan dipertunjukkan pada 31 Agustus 1962.

Wampa-Menu dr Subandrio berangkat ke Kolombo

Yang mendahului peneraan, akan di wakil Subandrio

411 akan berangkat ke 4140 serdadu India

UNTEA mau apa?

— Semangat anggota "Dewan Papua" dipertunjukkan

411 akan berangkat ke 4140 serdadu India

Delegasi I.B. minggu depan ke PBB

Mani delegasi keutusan UNTEA berangkat

Brunei Tidak Ikut „Malaysia“

Penduduk Malaysia Hanja 1/10-nja RI

London, 9 Djuli (Ant-Rtr)
Suatu persetujuan yang membentuk apa yang dinamakan "federasi Malaysia" telah ditandatangani hari Senin tengah malam di London dan federasi itu akan diresmikan tgl. 31 Agustus 1963. Kaja dgn timah, karet dan kaju, Malaysia akan mempunyai penduduk kira-kira 10 djuta.

Federasi itu akan terdiri dari PT Melaju, Singapura yang memerintah sendiri dan djajahan Inggris Sabah dan Sarawak. Brunei yang kaja dengan minjak tidak mau menjertai federasi itu, menurut Renter "untuk sementara ini".

Pidato PM Inggris
Perdana Menteri Inggris Harold MacMillan dalam upacara penanda tanganan tadi katakan bahwa ia berharap "evolusi Persemakmuran kita itu dapat mengadakan perdamaian, kebebasan dan kestabilan di Asia Tenggara."

Menurut MacMillan, Malaja dan Singapura telah memberikan kisah sukses dari Asia dan diharapkan kisah itu akan berleumpang terus pada ukuran yang lebih besar dengan Malaysia.

Pidato Tengku
Perdana Menteri PT Melaju Tengku Abdul Rahman yang datang di London khusus untuk menanda tanganan persetujuan itu, dalam pidatonya katakan bahwa Malaysia akan djadi anggota Persemakmuran dan merasa bangga dgn. itu.

Sambil mengemukakan sulitnya perundingan, Tengku katakan bahwa dalam beberapa kalangan Malaysia disambut dgn. gembira, tetapi dalam kalangan lainnja dilukiskan-nja sebagai rentjana kaum imperialis.

Tentang tidak ikutnja Brunei, Tengku katakan bahwa ia "tidak djaja ti putus asa".

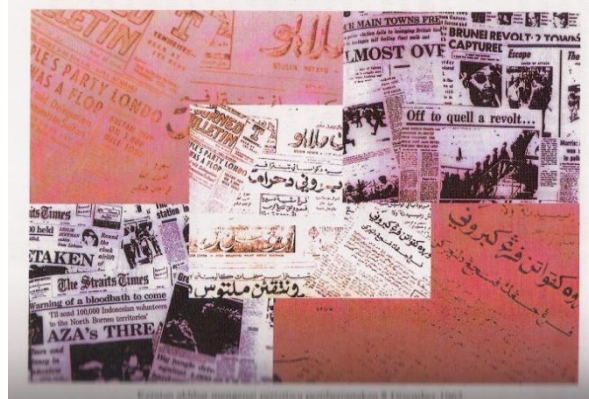
Anggaran Pendapatan 1963
Dalam tahun 1962 menurut angka sementara padjak berdjumlah Rp 24.257 djuta, sedangkan untuk tahun 1963 ditaksir Rp 40.891 djuta.

Penambahan penghasilan sebesar Rp 16.634 djuta, terutama akan didapatkan dari Padjak Pendapatan, Terseroan, Pendjualan yang akan naik sekali berhubung dengan harapan akan makin lantarnya peredaran barang dan oleh sebab per-



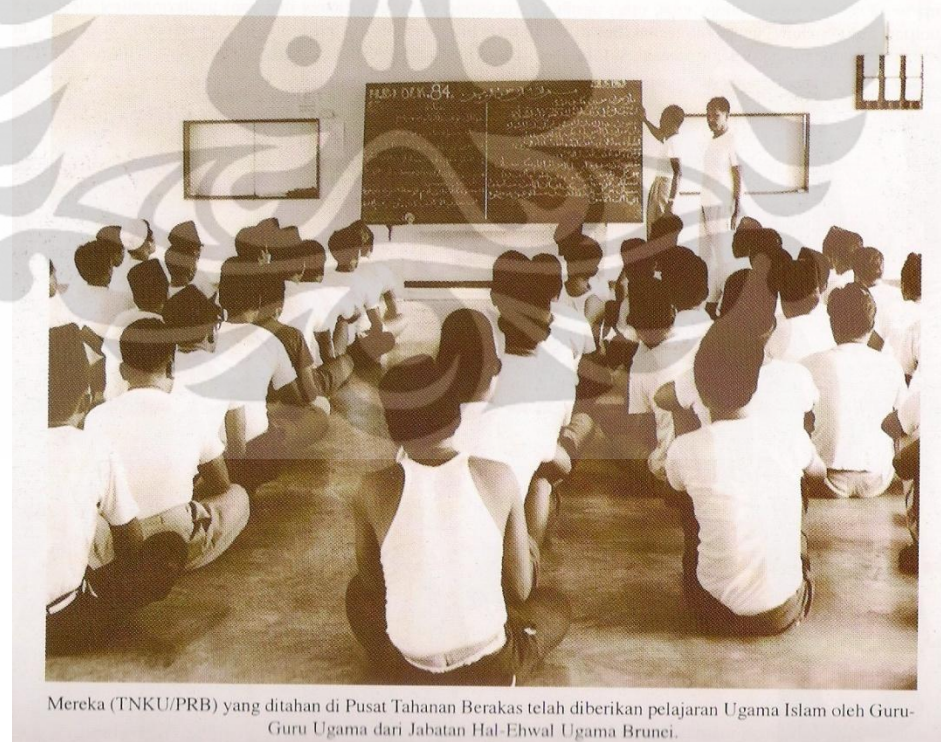
TENGGU Abdurachman tampak disambut oleh Sir Georjroy Tory Komisaris Inggris untuk Malaya, ketika PM Tengku Abdurachman tiba di London tgl. 7 Djuli jbl. (Foto: AP)

Wanita Katholik & „Fama



Lampiran VI

Foto Tentara TNKU



Lampiran VII

Memorandum 1957 PRB Kepada Inggris

LAMPIRAN B

Petisi PRB kepada Setiausaha Tanah-Tanah Jajahan

Markas Besar Partai
213, Jalan Chevalier,
P.O. Box 118, Tel. 456,
Brunei

Tanggal: 4.8.1961

The Right Honourable,
The Colonial Secretary of States for the Colonies,
Colonial Office,
London, U.K.
Through:
His Excellency
The High Commissioner for
Great Britain in Brunei,
Brunei.

Your Excellency,

This petition is presented to Your Excellency in the name of Partai Rakyat Brunei, Kalimantan Utara, the most prominent and influential political party in the Protectorate State of Brunei, which was founded since the year nineteen fifty six.

The Partai Rakyat Brunei is founded on the basis of nationalism whose principles are in accordance with the spirit of nationalism now spreading amongst the peoples of South East Asia, India and so on. Presently, the Partai Rakyat Brunei, Kalimantan Utara has some 20,000 registered members and it has more if we were to include its sympathisers.

192: PERTUMBUHAN NASIONALISME

economy of the country very stable? The answer is, Partai Rakyat Brunei believes that there is no Crown Colony or Protectorate under Her Majesty's Government's jurisdiction which is suffering economically, it applies also to the Protectorate of Brunei which has a stable and strong economy. The factor which stabilises the economy of Brunei Protectorate is the income from oil which is extracted by Brunei Shell Petroleum Company, and Brunei Protectorate has sufficient fund consolidated annually in the United Kingdom. And the Protectorate of Brunei has been able to give loans to other countries. It can be said that in South East Asia today, Brunei has no debts but has given loan instead. All these are happening during Her Majesty's Government's period of protection which has always been in the safeguard of the state's economy. However, the present economic stability cannot be taken for granted to last long. The reasons are, there are several schemes which must be carried out by the present Brunei Government, such as irrigation, agriculture which should be objective and positive, animal husbandry and to promote light industries so that the existing raw materials could be utilised. Sand for the manufacture of glass, for example. If the Protectorate of Brunei is going to depend her economy entirely on the present income from oil, it is quiet probable in the near future that Brunei's economy will meet with instability and the consequence would be that the people of Brunei will live in misery. Unemployment will numerically increase, if this happens, all politicians should be able to predict. To overcome this problem, there should be democracy in this protectorate, a democratic government which has the support and mandate from the people. Under such circumstances the people will be content and cooperative with the government elected by the people.

Social

The present social condition in the Protectorate State of Brunei today is very much regrettable, especially about the labour problem, that is to say, the increasing unemployment. If the present economic situation is not improved, the question of unemployment is of a major problem in the field of social programme which should receive attention, unemployment will not only make people hungry but also affect on the condition of children's education and health. And if the people's health is affected it could be said that the mind of the people of this protectorate will not be healthy, resulting that the people of this protectorate will not be productive. Prevention is better than cure.

The standard of living of the kampung and rural people must also receive attention, such as the provision of electricity and water supplies not to be ignored like the present moment.

LAMPIRAN: 191

Ever since the foundation of the Partai Rakyat as the biggest political organisation struggling for national independence in the Protectorate State of Brunei, it has successfully proved about its moderate political activities, and likewise (consequently) the Partai Rakyat Brunei is always struggling towards peace and prosperity, especially from the beginning of its foundation the Partai Rakyat Brunei has always been struggling on constitutional basis, up to the present moment the Partai Rakyat Brunei will abide by its principle. Membership of the Partai Rakyat Brunei is composed of the various indigenous races who are domiciled in the Protectorate State of Brunei, and this is the result of the struggle of the Partai Rakyat Brunei which is harmonious and opposing the policy of racial strife. It can be said that the struggle of the Partai Rakyat Brunei is welcomed and successful.

Geography

The area of the Protectorate State of Brunei comprises 2,226 square miles (5765 square kilometers) compared to the other big nations in the world Brunei is admittedly small. In principle and history will admit that, with the wisdom of Her Majesty's Government Brunei remains as a Protectorate State with a Sultan. Therefore, the Partai Rakyat Brunei has every confidence that Brunei will have a constitution and administer her internal affairs until full independence and will become a sovereign state both internally and externally. Its area and population are so favourable and this is couple parallelly with planned, objective, and concrete economy. The protectorate of Brunei will become a peaceful and prosperous nation. All these factors are still in existence to this date, and as a proof that the Partai Rakyat is struggling for this protectorate in accordance with the belief of Her Majesty's Government, because up to now Her Majesty's Government has an ambassador extra-ordinary as High Commissioner, therefore it is not quite dubious that Brunei Protectorate will become an independent state both internally and externally. Brunei's wealth, oil is the main source of income apart from a variety of others which are still unexploited. Also, the area of fertile land available in Brunei will make herself supporting and there is a possibility that Brunei will be able to export her products to other countries which demand them. Brunei has also a vast area of forest reserve to produce logs and sawn-timber both for the purpose of internal use and export, what is required is planning in our production system. The source of income from oil is quite limited, and this deserves great attention.

Economy

It is quite normal for everyone to ask: if a state whether still struggling for independence or still a Crown Colony or as a protectorate like Brunei is the

LAMPIRAN: 193

Main roads leading to the kampungs (villages) especially to the rural areas are of vital importance as a means of communication; important especially to farmers for transporting them to the central market.

Civic activities must not be ignored as it is today; this should be given proper guidance and subsidies by the government.

Partai Rakyat Brunei believes that Her Majesty's Government wishes to see healthy and active citizens of a state and the people of the Protectorate of Brunei will become productive, healthy and active. Therefore, if Brunei becomes a sovereign state both internally and externally, Her Majesty's contributions will always be borne and written into our history.

It has been proved that all former colonial territories after achieving independence will always regard Her Majesty The Queen as Head of the Commonwealth of Nations. Why Partai Rakyat Brunei was convinced because the merits of Her Majesty's Government was never wiped out from the mind of the former colonial people, likewise the Partai Rakyat Brunei also has the confidence towards Her Majesty's Government.

Education

The position of education in the Protectorate of Brunei is of vital importance either today or in the future, educational syllabus with national characteristics should be introduced right now because the Protectorate of Brunei has a number of domiciled.

To avoid the devided feeling of loyalty towards His Highness the Sultan, an educational system based on constructive effort be formulated. It has been realised from the beginning that, to channel this national educational system, an opposition was expected. If the question arises, the Citizenship Law will overcome the issue. National Educational System does not mean the destruction of other culture, but will become a strong basis in the founding of a united society, a society loyal to His Highness the Sultan of Brunei and the Head of the Commonwealth of Nations. It can be made clear here that, if a non-Bruneian citizen wishes to show his loyalty to His Highness the Sultan of Brunei and the Head of the Commonwealth of Nations, there is no logical reason why a person must not forget this ancestor's country, and will begin taking active part in promoting the culture of his adoption and will have the right of a citizen, and to render undivided loyalty to His Highness the Sultan of Brunei and the Head of the Commonwealth of Nations. Therefore, for those who are in doubt to render such undivided loyalty, they can settle down to doing business with complete security as a foreigner.

A National Educational System is of vital importance in the field of developing economy, politics and peace. With such educational system, in future, racial strife will die a natural death, hatred will never have a place, and foreign indoctrination will never have the chance to develop among the masses. By the formulation of a national educational system, future citizens of Brunei will really become responsible towards their government and state. People's understanding as a whole towards responsibility will be healthier. As a maxim says: 'A nation is not big because of its dense population and area, but by the measurement of knowledge its citizens possess'. It is clear that education for the people is highly important and must not be delayed.

Administration

Like brain in a human being, administration is equally important in a government. The administration in the Protectorate of Brunei should be regarded as vitally important, and if weakness is found it should be reorganised immediately. This does not necessarily mean that the Partai Rakyat Brunei accuses the present administrations; what is required is a careful consideration as to whether there is a necessity for reorganisation or the need be.

The Partai Rakyat Brunei is a little confused about the present administration because of its failure to complete the Nationality Bill which according to the State's Constitution should be completed few months back, but the Partai Rakyat was not clear of the present administration or was it deliberately delayed by the present The Honourable Members of the Executive Council.

However, if the present situation continues, not only the Partai Rakyat Brunei but the whole people generally will be in despair.

Politic

Today the political situation in the Protectorate of Brunei is peaceful and calm. This is because the Partai Rakyat Brunei is a moderate political party, and there is no hard feeling towards one another. The people of Brunei though some are less illiterate but that was not the factor which could be made as an excuse that they were not nationally and politically conscious. This could be illustrated in the strict discipline amongst the members of the Partai Rakyat. On every mass rally, the meeting place was usually crowded with orderly and well-mannered followers and sympathisers of the Partai Rakyat, and there never occurred any disturbances of any kind during these mass rallies. The reason was because all instructions by leaders of the Partai Rakyat were always adhered to by all its members.

Since the Brunei Government's announcement that is the period of election would have to be prolonged for another year, it has shocked the whole population of the Protectorate of Brunei, and a number of conjecture were being made there is an opinion which, 'It never occurred in the annals of the Sultanate of Brunei that Royal Commands of Their Highness failed to materialise', and there was another opinion which said that The Royal command and His Highness the Sultan has been purposely betrayed by those who hold key positions in the Government of the protectorate of the State of Brunei', and there is another opinion which said that 'Her Majesty's Government was responsible for the delay in the Election'. In facing the peoples' opinions and conceptions the Partai Rakyat has to undergo a great deal of difficulty in the explaining the real facts. Up to the moment of presenting this petition the Partai Rakyat Brunei is still unable to express its views.

It can be claimed now that the Partai Rakyat is facing a very critical situation in order to face the present political atmosphere which is at the boiling point in this Protectorate of Brunei. To overcome the state of affairs, the creation of a democratic government was the only alternative. As stated above that the Partai Rakyat has a membership of not less than 20,000 people from the Protectorate of Brunei, and it must be clearly understood that there is a section of the population of the Protectorate of Brunei which do not belong to the Partai Rakyat, Partai Rakyat finds it difficult to be responsible for the angry mood whose extremism may be more than those of the members of the Partai Rakyat.

If the political situation in a country is not healthy it follows that the economy of the country is not stable as well.

It is no longer a secret that the Brunei United Labour Front is a big labour organisation which has a tremendous influence and that ninety percent of the total labour force in the Protectorate of Brunei are its members. On July 25th 1961, United Labour Front has passed a resolution, as announced by its Secretary General that the Brunei United Labour Front has a clear decision to support the struggle of the Partai Rakyat in urging His Highness Government to announce the date for the proposed election in compliance with the date of the official Royal Command of His Highness the Sultan which more or less said, 'not later than two years general elections will be held' - this means that in the month of September 1961, general elections would have been carried out in this Protectorate of Brunei.

The Partai Rakyat Brunei is a far sighted and broad minded organisation, and does not wish to see chaos to happen as a result of the present situation, it has requested the Brunei United Labour Front to postpone the proposed strike for the time being, and this is because the Partai Rakyat believe that Her Majesty's Government does not equally

The people of Brunei always stated their desire and demand for democratic form of government in the Protectorate of Brunei peacefully. And in the year 1957, a Memorandum from the Partai Rakyat was presented to His Excellency the Secretary of State for the Colonies, and it was followed by a delegation of three leaders of the Partai Rakyat on the 26th of September 1957 and the meeting was presided over by His Excellency the Secretary of State for the Colonies, Mr. Allan Lennox-Boyd himself. Owing to conservative pretext given by the Colonial Secretary during the course of the foregoing conference, it had to be adjourned without any result of democracy in the protectorate. Although the people were furious at the time of the delegation's return, but their angry mood was channelled to perseverance by the leaders of the Partai Rakyat without any uprisings. This shows that there is a deep understanding of politics in the mind of the people; they understand that there is time when national struggle has to face a political set-back.

The Partai Rakyat Brunei is of the opinion that political stability in the Protectorate of Brunei here means the present economic rights will be safeguarded, and in time to come will strengthen our future economy. Unfortunately the opinion and views of the Partai Rakyat Brunei were not received by the other side, whereas it has been made as a basis for delaying the granting of democratic rights to the whole people of the Protectorate of Brunei.

This was proved during the conference between Her Majesty's Government and the delegation from the protectorate headed by His Highness the Sultan of Brunei on the 14th of March 1959, and the outcome of the conference was the agreement that Her Majesty's Government has agreed to give a written constitution to the Protectorate of Brunei which was called 'The Constitution of the State of Brunei 1959'.

In facing the constitutional problem, Partai Rakyat Brunei was very clear about its standing as laid down in its Political Statement dated on the 5th of December 1959, that is Partai Rakyat Brunei remains 'Neutral and Active'.

On the 29th of September 1959, His Highness the Sultan of Brunei enforced the promulgation of the constitution, and His Highness added further there was going to be an election in the Protectorate of Brunei not later than two years, in accordance with Section 27 (2) of the aid constitution. In about two years the Partai Rakyat Brunei work hard informing the people of the Protectorate of Brunei of the sincerity of the step in the development of democracy in the Protectorate of Brunei, and Partai Rakyat Brunei went further urging the people of the Protectorate of Brunei to regard the royal command as genuine and the period was not to be prolonged.

wish to see the principles of democracy to be destroyed in this Protectorate State of Brunei. This belief is founded on the agreement entered upon between Her Majesty's Government and His Highness the Sultan as stated: Agreement 1959 - Section 4 (1) which reads, 'His Highness agrees to receive, and provide a suitable residence for, a High Commissioner to advise on all matters connected with the government of the state other than matters relating to the Muslim religion and the customs of the Malays as practised in the state, and agrees to accept the advice of the High Commissioner'. Because of the confidence in Her Majesty's Government that this petition is presented and this is the only channel through which democratic principles in the Protectorate of Brunei will be carried and guaranteed.

The Partai Rakyat Brunei appeals to Her Majesty's Government to hold a conference between representatives of His Highness the Sultan of Brunei with the representatives of Her Majesty's Government to receive at least four delegates at the Colonial Office, London to answer questions which might be put to the Partai Rakyat. It would be better still if Her Majesty's Government would invite the delegation from Partai Rakyat so that it will cordially affect the atmosphere of the conference then.

To conclude this petition, Partai Rakyat Brunei wished to thank your Excellency as Her Majesty's Secretary of State for the Colonies, and with respect with Your Excellency's reply.

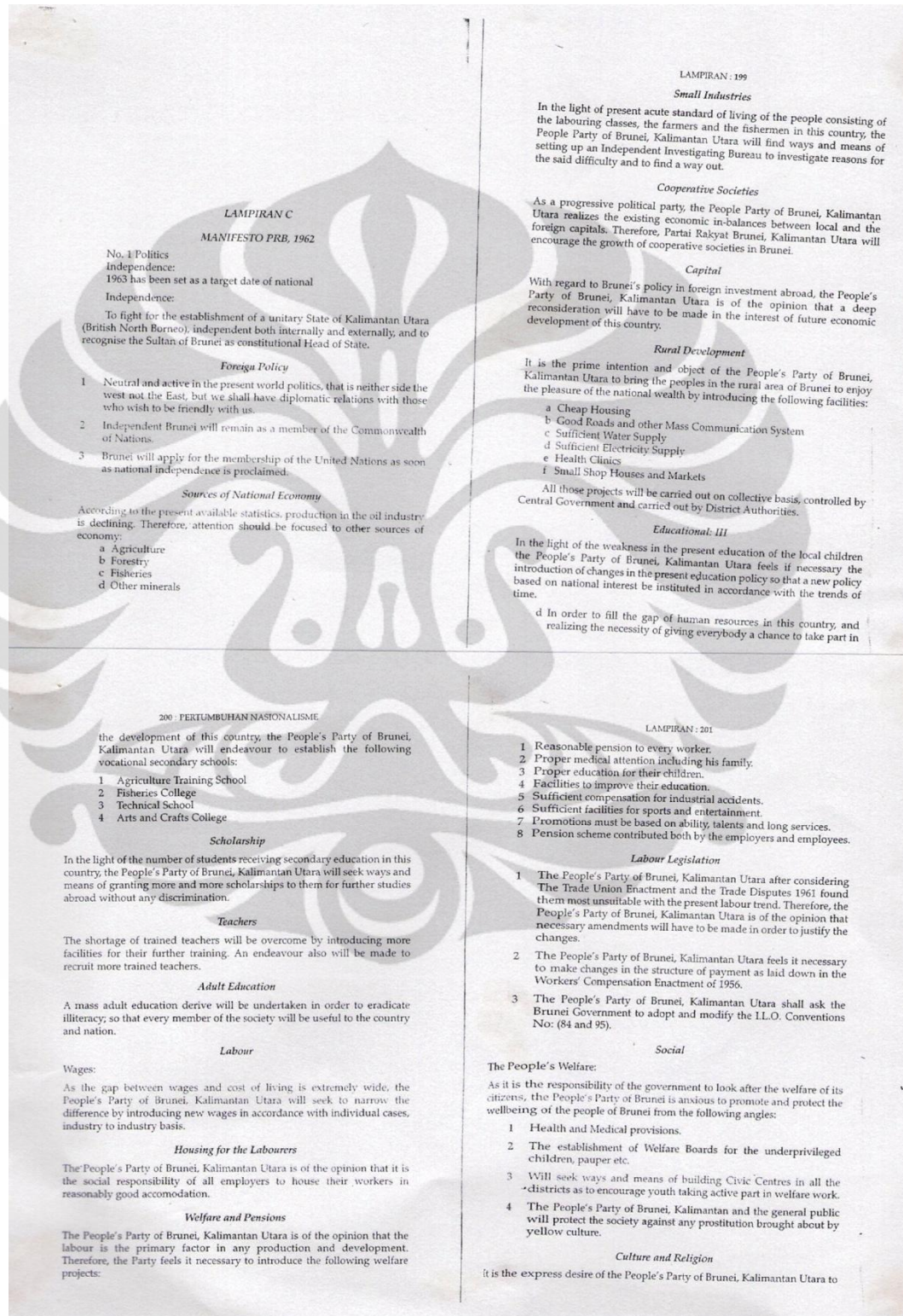
Written in Brunei on the 4th of August 1961 and was presented to His Excellency, the British High Commissioner in Brunei for onward transmission to the Right Honourable, the Colonial Secretary of State for the Colonies.

President	Secretary General
.....
Vice President	Assistant Secretary General
.....

(A translation from the book, *Revolution & Proclamation of December 1962*).

Lampiran VIII

Deklarasi Proklamasi PRB 1962



protect the Malay Culture as National Culture in this country and that Islam as the official religion. In this respect, the party will endeavour to provide the following:

- 1 The setting up of Pilgrimage Board whose main functions will be to ensure the wellbeing of pilgrims in their journey to and from Makkah.
- 2 To increase the number of religious teachers together with an endeavour to improve their knowledge and also to promote their standard of living.
- 3 To propagate the teaching of Islam in this country without affecting any other religion.
- 4 The Board of Film Censorship in this country should be constituted by representatives of the various social organizations, officials from the Religious Departments, and Government Officials and there shall be only one Film Censor Board.

Administration

Administration is the life of any Government and because of that the People's Party of Brunei, Kalimantan Utara is of the opinion that is should be free from any political controversy, family system and favouritism.

The recruitment of officers into the Civil Service should be through free competition and based on experience and qualifications.

Being a progressive political party, the People's Party of Brunei, Kalimantan Utara is anti-beaucracy. In that respect, it feels it is necessary to decentralize the administration into the various district controls.

As a party fully supported by the people and the voice of the people of Brunei is of the opinion that there should be an Anti-Corruption Bureau to combat corruption in all aspects.

The People's Party of Brunei, Kalimantan Utara is of the opinion that is should, and will endeavour to pave the way for mutual understanding and cooperation between the civil servants and the general public in the interest of national development.

In order to fill the administration with local officers, the People's Party of Brunei, Kalimantan Utara will seek ways and means of training the locals in accordance with its individual talents, so that they will be able to become good administrators.

Freedom

The People's Party of Brunei, Kalimantan Utara feels that the introduction

of the Public Order Enactment 1962 by the Brunei Government was contrary to the following fundamentals of democracy:

- 1 Freedom of speech.
- 2 Freedom of organization.
- 3 Free to sound public opinion.
- 4 Free to adhere to any political conviction.
- 5 Freedom from fear.

And, in the light of the present harmony, peace and prosperity in this country and the absence of any public disorder, the introduction of the Public Order Enactment has the sole purpose of suppressing the national movement in this country which is now fighting for national independence by constitutional means.

Conclusion

To the people as a whole, we from the Central Executive Committee of the People's Party of Brunei, Kalimantan Utara appeal to all to be in a state of peace, adhering to the principles of the party to support the contents of this manifesto.

Date: 9th September 1962

The Secretary-General
United Nations Organization,

New York
Sir,

We the undersigned representing our respective parties in the territories of Sarawak, British North Borneo and Brunei have the honour to submit herewith a Joint Memorandum with a view to having it placed before the committee on Colonies of the United Nations Organization or any other competent body for consideration and with a view to seeking the intervention of the United Nations in the proposed transfer of Sovereignty in British North Borneo (Sabah) and Sarawak by the United Kingdom Government to the proposed Federation of Malaysia without the exercise of the right to self-determination by the peoples in these territories, in contravention to the spirit and letter of the declaration of the United Nations and the Resolution 1514 (XV) of the United Nations General Assembly of the 14th December 1960.

We further request that in view of the urgency of the matter earliest opportunity be give to us for making oral representations before the committee.

The United National
Pasok Momogun Party of Sabah
S.D.
(G.S. Sundang)
Chairman

The Party Rakyat
(People's Party)

Yours faithfully,
The Sarawak United
People's Party
S.D.
(Ong Kee Hui)
Chairman